DINAS KEHUTANAN
Sumatera Selatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

PALEMBANG, JANUARI 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Nomor : 000.8.6.3/603/Dishut.I/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

DINAS KEHUTANANPROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026
INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan ini mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 060/047/SE/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan LKjIP Tahun 2025 memuat rencana kegiatan, perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang terdiri dari kerangka pengukuran kinerja, target dan realisasi indikator kinerja, perhitungan indikator kinerja dan evaluasi capaian indikator kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palembang, Januari 2026

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN

Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M
Pembina Utama Madya,/ IVd
NIP. 19691208 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat implementasi pengelolaan hutan secara lestari serta mendorong kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara nyata mendukung terwujudnya Visi "Sumsel Maju Terus untuk Semua", dan misi khususnya melalui pengelolaan hutan untuk mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Kinerja Dinas Kehutanan menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan mayoritas indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tujuan Pengelolaan Hutan Secara Lestari, capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan. Produktivitas kawasan hutan tercermin dari realisasi Pembayaran PNBP sebesar Rp109,98 miliar atau 141,94% dari target, yang didorong oleh peningkatan aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan kepatuhan pelaku usaha kehutanan. Upaya pengendalian kerusakan hutan juga berjalan sangat efektif, ditunjukkan oleh capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove sebesar 427,87%, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 236,61% dari target. Di sisi rehabilitasi, kegiatan penanaman pada lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 5.124,40%, menunjukkan percepatan pemulihan lingkungan yang sangat signifikan.

Penguatan usaha ekonomi perhutanan sosial juga menunjukkan kinerja positif melalui pendampingan kelembagaan kelompok perhutanan sosial yang mencapai 119,43%. Sementara itu, tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sektor kehutanan tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah sebesar 93,07%, yang dikategorikan sangat tinggi.

Pada tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan, indikatorstrategis seperti persentase tutupan lahan berhasil dipertahankan sesuai target, yaitu 18,8%. Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan tren sangat positif, ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,91% (364% dari target) serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 3,89% atau 238,65% dari target.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, kapasitas dan kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 213,67% dan 154,33% dari target. Namun demikian, indikator peningkatan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial masih berada pada kategori sedang dengan capaian 75,09%, yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, Dinas Kehutanan berhasil menekan deforestasi hingga 0,214%, jauh lebih baik dari target, serta meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Indeks Keanekaragaman Hayati, yang seluruhnya berada pada kategori sangat tinggi. Upaya rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan, dengan capaian rehabilitasi lahan kritis sebesar 353,85% dan peningkatan tutupan lahan sempadan sungai sebesar 152,38%.

Dari sisi tata kelola organisasi, kinerja perangkat daerah tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja sebesar 93,07% serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) yang mencapai 94,96%, mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif, berkontribusi nyata terhadap pelestarian hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat untuk penguatan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya, dengan tetap memberi perhatian pada peningkatan akses legal perhutanan sosial dan penguatan tata kelola kelembagaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja 4
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 13
D. Landasan Hukum 15
E. Sistematika 16
F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi 17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 18
A. Rencana Strategis 18
B. Rencana Kinerja 25
C. Perjanjian Kinerja 42
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 45
A. Capaian Kinerja Organisasi 45
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025 45
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 50
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra 55
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional 58
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan 61
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 68

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 81
8. Analisis Pengarusutamaan Gender 88
B. Realisasi Anggaran 98
C. Data Dukung Pencapaian Kinerja 104
D. Inovasi 156
E. Penghargaan 158
BAB IV. PENUTUP 160
A. Kesimpulan Umum 161
B. Langkah Strategis 162
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 5
Tabel 1.2 Status dan Kompetensi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 9
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 12
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 19
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 23
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Tahun 2025 25
Tabel 2.4 Rincian Belanja pada DPA APBD Tahun 2025 28
Tabel 2.5 Sumber Dana pada APBD Perubahan 2025 29
Tabel 2.6 Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 31
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari – September 42
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober – Desember 43
Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja 46
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 48
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 52
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 59
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tingkat Nasional Tahun 2025 63
Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 66
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 73
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 76
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 86
Tabel 3.10 Pelembagaan dan Penyelenggaraan PUG 91

Tabel 3.11 Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2025 89
Tabel 3.12 Kegiatan Responsif Gender yang dilaksanakan oleh UPTD KPH . 92
Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2025 102
Tabel 3.14 Kendala Kegiatan Tahun 2025..... 106
Tabel 3.15 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 109
Tabel 3.16 Realisasi pembayaran PNBP Tahun 2025 106
Tabel 3.17 Realisasi pembayaran PNBP Perhutanan Sosial Tahun 2025.... 111
Tabel 3.18 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2 112
Tabel 3.19 Pelaksanaan patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan 114
Tabel 3.20 Realisasi kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengamanan hutan (Untuk pengisian Aplikasi Aksi pembangunan Rendah karbon Bapennas) 117
Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3 120
Tabel 3.22 Anggaran Bidang PDAS-RHL Tahun 2025 (APBD Perubahan)... 120
Tabel 3.23 Lahan Kritis dan Sangat Kritis Wilayah Sumatera Selatan 123
Tabel 3.24 Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Yang Direhabilitasi Provinsi Sumatera Selatan 126
Tabel 3.25 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 131
Tabel 3.26 Penanaman Didalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025..... 132
Tabel 3.27 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4 134
Tabel 3.28 Alokasi Pemberian Alat Ekonomi Produktif Tahun Anggaran 2025 138
Tabel 3.29 Persetujuan Perhutanan Sosial terbit Tahun 2025 139
Tabel 3.30 Kegiatan pendampingan Masyarakat bekerjasama dengan Mitra/NGO 140
Tabel 3.31 Rekapitulasi Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 2025..... 143
Tabel 3.32 Hasil Penilaian Kelas Kelompok Perhutanan Sosial 145
Tabel 3.33 Kelas Kelompok Tani Hutan (Di Luar Kawasan Hutan) 146
Tabel 3.34 Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat 146
Tabel 3.35 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5 148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan 5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 8
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Gender 10
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 10
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 27
Gambar 2.2 Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 30
Gambar 3.1 Seremonial kegiatan HMPI di Desa Batumarta X Pelatihan dan Pembuatan Pakan Ternak (Magot) 94
Gambar 3.2 Sosialisasi Pencegahan Karhutlah 95
Gambar 3.3 Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) 95
Gambar 3.4 Kegiatan Pembelajaran Pertanian Cerdas Iklim dan contoh Kebun Belajar 95
Gambar 3.5 Kegiatan Patroli Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat UPTD KPH 96
Gambar 3.6 Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 96
Gambar 3.7 Pendampingan dan pembentukan KUPS Perempuan dan Penjaga Hutan Wanita 97
Gambar 3.8 Capaian PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2025 106
Gambar 3.9 Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan pada PBPH 109
Gambar 3.10 Capaian Patroli Pengamanan Hutan dan Mangrove Tahun 2025 110
Gambar 3.11 Pengamanan Hutan dan Lahan 113
Gambar 3.12 Koordinasi dan Sosialisasi mitigasi konflik manusia dan satwa liar dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA Sumsel dan PBPH 113
Gambar 3.13 Luas Cakupan Pencegahan Karhutlah Tahun 2025 114

Gambar 3.14 Patroli Kebakaran dan Pengamanan Hutan 116
Gambar 3.15 Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada PBPH dan PPKH 117
Gambar 3.16 Penanaman Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Tahun 2025 120
Gambar 3.17 Dokumen RTnRL dan Penyusunan Dokumen RTnRL Tahun 2025 123
Gambar 3.18 Kegiatan Penyediaan Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/ Tanaman Buah di UPTD KPH 127
Gambar 3.19 Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan 127
Gambar 3.20 Rehabilitasi Hutan Tahun 2025 128
Gambar 3.21 Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial Tahun 2025 132
Gambar 3.22 Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 135
Gambar 3.23 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam Pelatihan Arc GIS Tahun Anggaran 2025 136
Gambar 3.24 Pameran Sriwijaya Expo Tahun 2025 dan Pameran Festival Rempah Tahun Anggaran 2025 136
Gambar 3.25 Penyerahan Alat Ekonomi produktif 138
Gambar 3.26 Bimbingan Teknis Kelompok Tani Hutan 141
Gambar 3.27 Pendampingan Kelompok Tani Hutan 141
Gambar 3.28 Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 148
Gambar 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 155
Gambar 3.30 Sertifikat Penghargaan dan Pemberian Penghargaa dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 159
Gambar 3.31 SK Penetapan KPH Efektif Tahun 2025 159

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Lampiran II PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Lampiran III PROGRES TINDAK LANJUT REKOMENDASI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Lampiran IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, yang secara rinci diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, yang menyajikan capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Renstra Dinas Kehutanan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah transisi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Selanjutnya, Renstra ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 khususnya dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA. Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Khususnya di sektor kehutanan partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Terdapat 7 Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk implementasi visi Sumsel Maju Terus Untuk Semua. Sektor kehutanan mendukung 3 misi terkait dengan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local, keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Isu strategis yang menjadi tantangan dalam kinerja Dinas Kehutanan dalam 5 tahun ke depan adalah penyelesaian permasalahan kawasan hutan baik penguasaan tanah maupun penyelesaian sawit keterlanjuran. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan New Pelabuhan Tanjung Carat juga merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sumatera Selatan. Isu lainnya adalah perlunya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait pembagian kewenangan urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mempercepat penyesuaian dengan kondisi riil di daerah, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini selaras dengan isu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

Dinas Kehutanan juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan perlindungan kawasan sempadan sungai, yang berfungsi sebagai ekosistem penyangga dan zona konservasi. Alih fungsi lahan dan gambut, pemanfaatan lahan gambut yang tidak sesuai fungsinya dan perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan ancaman bencana kebakaran hutan di lahan gambut. Selain itu, Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara legal yang belum optimal menjadi isu penting dalam memperkuat kebijakan berbasis masyarakati dan kolaboratif.

Secara umum, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola kehutanan yang transparan, partisipatif, dan berbasis wilayah kelola hutan (KPH). Dinas Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan secara terpadu, termasuk kawasan lindung, sempadan sungai, dan areal bekas terbakar, guna menjaga fungsi ekologis dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Dalam mendukung ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana, kebijakan difokuskan pada upaya mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan kelembagaan pengelola hutan.

Di sisi kelembagaan, arah kebijakan ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur, memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik kehutanan melalui digitalisasi dan kemudahan akses informasi.

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Sumatera Selatan terdapat rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti untuk mencapai kinerja yang lebih baik pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu menjadi bahan acuandalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan dan perencanaan kinerja tahun 2025.

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 didasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian outcome pada 5 Program, 18 kegiatan dan capaian output pada 44 sub kegiatan yang tertuang pada Dokumen Renja Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan aktivitas organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kehutanan dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi mempunyai konsekuensi perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi menetapkan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan.

Kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan seluas 36,85% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3.375.564 ha terdiri dari Hutan Konservasi seluas 768.177 ha, Hutan Lindung seluas 566.558 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 213.345 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 1.687.929 ha dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 139.555 ha. Kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi, sedangkan Hutan Konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

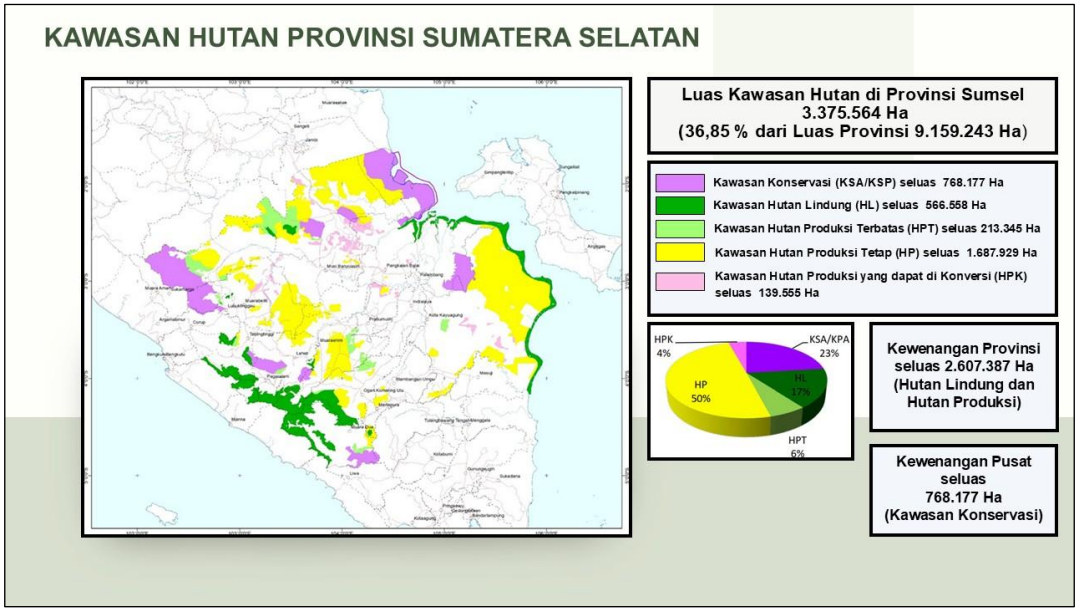

Gambar 1.1 Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1.1 Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan dan Perairan					
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (SM, TWA, TN)	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ulu	68.724	-	17.399	58.951	-	**145.075**
Ogan Komering Ilir	96.961	14.556	10.035	642.339	23.804	**787.695**
Muara Enim	57.736	8.700	26.425	152.489	8.616	**253.966**
Lahat	52.045	53.624	4.401	26.946	-	**137.016**
Musi Rawas	942	72.303	4.639	158.031	18.033	**253.948**
Musi Banyuasin	15.429	58.146	90.345	415.251	57.404	**636.575**
Banyuasin	62.619	345.045	-	64.133	30.209	**502.006**
Ogan Komering Ulu Selatan	115.079	40.916	10.064	7.586	-	**173.645**
Ogan Komering Ulu Timur	2.850	-	-	25.518	-	**28.368**
Ogan Ilir	-	-	-	100	352	**453**
Empat Lawang	65.919	2.559	4.555	3.230	-	**76.262**
Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	24.182	-	**24.182**
Musi Rawas Utara	1.136	168.062	43.297	109.172	1.137	**322.804**
Kota Palembang	-	50	-	-	-	**50**
Kota Prabumulih	-	-	1.157	-	-	**1.157**
Kota Pagar Alam	25.964	-	-	-	-	**25.964**
Kota Lubuklinggau	1.155	4.214	1.028	-	-	**6.397**
Sumatera Selatan	**566.558**	**768.177**	**213.345**	**1.687.929**	**139.555**	**3.375.564**

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.6600/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sampai Tahun 2024

Untuk pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

a) Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;
b) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan;
d) Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
e) Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
f) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan. Tugas UPTD yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah ditetapkan serta melaksanakan fasilitasi pengembangan unit-unit KPHP dan/atau KPHL dalam wilayah kerjanya. Dinas Kehutanan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH berkedudukan di 16 kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. UPTD KPH Wilayah I Meranti berkedudukan di Sekayu
b. UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis berkedudukan di Bayung Lencir
c. UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin berkedudukan di Palembang
d. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding berkedudukan di Kayu Agung
e. UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji berkedudukan di kayu Agung
f. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura berkedudukan di Batu Raja
g. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka berkedudukan di Muara Dua
h. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo berkedudukan di Muara Enim
i. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji berkedudukan di Prabumulih
j. UPTD KPH Wilayah X Dempo berkedudukan di Pagar Alam
k. UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah berkedudukan di Lahat
l. UPTD KPH Wilayah XII Benakat berkedudukan di Talang Ubi
m. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong di Lubuk Linggau
n. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas di Muara Rupit.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, serta mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, terdiri dari: (1) Polisi Kehutanan (2) Penyuluh Kehutanan (3) Fungsional Perencana, dan (4) Fungsional Arsiparis.

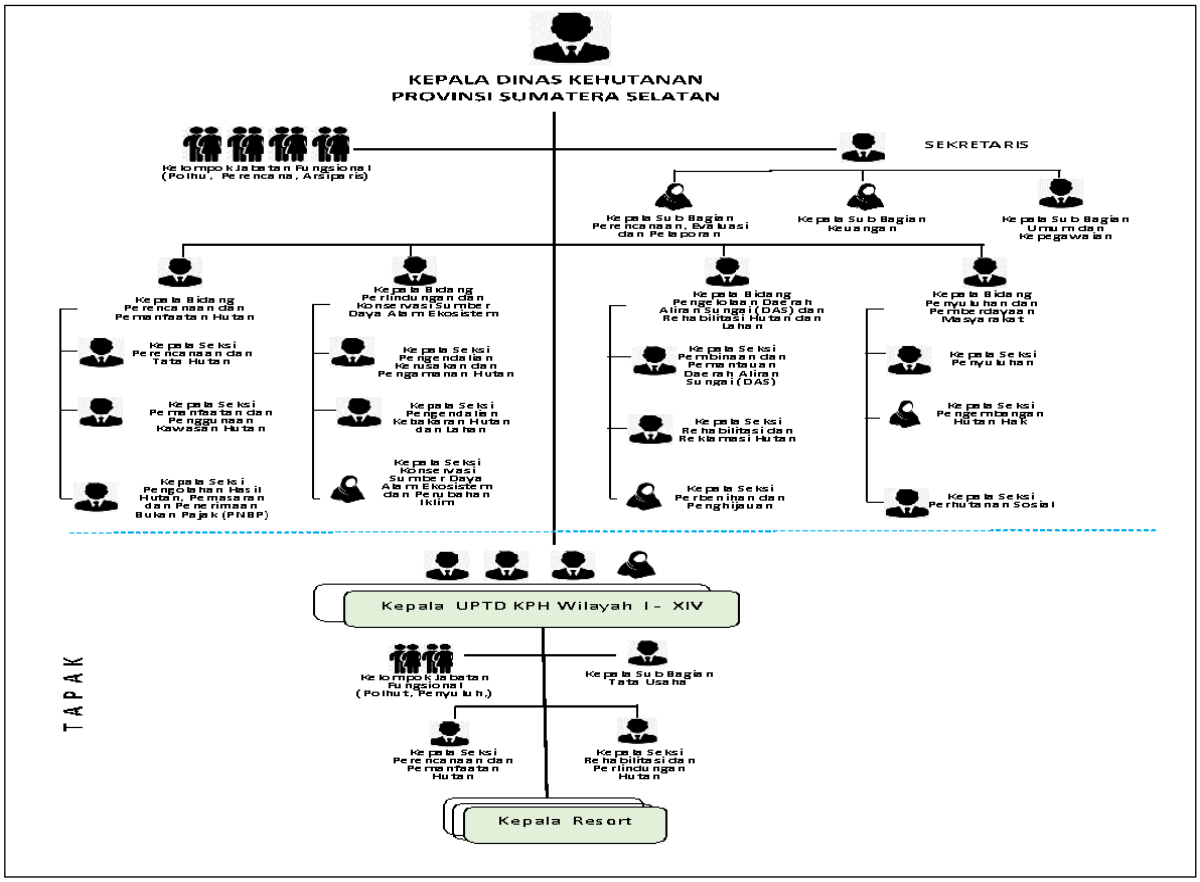

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Dukungan SDM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Status dan Kompetensi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	PNS				PPPK				JUMLAH
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL			PELAKSANA	PENYULUH	PERENCANA	ARSIPARIS	
			PELAKSANA	PENYULUH	PERENCANA					
1	DINAS KEHUTANAN	18	55	3	4	84	5	2	2	173
2	UPTD KPH I WILAYAH MERANTI	2	12	2	0	2	0	0	0	18
3	UPTD KPH WILAYAH II LALAN MENDIS	4	0	3	0	13	1	0	0	21
4	UPTD KPH WILAYAH III PALEMBANG BANYUASIN	3	6	4	0	15	1	0	0	29
5	UPTD KPH WILAYAH IV SUNGAI- LUMPUR RINDING	3	4	1	0	22	1	0	0	31
6	UPTD KPH WILAYAH V LEMPUING MESUJI	4	3	2	0	14	1	0	0	24
7	UPTD KPH WILAYAH VI BUKIT NANTI MARTAPURA	4	16	5	0	15	3	0	0	43
8	UPTD KPH WILAYAH VII MEKAKAU SAKA	4	10	1	0	14	2	0	0	31
9	UPTD KPH WILAYAH VIII SEMENDO	3	5	1	0	3	2	0	0	14
10	UPTD KPH WILAYAH IX SUBAN JERIJI	4	4	4	0	12	1	0	0	25
11	UPTD KPH WILAYAH X DEMPO	4	14	1	0	5	1	0	0	25
12	UPTD KPH WILAYAH XI KIKIM PASEMAH	4	5	4	0	7	1	0	0	21
13	UPTD KPH WILAYAH XII BENAKAT	4	2	1	0	4	1	0	0	12
14	UPTD KPH WILAYAH XIII LAKITAN BUKIT COGONG	4	11	5	0	5	1	0	0	26
15	UPTD KPH WILAYAH XIV RAWAS	4	6	0	0	5	0	0	0	15
JUMLAH		**69**	**153**	**37**	**4**	**220**	**21**	**2**	**2**	**508**
		263				**245**				

Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, November 2025

Profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan baik yang ditempatkan di Kantor Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut.

SDM berstatus ASN berjumlah 508 orang, 51,77% berstatus ASN PNS dan 48,23% berstatus ASN PPPK. Selain data tersebut di atas, terdapat pegawai Non ASN yang belum termasuk dalam PPPK paruh waktu sebanyak 23 orang.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan sebanyak 508 Orang dengan Proporsi gender laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. jumlah pegawai laki–laki 332 orang (65,35%) dan pegawai perempuan 176 orang (34,65%).

Pegawai di Kantor Dinas cukup besar (34,06%) dan selebihnya tersebar di 14 UPTD. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura memiliki jumlah pegawai yang paling banyak 43 orang, sedangkan UPTD KPH Wilayah XII Benakat memiliki jumah pegawai yang paling sedikit yaitu 12 orang. Jumlah pegawai UPTD yang lainnya memiliki sebaran pegawai yang beragam 14 sampai dengan 31 orang.

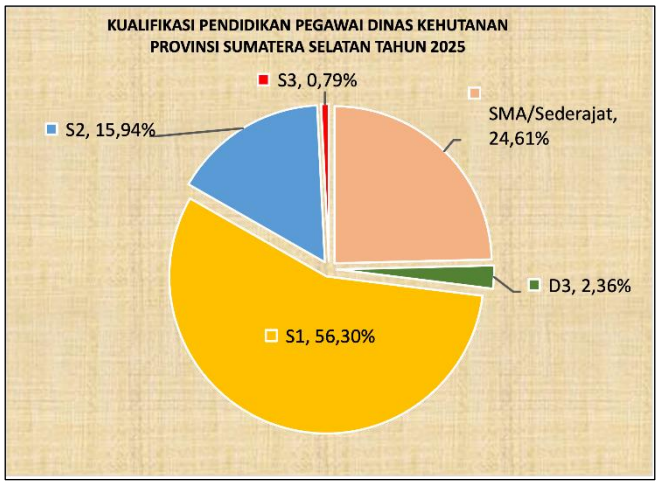

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Lebih dari setengah pegawai dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berpendidikan S1 (286 orang, 56,30%), sedangkan SLTA/sederajat (125 orang, 24,61%), D3 (12 orang, 2,36%), S2 (81 orang, 15,94%), dan S3 (4 orang, 0,79 %). Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 19 Eselon 3 yang terdiri 1 Kesekretariatan dan 4 bidang teknis dan 14 (empat belas) UPTD Kesatuan Pengelolaan hutan yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola hutan negara yang kewenangan Provinsi seluas 2.607.387 ha (28,47% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan).

Luas wilayah kerja masing-masing UPTD cukup besar tidak diimbangi dengan jumlah tenaga teknis kehutanan yang ada di setiap KPH. Berdasarkan standar jangkauan pengawasannya, areal hutan seluas 10.000 Ha dipantau oleh 1 orang Polisi Kehutanan. Jumlah pegawai yang tidak seimbang ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap gangguan hutan seperti Illegal Loging, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa liar.

Selain itu kurang tenaga penyuluh juga menjadi kendala dalam pembinaan Perhutanan Sosial, rehabilitasi hutan dan kegiatan pengelolaan hutan lainnya. Dengan demikian UPTD perlu didukung oleh pegawai dengan kompetensi Penyuluh dan Pegawai Pendamping Petugas Teknis kehutanan.

Dukungan sarana dan prasarana pada lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terutama pada kantor UPTD belum sepenuhnya memadai. Ruangan kantor masih berupa sewa Gedung atau pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten yaitu UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah di Lahat dan UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti di Baturaja.

Sarana kerja pada Kantor KPH juga belum memadai terutama sarana komputer dan transportasi. Kedua alat itu sangat penting untuk menunjang operasional UPTD dalam melaksanakan sosialisasi/patroli pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan, serta pendampingan masyarakat dalam Perhutanan Sosial. Sementara itu, rasio personal computer dan/atau laptop dibanding jumlah

pegawai yang ada di kantor induk maupun UPTD KPH belum cukup memadai. Hal ini menjadi salah satu penghambat kecepatan pelayanan publik.

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1	**Aset Tetap**				
1.1	**Tanah**				
1.1.1	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol II	14	1	15	
1.1.2	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol III	0	3	3	
1.1.3	Tanah Bangunan Gedung/Mess/Wisma/Asrama	0	1	1	
1.1.4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	29	33	
1.1.5	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	0	4	4	
1.1.6	Tanah Lapangan Tenis	1	0	1	
1.1.7	Tanah Persil Lainnya	0	1	1	
1.1.8	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	0	1	1	
1.1.9	Tanah Hutan Lainnya	0	1	1	
1.1.10	Tanah Non persil Lainnya (dst)	0	1	1	
1.1.11	Tanah Kaveling (dst)1	3	0	3	
1.2	**Gedung dan Bangunan**				
1.2.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	42	53	
1.2.2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	0	4	4	
1.2.3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	0	1	1	
1.2.4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	2	
1.2.5	Bangunan Gudang Lain-lain	3	0	3	
1.2.6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	0	1	
1.2.7	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	0	1	
1.2.8	Gedung Pos Jaga Permanen	1	6	7	
1.2.9	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	0	2	2	
1.2.10	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	0	1	
1.2.11	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	0	1	
1.2.12	Bangunan Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	0	1	
1.2.13	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-Lain (dst)	1	0	1	
1.2.14	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (dst)	1	1	2	
1.2.15	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	7	0	7	
1.2.16	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	0	1	1	
1.2.17	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	6	0	6	
1.2.18	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1	0	1	
1.2.19	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	29	1	30	
1.2.20	Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen	0	1	1	

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1.2.21	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	2	2	4	
1.2.22	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	3	3	
1.2.23	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-Lain (dst)	0	1	1	
1.2.24	Tugu Lainnya (dst) Pagar Permanen	0	1	1	
1.3	**Peralatan dan Mesin**				
1.3.1	Jeep	6	2	8	
1.3.2	Mini Bus	9	2	11	
1.3.3	Mesin proses lainnya (dst)	7	0	7	
1.3.4	Station Wagon	1	2	3	
1.3.5	Ranger double	0	1	1	
1.3.6	Kendaraan Dinas Bermotor (hibah)	1	1	2	
1.3.7	Pick Up	1	5	6	
1.3.8	Sepeda motor	42	150	192	
1.3.9	Portable water Pump	1	0	1	
1.3.10	Portabel Generating set	1	0	1	
1.3.11	Pompa lainnya	4	0	4	
1.3.12	Pompa Kebakaran/Portable	2	0	2	
1.3.13	PC	19	24	43	
1.3.14	Laptop	9	44	53	
1.3.15	Notebook	14	20	34	
1.3.16	GPS	1	0	1	
1.3.17	Sound System	-	-	7	
1.3.18	Printer	-	-	56	
1.3.19	A.C. Split	-	-	30	

Sumber data : Kesekretariatan November 2025

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks dan multidimensional, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan hutan yang diselenggarakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) belum optimal. Hal ini terkait dengan masih rendahnya realisasi tanaman pada areal efektif, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan serta Rap/Pan Karbon belum diusahakan secara optimal.
2. Pelaksanaan Rencana Operasional FOLU NET SINK belum optimal dan Skema RBP Carbon di Provinsi Sumatera Selatan belum terkoordinir.
3. Penyelesaian permasalahan kawasan hutan baik penguasaan tanah maupun penyelesaian sawit keterlanjuran termasuk penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan New Pelabuhan Tanjung Carat juga merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemegang perizinan (PPKH, PBPH dan Pehutsos) belum secara optimal melaksanakan kewajiban perlindungan hutan sehingga berdampak pada berbagai aspek interaksi negatif manusia dengan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan serta jual beli kawasan hutan.
5. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sering tidak konsisten dan tidak memberikan efek jera hal ini disebabkan kurangnya personil polisi hutan dan sarana prasarana.
6. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum optimal, Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani hutan, Lemahnya aksesibilitas petani (KTH/KPS) pada sumber permodalan dan industri hilir usaha tani hutan.
7. Kurangnya sinergitas para pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat KTH maupun KPS dalam pengelolaan hutan baik itu dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perbankan, NGO, BUMS/BUMD. Belum terjalinnya kerjasama/kemitraan kehutanan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang masih rendah, rendahnya akses pemasaran hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu, keterbukaan akses pasar terhadap produk hutan rakyat yang masih kurang memadai, ketersediaan industri hilir yang menampung hasil hutan rakyat yang kurang memadai.
8. Kurangnya kualitas SDM Penyuluh Kehutanan yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan kompetensi termasuk prasarananya, pelibatan SDM kehutanan terhadap kegiatan pembangunan kehutanan yang masih kurang.

9. Laju pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak sebanding dengan luasnya lahan krtitis yang ada, hal ini disebabkan masih kurangnya anggaran pembiayaan baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi DAS merupakan kegiatan yang memerlukan kolabrorasi dan kerjasama multipihak seluruh jajaran pemerintah (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa) maupun swasta.
10. Penanaman Lahan kritis di luar Kawasan memerlukan keselarasan dengan pemilik lahan
11. Pelaksanaan rehabilitasi DAS melalui revegetasi tanaman belum mampu menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
12. Masih adanya asset yang belum disertifikasi.
13. Pengajuan formasi fungsional PEH, Penyuluh, Polhut belum selesai.
14. Sarana dan prasarana KPH, termasuk kantor dan kendaraan operasional, perlu alternatif pengadaan lainnya.
15. Updating data dana transfer daerah khususnya untuk sektor kehutanan belum mutakhir, maka diperlukan sinkronisasi tingkat pemerintah provinsi-pusat.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Susunan Organisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 41).

E. Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Struktur Organisasi dan Tatakerja
C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
D. Landasan Hukum
E. Sistematika
F. Rekomendasi

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi

Hasil koreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Tahun 2024 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sumatera Selatan, dan akan ditidaklanjuti dalam penyusunan laporan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada Bab I Pendahuluan belum menyajikan isu strategis dan arah kebijakan, hasil evaluasi SAKIP dan rekomendasi dibuat dalam bentuk laporan tidak lanjut sebagai lampiran dari perbaikan yang dilakukan dari Inspektorat.
2. Belum melampirkan Rencana Kinerja Tahunan.
3. Belum melampirkan pengukuran kinerja dilampirkan perjanjian kinerja.

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kehutanan Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rekomendasi dan sudah ditindak lanjuti sebagaimana lampiran.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pembangunan kehutanan kedepan dalam pengelolaannya lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Di Sumatera Selatan pengelolaan sektor kehutanan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu pengelolaan yang berorientasi pada kayu menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam. Selain itu dalam pengelolaan hutan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam jangka menengah, guna mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta kebutuhan dan karakteristik sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra Dinas Kehutanan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026 (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah transisi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Selanjutnya, Renstra ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029), khususnya dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan. Meskipun keduanya berbeda periode dan cakupan perencanaan, RPD Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2025-2026 saling berkaitan dan saling menunjang dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah. RPD bertindak sebagai dokumen perencanaan jangka menengah spesifik yang membantu memformulasikan program selama 3 tahun

pertama dari RPJMD yang lebih luas (5 tahun). Dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 dirumuskan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah pendek yang terutama disusun untuk mengisi masa transisi menjelang RPJMD baru.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA. Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Khususnya di sektor kehutanan partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Terdapat 7 Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk implementasi visi Sumsel Maju Terus Untuk Semua. Sektor kehutanan mendukung 3 misi sebagai berikut:

Misi 2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim

Misi 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dan telah ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan sasaran berdasarkan RPD dan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	RPD 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029
Tujuan Renstra	Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan
Sasaran Renstra	1. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan 2. Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 3. Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan 4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial 5. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah 2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) 3. Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 4. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan 5. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga 6. Meningkatnya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama Renstra	1. Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah) 2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi) 3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%) 4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha) 5. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%) 6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok) 7. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	Persentase tutupan lahan (%)
Indikator Kinerja Kunci	1. Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial 2. Persentase Kerusakan Hutan Pertahun (Deforestasi) 3. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) 2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) 3. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%) 4. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)

Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	RPD 2024-2026	RPJMD Tahun 2025-2029
		5. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%) 6. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%) 7. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka) 8. Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka) 9. Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%) 10. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%) 11. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%) 12. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)

Sumber : Renstra Transisi Dishut Tahun 2024-2026 dan Renstra Dishut tahun 2025-2029

Sasaran merupakan kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai penjabaran dari tujuan pembangunan. Sasaran menggambarkan perubahan yang diharapkan, baik dalam aspek tata kelola, kualitas layanan, maupun dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai alat ukur strategis yang merepresentasikan capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selanjutnya, pencapaian IKU didukung oleh Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih operasional. IKK berorientasi pada keluaran (output) dan capaian kinerja antara yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKU. Dengan kata lain, IKK menjadi indikator pengendalian pelaksanaan yang memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan selaras dan konsisten dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU dan IKK yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan merupakan penjabaran RPD dan RPJMD, juga diselaraskan dengan amanah Inmendagri No 2 Tahun 2025 dan Indikator Lingkungan Hidup dalam RPJMN 2025-2045 sektor kehutanan yang bertujuan untuk menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat

dan daerah provinsi karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Target IKU dan IKK yang telah ditetapkan selama periode Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2022	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	89,06		73,80	77,48	81,36				
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	12		36	61	82				
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	4,94		10,51	12,19	15,76				
Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	279,32		10	10	20				
	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	8,19		0,14	0,14	0,14				
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	92		140	175	200				
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100		100	100	100				
	Persentase tutupan lahan (%)		**N/A**		**18,8**	**19,1**	**19,4**	**19,7**	**20**	**20,3**
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		N/A		0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)		N/A		1,63	1,86	2,09	2,31	2,54	2,77
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		N/A		6	8	9	10	11	12

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2022	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		N/A		3	4	5	6	7	8
	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)		30,77		39,1	42,09	44,56	46,64	48,42	49,95
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)		0,458		0,408	0,367	0,333	0,303	0,277	0,255
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)		N/A		0,568	0,615	0,669	0,728	0,792	0,863
	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)		N/A		3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092
Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)		0,120		0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)		N/A		1,68	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)		100		100	100	100	100	100	100
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)		N/A		85/A	86/A	87/A	88/A	89/A	90/A

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja tahun 2025 disusun dan ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berlaku, yang perumusannya mengacu pada dua dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD dan RPJMD) sebagaimana diterangkan pada Bab I. Target kinerja pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77,48
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25
		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3	4
	keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568
		Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13
		Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100
		Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85/A

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasiTujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis (Pohon Kinerja /*Cascading*). Skema pohon kinerja bertujuan mencari atau menentukan akar permasalahan, diharapkan mendapatkan fokus kinerja yang menjadi prioritas.

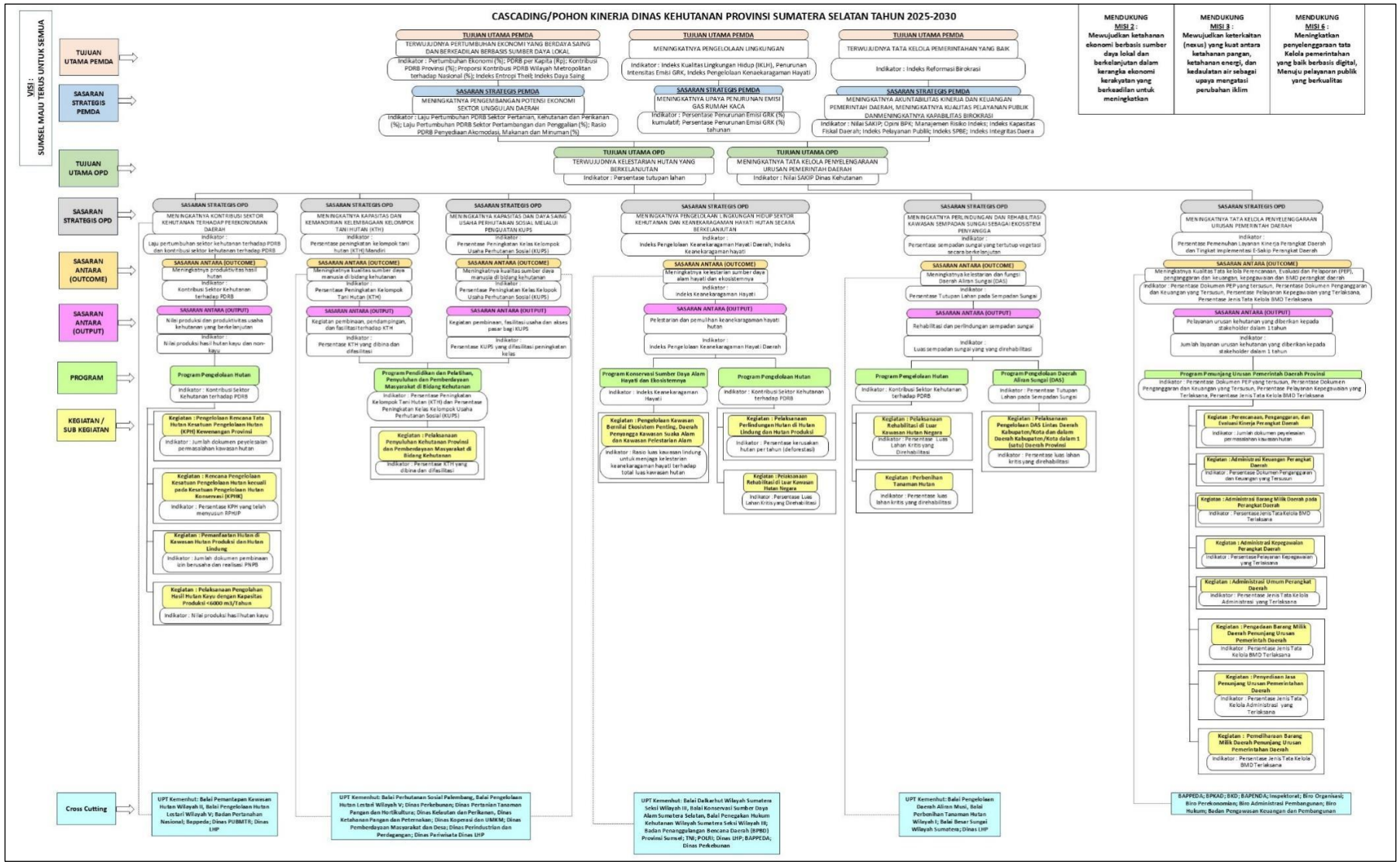

Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 didukung anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Terdapat perbedaan target rencana kerja dari Renstra Transisi Dinas Kehutanan Tahun 2024-2026 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian target berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia. Sumberdana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi, dan DBH Sawit.

Alokasi anggaran tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Induk yang ditetapkan sebagaimana DPA Nomor DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2024. Pagu anggaran Rp 64.300.891.378,- Selanjutnya terdapat pergeseran pada APBD sebagaimana DPPA Nomor DPPA/A.2/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal Mei 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.004.880.365,- (1,59%) sehingga total pagu anggaran Dinas Kehutanan semula Rp. 64.124.891.378,- menjadi Rp. 63.205.511.013,- Pada APBD-P sebagaimana DPPA Nomor DPPA/A.3/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 September 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 7.917.158.928,- sehingga total pagu anggaran Dinas Kehutanan semula Rp. 63.205.511.013,- menjadi Rp. 72.218.050.305,- Rincian dan proporsi belanja DPA sebagai berikut :Rincian berdasarkan belanja seperti tabel berikut :

Tabel 2.4 Rincian Belanja pada DPA APBD Tahun 2025

Uraian	DPA Induk		DPA Pergeseran		DPA Perubahan	
	Rp.	Proporsi Induk (%)	Rp.	Proporsi Pergeseran (%)	Rp.	Proporsi Perubahan (%)
1. Belanja Operasi	64.124.891.378	99,73	63.120.011.013	99,86	71.886.514.843	99,54
a. Belanja Pegawai	47.163.336.700	73,35	51.826.752.335	82,00	51.296.882.665	71,03
b. Belanja Barang dan Jas	16.961.554.678	26,38	11.293.258.678	17,87	20.589.632.178	28,51
2. Belanja Modal	176.000.000	0,27	85.500.000	0,14	331.535.463	0,46
Pagu	64.300.891.378	100	63.205.511.013	100	72.218.050.306	100

Belanja Dinas Kehutanan yang terbesar pada belanja pegawai. Pada DPA Pergeseran dan Perubahan terdapat penambahan belanja pegawai disebabkan adanya pegawai PPPK dan tenaga Non ASN lainnya. Selain itu alokasi DBH DR ditetapkan pada DPA Pergeseran dan Alokasi DBH Sawit ditetapkankan pada DPA Perubahan. Penggunaan DBH DR dan Sawit untuk kegiatan-kegiatan Pembangunan kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Total alokasi pagu pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp 72.218.050.306,- berdasarkan sumberdananya sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sumber Dana pada APBD Perubahan 2025

Sumber Dana	Jumlah (Rp.)	Prosentase (%)
1. Dana Alokasi Umum (DAU)	30.172.643.665	41,78%
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33.404.559.513	46,26%
3. Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH DR)	6.319.231.128	8,75%
4. Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit)	2.321.616.000	3,21%
Total Pagu	72.218.050.306	

Dana Pembangunan kehutanan yang berasal dari transfer ke daerah (DBH DR dan Sawit) sebesar 11,96% dari total APBD 2026 sangat menunjang dalam pencapaian kinerja mengingat DAU dan sebagian PAD membiayai belanja pegawai (71% dari pagu).

Dari uraian di atas, perencanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025 mempertimbangkan berbagai hal seperti dokumen renstra, masukan dari DPR, kebijakan pegawai PPPK. Selain itu juga mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja tahun lalu hasil rekomendasi dari evaluasi internal. Beberapa kegiatan yang diadakan sebagai hasil Evaluasi internal tahun 2024 dan mengatasi hambatan kinerja tahun lalu sebagai berikut :

a. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, untuk mendukung kinerja pengendalian kebakaran hutan.
b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Tingkat KPH sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan hutan agar terencana dan terintegrasi dengan baik.
c. Rehabilitasi mangrove merupakan tantangan dari kinerja rehabilitasi lahan pada daerah pesisir dan riparian.
d. Pembangunan bangunan teknik konservasi tanah dan air seperti Pembangunan sumur resapan, gully plug, dam penahan mendukung kinerja rehabilitasi lahan
e. Pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan untuk mendukung kinerja peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 pada 5 Program, 18 kegiatan dan capaian output pada 44 sub kegiatan yang tertuang pada Dokumen Renja Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi menjadi pembiayaan terbesar 81,41% dan pembiayaan pembangunan kehutanan yang terbagi dalam 4 program hanya sebesar 19,59%.

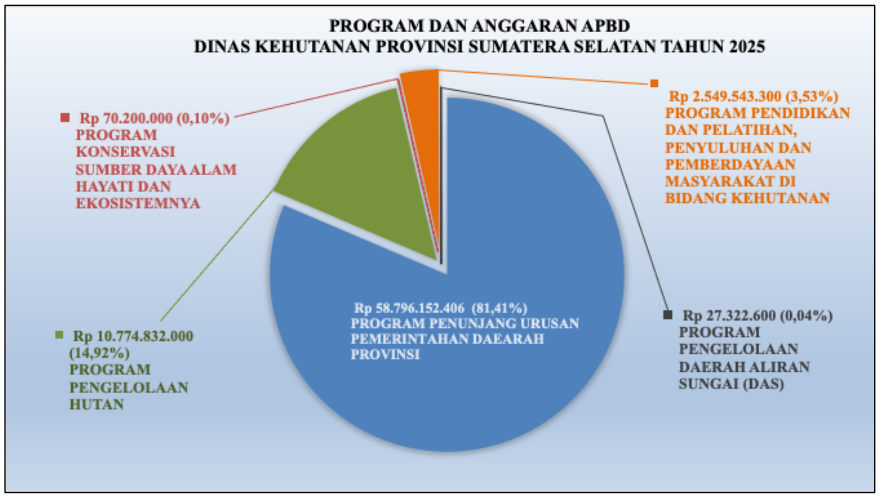

Gambar 2.2 Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai pagu dan indikator output sub kegiatan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.6 Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI						58.796.152.406	Sekretaris
i	Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					235.000.000	Sekretaris
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	Menyusun dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU dan melakukan pengumpulan data dokumen perencanaan	100.000.000	Sekretaris
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	14	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan UPTD serta menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja	135.000.000	Sekretaris
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					51.696.842.665	Sekretaris
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	339	Menyiapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	51.296.882.665	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	3	Menyiapkan pembayaran honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengada barang dan jasa	279.960.000	Sekretaris
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	8	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	120.000.000	Sekretaris
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000	Sekretaris
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	Melaksanakan pengamanan BMD	100.000.000	Sekretaris
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					139.400.000	Sekretaris
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	Sekretaris
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	2	Melakukan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi pegawai	114.400.000	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.579.015.463	Sekretaris
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	Menyiapkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor/bangunan Dinas dan UPTD	60.000.000	Sekretaris
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kantor	1.194.515.463	Sekretaris
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	Menyiapkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	Sekretaris
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	Menyiapkan Penyediaan ATK pada Dinas dan UPTD	150.000.000	Sekretaris
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	Menyiapkan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Dinas dan UPTD	75.000.000	Sekretaris
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	Menyiapkan Penyediaan Bahan Bacaan /surat kabar/majalah/ tabloid	79.500.000	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	Menyiapkan konsumsi atas kunjungan tamu dan rapat Dinas Kehutanan dan UPTD	100.000.000	Sekretaris
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	150	Menyiapkan bahan /melakukan koordinasi dan konsultasi/rapat pembangunan kehutanan pada tingkat Dinas dan UPTD	700.000.000	Sekretaris
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	Melakukan dukungan terhadap pelakanaan sistem pemerintah berbasis elektronik	160.000.000	Sekretaris
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000	Sekretaris
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	35.000.000	Sekretaris
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.180.894.278	Sekretaris
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	Menyediakan belanja jasa pengiriman surat di Dinas dan UPTD	20.000.000	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas dan UPTD	584.634.278	Sekretaris
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jaga malam, Tenaga Pendamping Petuas Teknis Kehutanan, Tenaga administrasi dan Tenaga operator komputer, dan instruktur senam.	2.576.260.000	Sekretaris
vii i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					830.000.000	Sekretaris
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	22	Penyediaan bahan bakar dan pelumas, pajak kendaraan, asuransi, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	680.000.000	Sekretaris
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	50	Menyediakan pemasangan dan pemeliharaan absensi kepegawaian, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas dan UPTD.	150.000.000	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	Melakukan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	Sekretaris
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						10.774.832.000	
i	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					5.309.750.000	Kabid PPH
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	dokumen	2	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	5.309.750.000	Kabid PPH
ii	Rencana Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatauan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					280.000.000	
26	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	4	Menyusun dokumen RPHJP dan RPHJPd	280.000.000	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
iii	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					153.770.000	Kabid PPH
27	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	dokumen	2	Updating Data Penutupan hutan dan Statistik Kehutanan Pelaksanaan/Penyediaan Data dan Informasi terkait Optimalisasi PNBP	74.975.000	Kabid PPH
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	2	Melakukan Pembinaan PBPH dan Monitoring Evaluasi Peredaran Hasil Hutan	78.795.000	Kabid PPH
iv	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m3/Tahun					153.500.000	
29	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	15	Melakukan pembinaan pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah	153.500.000	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
iii	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					2.796.616.000	Kabid PDAS RHL
30	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	Dokumen	1	Menyusun dokumen RTnRL	200.000.000	
31	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (ha)	ha	20	Melakukan Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar Kawasan Hutan Negara dan koordinasi kegiatan di tingkat KPH serta Acara Simbolis Penanaman dan Monev penanaman	1.005.722.500	Kabid PDAS RHL
32	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	laporan	8	Melakukan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangkaPengembangan Rehabilitasi Lahan, identifikasi tanaman rehab DAS paska P2, Koordinasi, survey areal Science Tekno Park, survey calon areal Rehab DAS.	900.000.000	Kabid PDAS RHL
33	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan				Melakukan rehabillitasi mangrove di luar kawasan hutan	200.000.000	
34	Pembangunan Sumur Resapan				Melakukan pembangunan Sumur Resapan	37.268.000	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
35	Pembangunan Gully Plug				Melakukan pembangunan Gully Plug	66.404.800	
36	Pembangunan Dam				Melakukan pembangunan Dam	387.220.700	
iv	Perbenihan Tanaman Hutan					50.000.000	
37	Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih atau BIbit yang beredar	Laporan	2	Melakukan pengawasan peredaran benih dan bibit	50.000.000	
iv	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					2.031.196.000	Kabid Linhut KSDAE
38	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (ha)	ha	200	Melakukan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	350.000.000	Kabid Linhut KSDAE
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	laporan	15	Koordinasi Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Operasionalisasi pencegahan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan / pengamanan hutan tingkat tapak oleh UPTD KPHMelakukan Penyuluhan/ Penyadartahuan/ Monitoringpencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	1.681.196.000	Kabid Linhut KSDAE

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						70.200.000	Kabid Linhut KSDAE
i	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					70.200.000	Kabid Linhut KSDAE
40	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (kelompok)	orang	40	Melaksanakan Sosialisasi konflik Manusia dan Satwa Liar dan Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	70.200.000	Kabid Linhut KSDAE
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						2.549.543.300	Kabid PPM
i	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					2.549.543.300	Kabid PPM
41	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	orang	30	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	648.624.000	Kabid PPM

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6	7
42	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	70	Melakukan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Tingkat Tapak UPTD KPH, Penilaian Kelas Kelompok Tani hutan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Pemberian bantuan alat ekonomi, produktif ke KTH, dan monitoring program prioritas pembangunan kehutanan	1.431.000.000	Kabid PPM
43	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (ha)	ha	5.000	Melaksanakan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dan Melakukan penyiapan dan pengembangan hutan hak	469.919.300	Kabid PPM
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						27.322.600	Kabid PDAS RHL
i	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					27.322.600	Kabid PDAS RHL
44	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	dokumen	1	Melakukan koordinasi dan Sinkronisassi dengan pihak terkait untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	27.322.600	Kabid PDAS RHL
	Jumlah : 5 Program, 18 Kegiatan, 44 Sub Kegiatan					72.218.050.306	

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2025 tergambar dalam dokumen perjanjian kinerja yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun serta dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang telah disesuaikan pada tahun yang bersangkutan. Melalui perjanjian kinerja diharapkan dapat mewujudkan komitmen komitmen yang tercermin dalam sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan dan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja selama satu tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai yang tercantum dalam Renstra PD sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan jangka menengah terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari – September

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77,48
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19
Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10
	5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Januari – September terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti dijelaskan pada tabel 2.7. Sedangkan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober – Desember terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase Tutupan Lahan yang dijelaskan pada tabel 2.8. IKU Persentase Tutupan Lahan (Level 1) ini ditunjang oleh 12 indikator kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh level 3 dibawah Kepala Dinas yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Fungsional Perencana Madya, Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, dan Polisi Kehutanan Ahli Madya. Selanjutnya Perjanjian kinerja dan target Dinas Kehutanan dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari Kepala Dinas ke Sekretaris/ Kepala Bidang / Kepala UPTD / Fungsional Madya ke Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Fungsional Muda ke pelaksana / Fungsional Pertama (individu).

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Periode Bulan Oktober – Desember

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025
	Persentase tutupan lahan (%)		**18,8**
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25
	2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6
	4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025
Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	**6**	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408
	8	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568
	9	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092
Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	**10**	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13
	11	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	**12**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100
	13	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85/A

Perjanjian kinerja ini dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada program-program bidang kehutanan yang berkaitan dengan peningkatan produksi kayu dan penerimaan negara dari subsektor kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penurunan kerusakan kawasan hutan, penurunan luas kebakaran hutan, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, dan perhutanan sosial serta penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian dengan tahun sebelumnya dan target yang ingin dicapai pada periode akhir RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yng telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja yang diukur dalam LKjIP adalah capaian kinerja indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan. Namun capaian kinerja sasaran strategis dipengaruhi pula oleh capaian kinerja kegiatan, oleh sebab itu maka pengukuran kinerja kegiatan merupakan salah satu bagian dari proses penghimpunan data dalam pengukuran kinerja sasaran strategis. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcomes (hasil).

Evaluasi kinerja merupakan salah satu bahan masukan dalam perencanaan kinerja periode yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kinerja sasaran, program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci pada tahun 2025 dengan target, membandingkan dengan kinerja dengan tahun sebelumnya, membandingkan

dengan target periode akhir dan membandingkan dengan kinerja pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

Tabel 3.1 Skala nilai peringkat kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diketahui dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKU/IKK). Tabel 3.2 menggambarkan keterkaitan yang utuh antara tujuan, sasaran, serta IKU/IKK yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan sektor kehutanan pada Tahun 2025. Setiap indikator disajikan dengan target, realisasi, tingkat capaian, dan kriteria penilaian, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari serta terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Secara umum, realisasi IKU dan IKK Dinas Kehutanan Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan atau capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana sebagian besar indikator mencapai kriteria sangat tinggi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut terlihat pada indikator peningkatan produktivitas kawasan hutan melalui pembayaran PNBP, penguatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan mangrove, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan. Selain itu, peningkatan kinerja perhutanan sosial, kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, serta pengelolaan keanekaragaman hayati juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan kehutanan

yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan sebagai pengejawantahan dari Visi dan Misi Gubernur yaitu Pengelolaan Hutan Secara Lestari dan Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan capaian yang perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada periode perencanaan selanjutnya. Capaian IKK 2.4 menunjukkan capaian sedang, namun capaian ini masih bersifat masih sementara, karena terdapat usulan beberapa kelompok tani hutan/ kelompok Masyarakat yang telah difasilitasi oleh Dinas Kehutanan masih dalam proses pembahasan hasil verifikasi lapangan dan belum terbit persetujuan perhutanan sosial oleh Menteri Kehutanan sehingga belum dapat dicatat sebagai hasil kinerja tahun ini. **Upaya percepatan perlu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar kendala-kendala dan persyaratan usulan perhutanan sosial dapat diketahui dan segera dipenuhi untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan**.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN(%)	KRITERIA
1	2	3		4	5	6	7
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rp)	77.484.874.860,00	109.981.335.177,16	141,94	Sangat tinggi
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61	261	427,87	Sangat tinggi
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,61	Sangat tinggi
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5.124,40	Sangat tinggi
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43	Sangat tinggi
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175	209	119,43	Sangat tinggi
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Sangat tinggi
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,8**	**100,00**	**Sangat tinggi**
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91	364,00	Sangat tinggi
		2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89	238,65	Sangat tinggi
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82	213,67	Sangat tinggi
		2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63	154,33	Sangat tinggi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN(%)	KRITERIA
1	2	3		4	5	6	7
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36	75,09	Sedang
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,214	190,65	Sangat tinggi
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,681	119,89	Sangat tinggi
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092	100,00	Sangat tinggi
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46	353,85	Sangat tinggi
		2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	2,56	152,38	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Sangat tinggi
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85	80,72	94,96	Sangat tinggi

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 menyajikan perbandingan kinerja indikator pembangunan sektor kehutanan antara Tahun 2025 dan Tahun 2024, yang mencakup tujuan, sasaran, IKU/IKK, target, realisasi, tingkat capaian, serta kriteria penilaian. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja dari tahun ke tahun sekaligus menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan.

1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap capaian kinerja tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3.2, capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan Tahun 2023, meskipun tidak seluruh indikator dapat dibandingkan karena beberapa merupakan indikator baru. Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan terutama pada indikator yang memiliki data historis yang dapat dibandingkan, khususnya penerimaan PNBP. Di sisi lain, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian, terutama rehabilitasi kawasan hutan. Sementara itu, sebagian besar indikator strategis Tahun 2025 merupakan indikator baru sehingga belum dapat digunakan untuk menilai tren kinerja tiga tahunan secara penuh.

Peningkatan yang paling jelas terlihat pada pembayaran PNBP, dimana realisasi Tahun 2025 mencapai Rp109,98 miliar, meningkat dari Rp85,21 miliar pada Tahun 2023, atau bertambah sekitar 29,07%. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya pemenuhan kewajiban PNBP sektor kehutanan.

Pada indikator rehabilitasi kawasan hutan, realisasi Tahun 2025 tercatat 0,17%, sedangkan data Tahun 2023 dalam tabel menunjukkan 0,27%. Dengan demikian, secara kuantitatif realisasi Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2023. Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 tetap telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 121,43%.

Sementara itu, pada aspek pengelolaan lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan, terdapat perkembangan yang sangat positif. Tingkat deforestasi pada Tahun 2025 sebesar 0,21%, sedangkan Tahun 2023 tercatat 0,05%.

Untuk beberapa indikator lainnya, seperti patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove, pencegahan Karhutla, penanaman lahan kritis di luar kawasan hutan, pendampingan kelompok Perhutanan Sosial, tutupan lahan, pertumbuhan PDRB sektor terkait, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB, peningkatan KTH dan KUPS, indeks keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi lahan kritis, data Tahun 2023 belum tersedia atau indikator tersebut merupakan indikator baru. Oleh karena itu, perubahan kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun 2023 tidak dapat dinilai secara langsung untuk indikator-indikator tersebut.

2. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap capaian kinerja tahun 2024.

Perbandingan kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum terdapat peningkatan kinerja pada indikator-indikator yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan perlindungan hutan, rehabilitasi lahan kritis, penerimaan PNBP, serta pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.

Berdasarkan tabel 3.3, capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan dengan Tahun 2024. Peningkatan terlihat pada sejumlah indikator kinerja, terutama yang berkaitan dengan produktivitas kawasan hutan, pengamanan kawasan, rehabilitasi lahan, serta penguatan kelembagaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.

Tujuan pengelolaan hutan secara Lestari yang digambarkan melalui realisasi pembayaran PNBP meningkat dari Rp99,37 miliar pada Tahun 2024 menjadi Rp109,98 miliar pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya pemenuhan kewajiban PNBP dari sektor kehutanan.Selain itu, pelaksanaan patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove meningkat dari 171 lokasi menjadi 261 lokasi, atau bertambah sebanyak 90 lokasi. Meskipun merupakan indikator baru dalam perjanjian kinerja Dinas Kehutanan, capaian tersebut menunjukkan penguatan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Pada sasaran pengurangan lahan kritis, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang dilakukan penanaman meningkat dari 130,08 hektare pada Tahun 2024 menjadi 512,44 hektare pada Tahun 2025. Demikian pula, rehabilitasi lahan kritis meningkat dari 0,12% menjadi 0,46%. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya intervensi pemerintah daerah dalam pemulihan lahan dan rehabilitasi ekosistem.

Pada sasaran meningkatnya usaha ekonomi dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, jumlah kelompok yang memperoleh pendampingan penguatan kelembagaan meningkat dari 165 kelompok pada Tahun 2024 menjadi 209 kelompok pada Tahun 2025, atau bertambah 44 kelompok. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jangkauan pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pada aspek lingkungan hidup, tingkat deforestasi mengalami penurunan dari 0,458% pada Tahun 2024 menjadi 0,21% pada Tahun 2025. Penurunan sebesar 0,248 poin persentase ini merupakan perkembangan yang positif karena menunjukkan semakin terkendalinya kerusakan hutan. Namun, pada indikator pencegahan Karhutla, realisasi mengalami penurunan dari 36,75% pada Tahun 2024 menjadi 28,84% pada Tahun 2025. Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 sebesar 236,59% masih jauh melampaui target sebesar 12,19%.

Sementara itu, indikator persentase kawasan hutan yang direhabilitasi mengalami penurunan dari 0,22% pada Tahun 2024 menjadi 0,17% pada Tahun 2025. Demikian pula, pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah turun dari 95,45% menjadi 93,07%. Penurunan pada indikator-indikator tersebut perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya agar kualitas pelaksanaan kegiatan dan layanan pendukung dapat kembali ditingkatkan.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		KINERJA 2025			KINERJA 2024			KINERJA 2023			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2024			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77,48	109,98	141,95	73,8	99,37	134,65	50	129	258,14	110,68	105,42	Sangat Tinggi	85,21	54,99	Sedang
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61	261	427,87	36	171	475,00	NA	NA	NA	152,63	90,08	Tinggi	NA	NA	Indikator baru
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,59	10,51	36,75	349,67	NA	NA	NA	78,48	67,66	Sedang	NA	NA	Indikator baru
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5124,40	10	130,08	1300,80	NA	NA	NA	393,94	393,94	Sangat Tinggi	NA	NA	Indikator baru
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43	0,14	0,22	157,14	0,17	0,27	158,82	77,27	77,27	Tinggi	62,96	76,46	Tinggi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		KINERJA 2025			KINERJA 2024			KINERJA 2023			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2024			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175	209	119,43	140	165	117,86	NA	NA	NA	126,67	101,33	Sangat Tinggi	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	100	95,45	95,45	100	100	100	97,51	97,51	Sangat Tinggi	93,07	93,07	Tinggi
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,8**	**100,00**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**Indikator baru**	**NA**	**NA**	**Indikator baru**
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91	364,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru
		2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89	238,65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		KINERJA 2025			KINERJA 2024			KINERJA 2023			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2024			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82	213,67	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63	154,33	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru
		2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36	75,09	NA	30,77	NA	5	83,33	1.666,60	95,42	NA	Indikator baru	35,23	4,51	Rendah
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,21	51,47	NA	0,458	NA	0,17	0,05	29,41	45,85	NA	Indikator baru	420,00	175,00	Sangat Tinggi
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,68	119,72	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		KINERJA 2025			KINERJA 2024			KINERJA 2023			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2024			PERBANDINGAN KINERJA 2025 TERHADAP KINERJA 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092	100,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46	353,85	NA	0,12	NA	NA	NA	NA	383,33	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru
		2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	1,41	83,93	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	100	95,45	95,45	NA	NA	NA	97,51	97,51	Sangat Tinggi	NA	NA	Indikator baru
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85	80,72	94,96	NA	84,7	NA	NA	NA	NA	95,30	NA	Indikator baru	NA	NA	Indikator baru

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis menyajikan perkembangan kinerja indikator pembangunan sektor kehutanan dengan membandingkan realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 terhadap target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026 serta target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2029. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kemajuan (progress) pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan, sekaligus menilai konsistensi arah kebijakan jangka pendek dan menengah dalam mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pada tabel, sebagian besar indikator menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan, bahkan telah melampaui target akhir RPD 2026 dan menunjukkan capaian yang sangat baik menuju target RPJMD 2029. Hal tersebut terlihat pada indikator produktivitas kawasan hutan melalui peningkatan pembayaran PNBP, intensitas patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, penurunan laju deforestasi, serta rehabilitasi kawasan sempadan sungai. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi hutan sekaligus penguatan fungsi lindung dan ekologisnya.

Di sisi lain, beberapa indikator masih memerlukan penguatan dan percepatan untuk mencapai target jangka menengah dan jangka panjang, **khususnya pada indikator peningkatan kelas KUPS, perluasan akses legal perhutanan sosial, tutupan lahan pada sempadan sungai, serta pemenuhan layanan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.** Meskipun demikian, secara keseluruhan tingkat kemajuan kinerja menunjukkan tren positif dan memberikan keyakinan bahwa dengan penguatan strategi, sinergi lintas sektor, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan, target pembangunan kehutanan sebagaimana tertuang dalam RPD 2026 dan RPJMD 2029 dapat dicapai secara optimal.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RPD 2026	TARGET AKHIR RPJMD 2029	CAPAIAN 2025 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	99,37	109,98	81,36		135,18
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	171	261,00	82		318,29
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	36,75	28,84	15,76		183,01
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	130,08	512,44	20		2.562,20
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,22	0,17	0,14		121,43
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	165	209,00	200		104,50
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	95,45	93,07	100		93,07
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,80**		**20**	94,00
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91		0,33	275,76
		2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89		2,54	153,15

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KUNCI		REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RPD 2026	TARGET AKHIR RPJMD 2029	CAPAIAN 2025 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82		11	116,55
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63		7	66,14
		2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36		48,42	60,64
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,21		0,277	129,44
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,68		0,792	85,98
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092		3,092	100,00
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46		0,17	270,59
		2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	1,41		1,72	81,98
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07		100	93,07
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85/A	80,72		89	90,70

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang mendukung pembangunan Nasional dibidang kehutanan. Terdapat 5 (lima) outcome Prioritas Nasional kinerja K/L yang dilakukan pembahasan dengan Daerah. Merujuk pada Berita Acara Koordinasi teknis Perencanaan Bidang Kehutanan Tahun 2025 antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh realisasi sebagai berikut:

Berdasarkan perbandingan kinerja antara Provinsi Sumatera Selatan dan capaian nasional pada tahun 2025, terlihat variasi tingkat kontribusi dan pencapaian antar indikator outcome prioritas. Pada indikator Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial (KUPS), Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi mencapai Rp42,99 miliar atau 99,98% dari target provinsi, serta berkontribusi 2,38% terhadap realisasi nasional sebesar Rp1,805 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja provinsi relatif optimal dan sejalan dengan arah peningkatan kemandirian usaha KUPS secara nasional. Sebaliknya, pada indikator Nilai transaksi ekonomi KTH, meskipun realisasi nasional sangat tinggi dan jauh melampaui target, kinerja Provinsi Sumatera Selatan masih sangat rendah, dengan realisasi hanya Rp21,61 juta atau 0,86% dari target provinsi, serta kontribusi yang nyaris tidak signifikan terhadap capaian nasional. Pada outcome distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, Provinsi Sumatera Selatan merealisasikan 588,83 ha atau 23,55% dari target provinsi, dengan kontribusi 1,91% terhadap realisasi nasional, menunjukkan adanya kemajuan meskipun masih memerlukan percepatan.

Sementara itu, pada indikator-indikator rehabilitasi hutan dan lahan, baik secara vegetatif, rehabilitasi mangrove, maupun pembangunan sipil teknis, kinerja provinsi relatif masih rendah atau belum terealisasi optimal, bahkan pada beberapa indikator capaian nasional belum tersedia (NA). Pada Pembangunan mangrove, terdapat realisasi sebesar 7 ha meskipun pada awal perencanaan belum dianggarkan. Melalui dana transfer ke daerah (DBH DR) mangrove dapat dibangun mengingat program ini sangat strategis dampaknya bagi bentang alam di atasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kinerja nasional, Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga diperlukan penguatan perencanaan, dukungan anggaran, serta kolaborasi multipihak agar kontribusi provinsi terhadap target nasional dapat ditingkatkan pada periode berikutnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tingkat Nasional Tahun 2025

No.	Outcome Prioritas	Indikator Outcome Prioritas	Satuan	Tahun 2025				Realisasi Prov terhadap Target Prov	Realisasi Prov terhadap Realisasi Nasional
				Nasional		Provinsi Sumatera Selatan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah/ Kapita	1.500.000.000.000	1.805.125.515.512	43.000.000.000	42.991.224.445	99,98	2,38
2	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTH	Rupiah/ Kapita	700.000.000.000	3.403.080.725.667	2.500.000.000	21.610.800	0,86	0,00
3	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	1.000.000	30.843,65	2.500	588,83	23,55	1,91
4	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit	3.675	NA	11	0		
5	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Ha	210.000	NA	NA	19,625		
4	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	40.000	NA	500	9,6		
5	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Ha	16.000	NA	0	7		

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Kinerja Dinas Kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik, sebagaimana ditunjukan pada Tabel 3.6. Tercermin dari sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang melampaui target. Keberhasilan ini mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan hutan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, perlindungan sumber daya alam, serta penguatan peran sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan PNBP sektor kehutanan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan, yang didorong oleh meningkatnya produksi kayu pada pemegang PBPH, penyelesaian kewajiban PNBP oleh pemegang PPKH, serta percepatan pembayaran pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis.

Upaya pengurangan kerusakan hutan dan ekosistem menunjukkan hasil yang sangat signifikan, tercermin dari tingginya capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove serta peningkatan cakupan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan frekuensi patroli, efektivitas deteksi dini, respons cepat terhadap potensi gangguan, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor utama keberhasilan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan berperan penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi pendanaan dari berbagai sumber, tingginya komitmen dan partisipasi masyarakat, serta keberadaan kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). **Dukungan dokumen perencanaan, seperti RTnRL, menjadi pedoman penting dalam penentuan lokasi prioritas penanaman, sehingga pelaksanaan rehabilitasi lebih terarah dan efektif. Selain itu, kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH dan penguatan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan dan KPH turut mempercepat pencapaian target rehabilitasi.**

Dalam aspek pengembangan perhutanan sosial, capaian kinerja yang melampaui target mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kehutanan, mitra pembangunan, NGO, BUMN, dan sektor swasta.

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan telah meningkatkan kapasitas kelembagaan, kemandirian, serta daya saing Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Namun demikian, indikator peningkatan akses legal perhutanan sosial belum sepenuhnya mencapai target, yang disebabkan oleh proses persetujuan perhutanan sosial yang masih berlangsung di tingkat Kementerian Kehutanan dan diperkirakan akan selesai pada tahun berikutnya.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, tercermin dari tingginya laju pertumbuhan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya produksi kayu dan aktivitas ekonomi sektor kehutanan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang produktif, legal, dan berkelanjutan mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, kinerja perangkat daerah secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Beberapa kendala masih ditemui, terutama terkait koordinasi dan ketepatan waktu perencanaan yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan proses penganggaran. Selain itu, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keterbukaan informasi masih perlu dioptimalkan. Kondisi ini menjadi dasar bagi upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas layanan kinerja perangkat daerah pada periode berikutnya.

Secara rinci analisis keberhasilan masing-masing IKU dan IKK serta tindklanjut/solusi yang dilakukan sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
I. Pengelolaan Hutan							
1. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	77	109,98	141,94	Keberhasilan didorong oleh : 1. Pembinaan terhadap PBPH sehingga Produksi Kayu meningkat. 2. Koordinasi dengan PPKH Bendungan Tiga dihaji (BBWS) untuk menyelesaikan kewajibannya membayar PNBP. 3. Melakukan percepatan proses pembayaran pelepasan kawasan hutan Pelabuhan Tanjung Carat	
2. Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	61	258	422,95	Keberhasilan didorong adanya: 1. Peningkatan frekuensi patroli rutin dan patroli terpadu. 2. Peningkatan deteksi dini dan respons cepat. 3. Efektivitas koordinasi dalam penanganan temuan dan penegakan hukum. 4. Ketersediaan kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan patroli. 5. Pemanfaatan data patroli sebagai bahan evaluasi dan perencanaan 6. Tindak lanjut hasil patroli (pembinaan, peringatan, penegakan hukum)	

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
3. Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,61	1. Adanya perencanaan pencegahan Karhutla yang berbasis peta rawan. 2. Tersedianya dan kesiapan sumber daya manusia. 3. Terlaksananya patroli pencegahan secara rutin dan terpadu. 4. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. 5. Dukungan sarana dan prasarana pencegahan. 6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor terkait memperkuat pelaksanaan pencegahan Karhutla secara menyeluruh. 7. Penggunaan data hotspot, informasi cuaca, dan sistem pelaporan lapangan membantu memastikan kegiatan pencegahan dilakukan pada lokasi dan waktu yang tepat.	
4. Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5.124,40	1. Adanya program penanaman melalui sumber dana APBN, APBD, Pihak ke tiga dan Swadaya masyarakat. 2. Adanya komitmen masyarakat dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 3. Sudah terbentuknya kelompok masyarakat dalam upaya RHL. 4. Adanya Dokumen RTnRL sebagai panduan untuk menentukan lokasi prioritas penanaman.	

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
	1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43	Keberhasilan didorong adanya: 1. Kewajiban bagi pemegang PPKH untuk melakukan Rehabilitasi DAS. 2. Adanya surat teguran dari Kementrian Kehutanan terkait pemenuhan kawajiban penanaman rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH. 3. Adanya Program Rehabilitasi melalui sumber dana APBN. 4. Dinas Kehutanan dan KPH aktif memberikan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat hutan.	
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	175	209	119,43	Adanya kolaborasi dan koordinasi serta dukungan dari Kementerian Kehutanan, Mitra Pembangunan/ NGO, BUMN, dan Swasta untuk melaksanakan Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial	
6. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Keberhasilan didorong oleh profesionalitas kesekretariatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan	
II. Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	2	**Persentase tutupan lahan (%)**	**18,8**	**18,8**	**100,00**	Dinamika Perubahan tutupan lahan diukur dalam waktu 1 tahun maka data persentase tutupan lahan pertriwulan maupun perbulan belum dapat disajikan	
7. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,25	0,91	364,00	Keberhasilan didorong oleh jumlah produksi kayu meningkat dari tahun sebelumnya	
	2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	1,63	3,89	238,65	Keberhasilan didorong oleh jumlah produksi kayu meningkat dari tahun sebelumnya	

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
8. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	6	12,82	213,67	Fasilitasi pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) juga dilakukan Kementerian Kehutanan, Mitra Pembangunan/NGO, dan BUMN	
9. Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	3	4,63	154,33	Fasilitasi pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) juga dilakukan Kementerian Kehutanan, Mitra Pembangunan/NGO, dan BUMN	
	2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	39,1	29,36	75,09	Pencapaian dibawah target disebabkan oleh Pengajuan Persetujuan Perhutanan Sosial masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Kehutanan, hal ini dimungkinkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial terbit di tahun 2026.	Koordinasi secara intens dengan Kementerian Kehutanan
10. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	0,408	0,214	190,65	Hasil data yang dikumpulkan dari analisa tutupan lahan 2024.	
	2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	0,568	0,681	119,89	Belum didapat perhitungan realisasi atau sumberdata indeks	Koordinasi Kementerian Kehutanan ke
	2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	3,092	3,092	100,00	Belum didapat perhitungan realisasi atau sumberdata indeks	Koordinasi Kementerian Kehutanan

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2		3	4	5	6	7
11. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	0,13	0,46	353,85	Keberhasilan didorong : 1. Adanya program penanaman melalui sumber dana APBN, APBD, Pihak ke tiga dan Swadaya masyarakat. 2. Adanya komitmen masyarakat dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 3. Sudah terbentuknya kelompok masyarakat dalam upaya RHL. 4. Adanya Dokumen RTnRL sebagai panduan untuk menentukan lokasi prioritas penanaman.	
	2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	1,68	2,56	152,38	Keberhasilan didorong : 1. Adanya Kewajiban bagi pemegang PPKH untuk melakukan Rehabilitasi DAS. 2. Adanya surat teguran dari Kementrian Kehutanan terkait pemenuhan kawajiban penanaman rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH. 3. Adanya Program Rehabilitasi melalui sumber dana APBN. 4. Dinas Kehutanan dan KPH aktif memberikan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat hutan.	
12. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	93,07	93,07	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena koordinasi yang belum optimal dan tata waktu kegiatan pada tataran perencanaan kurang tepat terkait dengan proses penganggaran.	
	2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	85	80,72	94,96	Implementasi keterbukaan informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimalnya	

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam kebehasilan capaian kinerja. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD menjadi kekuatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya berupa dana yang cukup akan dapat mendukung pelaksaan program dan kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.8. Analisa efisiensi sumberdaya berhubungan dengan Tabel 3.9 dimana satu Program/Kegiatan dapat menunjang beberapa sasaran dan indikator.

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif baik. Secara umum, realisasi anggaran pada hampir seluruh indikator kinerja berada di bawah pagu yang ditetapkan, sementara capaian kinerja sebagian besar telah mencapai lebih dari 90 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan output dan outcome yang diharapkan tanpa harus menyerap seluruh anggaran, sehingga prinsip efisiensi dan value for money telah diterapkan dalam pengelolaan sumber daya.

Pada tujuan Pengelolaan Hutan Secara Lestari, efisiensi penggunaan anggaran terlihat pada sasaran peningkatan produktivitas kawasan hutan dan pengurangan kerusakan hutan. Capaian pembayaran PNBP serta pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan mangrove berada pada kategori cukup efisien, yang menunjukkan bahwa kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara optimal dengan pengendalian biaya yang baik. Sementara itu, kegiatan rehabilitasi dan penanaman lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, menandakan bahwa intervensi rehabilitasi yang dilakukan telah tepat sasaran dan mampu memberikan dampak ekologis yang signifikan dengan pemanfaatan anggaran yang relatif hemat.

Efisiensi yang menonjol juga terlihat pada sasaran peningkatan usaha ekonomi perhutanan sosial dan penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Meskipun capaian indikator belum sepenuhnya maksimal, nilai efisiensi berada pada kategori sangat efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendampingan,

kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan kinerja yang berarti dengan keterbatasan anggaran, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif.

Pada tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan, pengelolaan sumber daya juga menunjukkan kinerja yang efisien. Capaian indikator tutupan lahan, pengendalian deforestasi, kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, serta indeks pengelolaan keanekaragaman hayati berada pada kategori efisien hingga cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian outcome strategis berupa terjaganya fungsi hutan dan meningkatnya peran sektor kehutanan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan telah berjalan secara optimal dan proporsional antara besaran anggaran dengan capaian kinerja. Efisiensi tertinggi dicapai pada kegiatan rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat, sementara kegiatan pelayanan dan tata kelola organisasi menunjukkan efisiensi yang stabil. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dapat dinilai telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif serta berkelanjutan, dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		
							EFISIENSI (%)	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI
1	**2**	**3**		4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Hutan Secara Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rp)	5.897.020.000	5.735.995.610	97,27	2,73	56,83	Cukup Efisien
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	2.101.396.000	2.056.865.108	97,88	2,12	55,30	Cukup Efisien
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)						
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	1.525.922.500	1.304.488.265	85,49	14,51	86,28	Sangat Efisien
		1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	900.000.000	878.758.340	97,64	2,36	55,90	Cukup Efisien
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	2.549.543.300	1.858.180.986	72,88	27,12	117,79	Sangat Efisien
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	58.796.152.406	54.722.348.316	93,07	6,93	67,32	Efisien
Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan		**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	72.218.050.306	66.518.299.973	92,11	7,89	69,73	Efisien
	Meningkatnya Kontribusi Sektor	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5.897.020.000	5.735.995.610	97,27	2,73	56,83	Cukup Efisien

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		
							EFISIENSI (%)	NILAI EFISIENSI (%)	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)						
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	2.549.543.300	1.858.180.986	73	27	118	Sangat Efisien
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)						
		2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)						
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	72.218.050.306	66.518.299.973	92,11	7,89	69,73	Efisien
		2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	70.200.000	65.330.539	93	7	67	Efisien
		2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)						
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	2.425.922.500	2.183.246.605	90,00	10,00	75,01	Sangat Efisien
		2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)						
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	58.796.152.406	54.722.348.316	93,07	6,93	67,32	Efisien
		2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)						

Pada tataran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dari total anggaran sebesar Rp72.218.050.306,00, realisasi mencapai Rp66.518.299.973,00 atau 92,11 persen, dengan tingkat efisiensi sebesar 7,89 persen dan nilai efisiensi 69,73 persen yang masuk dalam kategori Efisien. Capaian ini mengindikasikan bahwa sasaran dan indikator kinerja dapat diraih secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang terukur dan terkendali.

Program Pengelolaan Hutan sebagai program utama menunjukkan kinerja efisiensi yang Sangat Efisien, di mana berbagai kegiatan strategis seperti perencanaan KPH, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pembinaan pemanfaatan hasil hutan mampu mencapai bahkan melampaui target indikator kinerja dengan realisasi anggaran di bawah pagu. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome), sekaligus mendukung keberlanjutan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan.

Program pendukung lainnya, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan, serta Program Pengelolaan DAS, secara umum berada pada kategori Efisien hingga Sangat Efisien. Efisiensi ini menunjukkan bahwa belanja administrasi, pemberdayaan masyarakat, konservasi ekosistem, dan pengelolaan DAS telah dilaksanakan secara proporsional dan sinergis dalam mendukung tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya yang efisien tidak hanya menjaga akuntabilitas anggaran, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan.

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI**					**58.796.152.406,00**	**54.722.348.316,00**	**93,07**	**6,93**	**67,32**	**Efisien**
	i	Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				235.000.000,00	205.943.435,00	87,64	12,36	80,91	Sangat Efisien
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	100.000.000,00	88.865.654,00	88,87	11,13	77,84	Sangat Efisien
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	13	130	135.000.000,00	117.077.781,00	86,72	13,28	83,19	Sangat Efisien
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				51.696.842.665,00	48.582.643.053,00	93,98	6,02	65,06	Efisien
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	581	522	89,85	51.296.882.665,00	48.241.396.782,00	94,04	5,96	64,89	Efisien
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	100	279.960.000,00	221.560.000,00	79,14	20,86	102,15	Sangat Efisien
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8	8	100	120.000.000,00	119.686.271,00	99,74	0,26	50,65	Cukup Efisien
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000.000,00	54.370.011,00	54,37	45,63	164,07	Sangat Efisien
	6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100	100.000.000,00	54.370.011,00	54,37	45,63	164,07	Sangat Efisien

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				139.400.000,00	19.999.500,00	14,35	85,65	264,13	Sangat Efisien
	7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100	25.000.000,00	19.999.500,00	80,00	20,00	100,01	Sangat Efisien
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	0	0	114.400.000,00	0,00				
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.579.015.463,00	2.212.364.385,00	85,78	14,22	85,54	Sangat Efisien
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100	60.000.000,00	49.715.391,00	82,86	17,14	92,85	Sangat Efisien
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100	1.194.515.463,00	1.050.265.687,00	87,92	12,08	80,19	Sangat Efisien
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100	60.000.000,00	59.779.962,00	99,63	0,37	50,92	Cukup Efisien
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	2	100	150.000.000,00	149.710.076,00	99,81	0,19	50,48	Cukup Efisien
	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	100	75.000.000,00	57.710.231,00	76,95	23,05	107,63	Sangat Efisien
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16	2	12,5	79.500.000,00	6.660.000,00	8,38	91,62	279,06	Sangat Efisien
	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100	100.000.000,00	78.043.602,00	78,04	21,96	104,89	Sangat Efisien
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	140	100	700.000.000,00	600.715.749,00	85,82	14,18	85,46	Sangat Efisien

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	100	160.000.000,00	159.763.687,00	99,85	0,15	50,37	Cukup Efisien
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	50,00	Cukup Efisien
	18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	50,00	Cukup Efisien
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.180.894.278,00	2.875.025.312,00	90,38	9,62	74,04	Sangat Efisien
	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	20.000.000,00	14.823.500,00	74,12	25,88	114,71	Sangat Efisien
	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	584.634.278,00	498.281.812,00	85,23	14,77	86,93	Sangat Efisien
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	2.576.260.000,00	2.361.920.000,00	91,68	8,32	70,80	Sangat Efisien
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				830.000.000,00	737.002.620,00	88,80	11,20	78,01	Sangat Efisien
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22	22	100	680.000.000,00	626.565.620,00	92,14	7,86	69,64	Efisien
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	50	100	150.000.000,00	110.437.000,00	73,62	26,38	115,94	Sangat Efisien

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	-	-	0,00	0,00				
II	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**					**10.774.832.000,00**	**9.845.446.245,00**	**91,37**	**8,63**	**71,56**	**Sangat Efisien**
	i	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				5.309.750.000,00	5.270.816.372,00	99,27	0,73	51,83	Cukup Efisien
	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	2	5	250	5.309.750.000,00	5.270.816.372,00	99,27	0,73	51,83	Cukup Efisien
	ii	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				280.000.000,00	168.971.707,00	60,35	39,65	149,13	Sangat Efisien
	26	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	4	4	100	280.000.000,00	168.971.707,00	60,35	39,65	149,13	Sangat Efisien
	iii	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				153.770.000,00	148.111.369,00	96,32	3,68	59,20	Cukup Efisien
	27	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	2	8	400	74.975.000,00	74.155.998,00	98,91	1,09	52,73	Cukup Efisien
	28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	2	4	200	78.795.000,00	73.955.371,00	93,86	6,14	65,36	Cukup Efisien

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	iv	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				2.796.616.000,00	2.077.529.188,00	74,29	25,71	114,28	Sangat Efisien
	29	Penyusunan Rencanan Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1	1	100	200.000.000,00	184.989.741,00	92,49	7,51	68,76	Cukup Efisien
	30	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	26	29,225	112,40	1.005.722.500,00	923.679.607,00	91,84	8,16	70,39	Sangat Efisien
	31	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	150	236	157,33	900.000.000,00	878.758.340,00	97,64	2,36	55,90	Cukup Efisien
	32	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	7	7	100	200.000.000,00	90.101.500,00	45,05	54,95	187,37	Sangat Efisien
	33	Pembangunan Sumur Resapan	5	0	0	37.268.000,00	0,00				
	34	Pembangunan Gully Plug	6	0	0	66.404.800,00	0,00				
	35	Pembangunan Dam	6	0	0	387.220.700,00	0,00				
	v	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				2.031.196.000,00	1.991.534.569,00	98,05	1,95	54,88	Cukup Efisien
	36	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	200	253	126,5	350.000.000,00	329.460.763,00	94,13	5,87	64,67	Cukup Efisien
	37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	15	UPTD KPH : 422 Laporan dan Dinas: 47 Laporan	100	1.681.196.000,00	1.662.073.806,00	98,86	1,14	52,84	Cukup Efisien

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	vi	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m3/Tahun				153.500.000,00	148.096.162,00	96,48	3,52	58,80	Cukup Efisien
	38	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangnan provinsi	15	18	120	153.500.000,00	148.096.162,00	96,48	3,52	58,80	Cukup Efisien
	vii	Perbenihan Tanaman Hutan				50.000.000,00	40.386.878,00	80,77	19,23	98,07	Sangat Efisien
	39	Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit	2	3	150	50.000.000,00	40.386.878,00	80,77	19,23	98,07	Sangat Efisien
III	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**					**70.200.000,00**	**65.330.539,00**	**93,06**	**6,94**	**67,34**	**Efisien**
	i	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				70.200.000,00	65.330.539,00	93,06	6,94	67,34	Efisien
	40	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	40	40	100	70.200.000,00	65.330.539,00	93,06	6,94	67,34	Efisien
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					2.549.543.300,00	1.858.180.986,00	72,88	27,12	117,79	Sangat Efisien

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	i	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				2.549.543.300,00	1.858.180.986,00	72,88	27,12	117,79	Sangat Efisien
	41	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	30	41	136,67	648.624.000,00	291.903.784,00	45,00	55,00	187,49	Sangat Efisien
	42	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	45	231 (12 AEP, 4 Sekolah Lapang, 215 KTH)	513,33	1.431.000.000,00	1.170.308.768,00	81,78	18,22	95,54	Sangat Efisien
	43	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5000	4706	94,12	469.919.300,00	395.968.434,00	84,26	15,74	89,34	Sangat Efisien
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**					**27.322.600,00**	**26.993.887,00**	**98,80**	**1,20**	**53,01**	**Cukup Efisien**
	i	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				27.322.600,00	26.993.887,00	98,80	1,20	53,01	Cukup Efisien
	44	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1	1	100	27.322.600,00	26.993.887,00	98,80	1,20	53,01	Cukup Efisien

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah : 5 Program, 18 Kegiatan, 44 Sub Kegiatan				**72.218.050.306,00**	**66.518.299.973,00**	**92,11**	**7,89**	**69,73**	**Efisien**

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Apabila melihat dari program dan kegiatan kehutanan yang telah dilaksanakan Dins Kehutanan, keberhasilan pencapaian IKU/IKK pada sesuai perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan efektif dan saling mendukung. Tingginya realisasi pembayaran PNBP sektor kehutanan menjadi bukti bahwa pengelolaan hutan produksi dilakukan secara terencana, legal, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Hutan melalui kegiatan pembinaan PBPH dalam pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, pembinaan/pengawasan PBPHH, pelaksanaan rencana tata hutan KPH, dan penyusunan rencana pengelolaan KPH (RPHJP dan RPHJPd) yang menjadi dasar seluruh pengelolaan hutan pada masing-masing wilayah KPH. Capaian tinggi pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan hutan telah berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas kawasan hutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian.

Upaya mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam, dan ekosistemnya menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan, tercermin dari tingginya capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove serta luas kawasan yang dilakukan pencegahan karhutla. Keberhasilan indikator tersebut ditunjang oleh kegiatan pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting, serta koordinasi dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antara program pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati telah memperkuat fungsi perlindungan hutan melalui peningkatan pengawasan, kesiapsiagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Dalam rangka pemulihan fungsi ekologis hutan dan lahan, capaian indikator rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi kawasan hutan menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, penyediaan perbenihan tanaman hutan, serta pengelolaan daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. Integrasi Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan DAS memastikan bahwa rehabilitasi dilakukan secara terarah, berbasis lanskap, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan

dapat menurunkan tingkat degradasi lahan, menurunkan luasan lahan kritis, sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat tercermin dari meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelompok perhutanan sosial, kelompok tani hutan (KTH), serta kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Capaian indikator ini ditunjang oleh Program Diklat, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelembagaan. Pendampingan yang dilakukan secara konsisten telah meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola usaha kehutanan secara produktif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pendampingan secara produktif dilakukan untuk penguatan kelembagaan KUPS melalui memberian bantuan alat ekonomi produktif. Diharapkan KUPS dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun demikian, capaian akses legal perhutanan sosial yang belum optimal menunjukkan bahwa keberhasilan program masih perlu didukung oleh percepatan proses perizinan di tingkat pusat.

Selanjutnya, pencapaian tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan yang digambarkan IKU persentase tutupan lahan berhutan wilayah Sumatera Selatan baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar untuk menilai kualitas daya dukung lingkungan terhadap kehidupan merupakan hasil dari keterpaduan antara program pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati, pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB, pengendalian deforestasi, peningkatan indeks keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi kawasan sempadan sungai menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lestari telah memberikan manfaat. Ke depan, **penguatan tata kelola, pemutakhiran data berbasis spasial, dan pengembangan kegiatan baru yang berbasis sains menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja** tersebut.

.Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6		7	8	9
I. Pengelolaan Hutan Secara Lestari								
Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Milyar Rp)	141,94	Program Pengelolaan Hutan				
				1	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase	250	Menunjang
				2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase	100	Menunjang
				3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase	400	Menunjang
				4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m3/Tahun	Persentase	120	Menunjang
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	422,95	Program Pengelolaan Hutan				
					Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase	126,5	Menunjang
				Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya				
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase	100	Menunjang
Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1.3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	236,61	Program Pengelolaan Hutan				
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase	100	Menunjang
Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	5124,4	Program Pengelolaan Hutan				
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase	52,7	Menunjang
					Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase	150	Menunjang
				Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)				

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6		7	8	9
					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase	100	Menunjang
	1.5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	121,428571	Program Pengelolaan Hutan				
					Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Persentase	157,33	Menunjang
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	119,43	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan				
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	93,07	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				1	Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	89,85	Menunjang
				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	Menunjang
				6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	Menunjang
				7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	Menunjang
				8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6	7	8	9
II. Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	**2**	**Persentase tutupan lahan (%)**	**100,00**	1. Pengelolaan Hutan, 2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das), 4. Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Data 2025 belum rilis, sehingga masih menggunakan data tahun sebelumnya
Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah	2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	364,00	Program Pengelolaan Hutan	Persentase	217,3	Menunjang
	2.2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	238,65	Program Pengelolaan Hutan	Persentase	217,3	Menunjang
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)	2.3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	213,67	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang
Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS	2.4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	154,33	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang
	2.5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	75,09	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase	248	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6	7	8	9
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan	2.6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%)	190,65	1. Pengelolaan Hutan, 2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das), 4. Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase		Menunjang, namun masih perlu kegiatan baru interpretasi peta tutupan lahan dari citra terbaru
	2.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	119,89	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase	**100**	Menunjang, namun masih perlu kegiatan baru pembinaan pengelolaan kehati yang dilakukan oleh Perizinan Berusaha
	2.8	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	100,00	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase	100	Menunjang, namun masih perlu kegiatan baru inventarisasi dan identifikasi kehati di HP dan HL
Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga	2.9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	338,46	1. Pengelolaan Hutan 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase	100,1	Menunjang
	2.10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	83,93	1. Pengelolaan Hutan 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase	100,1	Menunjang
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	2.11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	93,07	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	98,7	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA KUNCI		CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK
1	2		5	6	7	8	9
	2.12	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (angka dan huruf)	94,96	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	98,7	Menunjang

8. Analisis Pengarusutamaan Gender

Kebijakan Nasional terkait strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. PUG dalam pembangunan kehutanan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah.

Proporsi gender jumlah ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki–laki 346 orang (71%) dan pegawai perempuan 142 orang (21%). Kondisi dipahami mengingat karakteristik sektor kehutanan yang banyak menuntut pekerjaan teknis lapangan. Namun, tetap perlu dorongan peningkatan peran perempuan khususnya pada bidang administrasi, perencanaan, pengendalian dan pengelolaan program yang memerlukan perspektif gender.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan PUG (revitalisasi PUG) melalui Pelembagaan PUG dan Penyelenggaraan PUG, yang telah dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

Tabel 3.10 Pelembagaan dan Penyelenggaraan PUG

Pelembagaan PUG (3 Prasyarat) :	Penyelenggaraan PUG (7 Prasyarat) :
1. Kebijakan 2. SDM dan Internalisasi 3. Data Terpilah Gender	1. PUG dalam Perencanaan 2. PUG dalam Penganggaran 3. PUG dalam Pelaksanaan 4. PUG dalam Pemantauan 5. PUG dalam Evaluasi 6. PUG dalam Pengawasan 7. PUG dalam Pelaporan
1. Melakukan Internalisasi PUG di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD KPH melalui	1. Melakukan pendampingan dan Menyusun Gender *Analysis Pathway* (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk 5 Subkegiatan :

Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.2/2271/DISHUT.I/2025 2. Menetapkan *Focal Point* Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor 207/KPTS/IV/2025 yang beranggotakan 16 orang, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. 3. Menyusun Data Terpilah Gender; Proporsi gender jumlah ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki–laki 346 orang (71%) dan pegawai perempuan 142 orang (29%).	▪ Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi, ▪ Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara ▪ Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha Atau Kerjasama Pemanfaatan Di Kawasan Hutan Produksi ▪ Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ▪ Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 2. Integrasi Gender dalam Rensta Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 3. Melakukan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan PUG Tahun 2025

Untuk Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah mengintegrasikan kegiatan pembangunan kehutanan dengan pelibatan perempuan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11 Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2025

Nama Subkegiatan	**Nama Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Persentase keikutsertaan Laki-laki dan perempuan**		**Penjelasan Kegiatan**
			L (%)	**P(%)**	
1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1. Kegiatan sosialisasi interaksi negatif manusia dan satwa liar	Kelurahan Sidorejo, Kec. Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam	75	25	Meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan terkait konservati kehati dan mitigasi

Nama Subkegiatan	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase keikutsertaan Laki-laki dan perempuan		Penjelasan Kegiatan
			L (%)	P(%)	
					interaski negative manusia-satwa
		Desa Semangus Kec. Talang Ubi, Kab. Pali	65	35	
	2. Pelatihan Menembak		95	15	
	3. Sosialisasi Pencegahan Karhutlah	Des Sindang Laya Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas	83	17	
		Desa Suban Jeriji Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim	93	7	
		Desa Muara Merang KEc bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin	70	30	
		Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab Pali	70	30	
1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Ikut berpartisipasi aktif dalam Forum Perempuan Pengelola dan Penjaga Hutan di Provinsi Sumatera Selatan dalam Talkshow dengan tema Perempuan dan	Palembang	40	60	

Nama Subkegiatan	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase keikutsertaan Laki-laki dan perempuan		Penjelasan Kegiatan
			L (%)	P(%)	
	Generasi Muda Penjaga Hutan : Menguatkan Kelembagaan, Kepemimpinan, dan Sinergi Multipihak untuk Perhutanan Sosial yang Inklusif dan Responsif Gender di Sumatera Selatan				

Tabel 3.12 Kegiatan Responsif Gender yang dilaksanakan oleh UPTD KPH

No	UPTD KPH	Kegiatan	Lokasi	Persentase keikutsertaan laki-laki dan perempuan	
				Laki-laki (%)	Perempuan (%)
1	UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis bekerja sama dengan ICRAF dalam proyek Land For Life	1. Kegiatan pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan (terutama perempuan dan anak-anak) baik didalam dan disekitar kawasan hutan 2. Pembibitan tanaman berbasis pepohonan (buah buahan sih, ex duren, alpukat, lengkeng, mangga) dan dilakukan pelatihan perbanyakan tanaman secara vegetatif untuk menghasilkan tanaman unggul	Desa Mangsang, Kepayang, Suka Damai, Mendis Jaya, Muara Medak, dan Desa Muara Merang (SL 4 KPH Lalan Mendis).	60	40

No	UPTD KPH	Kegiatan	Lokasi	Persentase keikutsertaan laki-laki dan perempuan	
				Laki-laki (%)	Perempuan (%)
		(cangkok, stek, okulasi, sambung) 3. Kebun dapur komunal (untuk belajar bagaimana membuat dan mengelola kebun dapur, biasanya tanaman sayuran, yang harapannya bisa memenuhi kebutuhan dapur) 4. Pemanfaatan lahan secara optimal dan cerdas ilm bersama petani pelopor cerdas iklim dari tapak percontohan tiap desa (pendampingan praktik pertanian ramah lingkungan tanpa pupuk kimia, strategi pemasaran hasil pertanian, pengelolaan lahan berkelanjutan)			
2	UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding	Pendampingan Kelompok Usaha Wanita Bintang Ratu Produksi Kukis Buah Nipah dan Abon Bandeng	Kab OKI	20	80
3	UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji	Pendampingan KUPS Sejahtera Bunda membuat produk olahan siap jual yaitu Tiwul	KTH Jaya Makmur Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan KOmering Ilir		100
4	UPTD KPH VIII Semendo	Meningkatkan Akes Perempuan Terhadap Lahan melalui Program Perhutanan Sosial dan Meningkatkan Kewirausahaan Sosial	Wilayah KPH Wilayah VIII Semendo	10	90

No	UPTD KPH	Kegiatan	Lokasi	Persentase keikutsertaan laki-laki dan perempuan	
				Laki-laki (%)	Perempuan (%)
		pada Komoditas Wanatani berkelanjutan melalui kerjasama dengan NGO Pilar Nusantara berupa Pendampingan dan pembentukan KUPS Perempuan dan Penjaga Hutan Wanita (Woman Forest Defender) dengan rincian sebagai berikut :Pendampingan KUPS Perempuan Pandan Indah, KUPS Perempuan Muara Jaya, KUPS Perempuan Beringin Jaya, KUPS Perempuan Anak Belai, KUPS Perempuan Sepakat, KUPS Perempuan Sepakat Indah, KUPS Perempuan Talang Muare, KUPS Perempuan Talang Muare, KUPS Perempuan Jaya Bersama, KUPS Perempuan Talang Kawe, Penjaga Hutan Wanita (Woman Forest Defender) Hutan Desa Kota Padang, Penjaga Hutan Wanita (Woman Forest Defender) Hutan Desa Tanjung Agung, Penjaga Hutan Wanita (Woman Forest Defender) Hutan Desa Adat Aek Bigha Puyang Sure, Penjaga Hutan Wanita (Woman Forest Defender) Hutan Desa Tenam Bungkuk			

No	UPTD KPH	Kegiatan	Lokasi	Persentase keikutsertaan laki-laki dan perempuan	
				Laki-laki (%)	Perempuan (%)
5	UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah	1. Pelatihan pembuatan sabun berbahan dasar kopi, 2. Pelatihan budidaya kambing PE, 3. Sosialisasi dan Pelatihan DWP Cabang UPTD KPH Wil. XI Kikim Pasemah	Kab. Lahat	40	60

Berikut Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender :

1. Partisipasi dalam Talkshow dengan tema Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan : Menguatkan Kelembagaan, Kepemimpinan, dan Sinergi Multipihak untuk Perhutanan Sosial yang Inklusif dan Responsif Gender di Sumatera Selatan :

Gambar 3.1 Seremonial kegiatan HMPI di Desa Batumarta X Pelatihan dan Pembuatan Pakan Ternak (Magot)

2. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan :

Gambar 3.2 Sosialisasi Pencegahan Karhutlah

3. Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) :

Gambar 3.3 Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)

4. Kegiatan Pembelajaran Pertanian Cerdas Iklim dan contoh Kebun Belajar Tingkat UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis

Gambar 3.4 Kegiatan Pembelajaran Pertanian Cerdas Iklim dan contoh Kebun Belajar

5. Kegiatan Patroli Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat UPTD KPH

Gambar 3.5 Kegiatan Patroli Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat UPTD KPH

6. Pembinaan dan / Atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Tingkat KPH Wilayah V Lempuing-Mesuji Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI

Gambar 3.6 Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

7. Pendampingan dan pembentukan KUPS Perempuan dan Penjaga Hutan Wanita (*Woman Forest Defender*)

Gambar 3.7 Pendampingan dan pembentukan KUPS Perempuan dan Penjaga Hutan Wanita

B. Realisasi Anggaran

Dari realisasi anggaran Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan selaras dengan target kinerja yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dari total pagu anggaran sebesar Rp72.218.050.306,00, telah direalisasikan sebesar Rp66.518.299.973,00 atau mencapai 92,11 persen. Tingkat penyerapan ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta output dan outcome yang telah direncanakan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, alokasi anggaran sebesar Rp58.796.152.406,00 terealisasi Rp54.722.348.316,00 atau 93,07 persen. Realisasi ini mendukung kelancaran fungsi manajerial dan tata kelola pemerintahan, terutama melalui administrasi keuangan, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi umum, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan. Capaian yang tinggi pada komponen gaji dan tunjangan ASN serta pelaporan keuangan menunjukkan konsistensi dalam menjaga stabilitas operasional organisasi. Sementara itu, terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi rendah, seperti pendidikan dan pelatihan pegawai serta pengelolaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan dan kebijakan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Program Pengelolaan Hutan memiliki pagu anggaran Rp10.774.832.000,00 dengan realisasi Rp9.845.446.245,00 atau 91,37 persen. Anggaran ini secara langsung digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja sektor kehutanan, khususnya dalam pengelolaan KPH, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, pemanfaatan hasil hutan, serta perbenihan tanaman hutan. Tingginya realisasi pada kegiatan koordinasi perubahan fungsi kawasan hutan, perlindungan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan fokus anggaran pada kegiatan strategis yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya hutan. Adapun realisasi yang relatif rendah pada beberapa sub kegiatan rehabilitasi fisik, seperti pembangunan sumur resapan, gully plug, dan dam, dipengaruhi oleh kendala teknis dan penyesuaian pelaksanaan di lapangan.

Pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, anggaran sebesar Rp70.200.000,00 direalisasikan Rp65.330.539,00 atau 93,06 persen. Realisasi ini mendukung penguatan kapasitas dan pemberdayaan

masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting, yang berkontribusi pada upaya konservasi berbasis masyarakat serta perlindungan kawasan penyangga ekosistem penting di tingkat provinsi.

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan memiliki pagu Rp2.549.543.300,00 dengan realisasi Rp1.858.180.986,00 atau 72,88 persen. Anggaran ini digunakan untuk peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan, penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, serta penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial. Meskipun secara umum mendukung pencapaian kinerja pemberdayaan masyarakat, realisasi yang belum optimal terutama pada kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh menunjukkan adanya penyesuaian metode pelaksanaan dan keterbatasan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Sementara itu, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik dengan pagu Rp27.322.600,00 dan realisasi Rp26.993.887,00 atau 98,80 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk peningkatan koordinasi dan sinkronisasi optimalisasi fungsi serta daya dukung wilayah DAS, yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya air dan keberlanjutan lingkungan.

Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2025

No	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**		**Anggaran**		
			Anggaran (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Capaian (%)**
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI		58.796.152.406,00	54.722.348.316,00	93,07
	i	Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.000.000,00	205.943.435,00	87,64
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	88.865.654,00	88,87
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	135.000.000,00	117.077.781,00	86,72
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.696.842.665,00	48.582.643.053,00	93,98
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.296.882.665,00	48.241.396.782,00	94,04
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	279.960.000,00	221.560.000,00	79,14

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	120.000.000,00	119.686.271,00	99,74
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000,00	54.370.011,00	**54,37**
	6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	54.370.011,00	**54,37**
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.400.000,00	19.999.500,00	**14,35**
	7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	19.999.500,00	80,00
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	114.400.000,00	0,00	
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.579.015.463,00	2.212.364.385,00	85,78
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	49.715.391,00	82,86
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.194.515.463,00	1.050.265.687,00	87,92
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	59.779.962,00	99,63
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	149.710.076,00	99,81
	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	57.710.231,00	76,95
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.500.000,00	6.660.000,00	**8,38**
	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	78.043.602,00	78,04
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000,00	600.715.749,00	85,82
	17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	160.000.000,00	159.763.687,00	99,85
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.180.894.278,00	2.875.025.312,00	90,38
	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	14.823.500,00	74,12
	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	584.634.278,00	498.281.812,00	85,23

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5
	21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.576.260.000,00	2.361.920.000,00	91,68
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	830.000.000,00	737.002.620,00	88,80
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	680.000.000,00	626.565.620,00	92,14
	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	110.437.000,00	73,62
	24	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0,00	0,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		10.774.832.000,00	9.845.446.245,00	91,37
	i	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	5.309.750.000,00	5.270.816.372,00	99,27
	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	5.309.750.000,00	5.270.816.372,00	99,27
	ii	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	280.000.000,00	168.971.707,00	**60,35**
	26	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	280.000.000,00	168.971.707,00	60,35
	iii	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	153.770.000,00	148.111.369,00	96,32
	27	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	74.975.000,00	74.155.998,00	98,91
	28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	78.795.000,00	73.955.371,00	93,86
	iv	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.796.616.000,00	2.077.529.188,00	74,29
	29	Penyusunan Rencanan Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	200.000.000,00	184.989.741,00	92,49
	30	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.005.722.500,00	923.679.607,00	91,84
	31	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	900.000.000,00	878.758.340,00	97,64
	32	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	200.000.000,00	90.101.500,00	**45,05**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5
	33	Pembangunan Sumur Resapan	37.268.000,00	0,00	
	34	Pembangunan Gully Plug	66.404.800,00	0,00	
	35	Pembangunan Dam	387.220.700,00	0,00	
	v	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.031.196.000,00	1.991.534.569,00	98,05
	36	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	350.000.000,00	329.460.763,00	94,13
	37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.681.196.000,00	1.662.073.806,00	98,86
	vi	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m3/Tahun	153.500.000,00	148.096.162,00	96,48
	38	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangnan provinsi	153.500.000,00	148.096.162,00	96,48
	vii	Perbenihan Tanaman Hutan	50.000.000,00	40.386.878,00	80,77
	39	Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit	50.000.000,00	40.386.878,00	80,77
III	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		70.200.000,00	65.330.539,00	93,06
	i	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	70.200.000,00	65.330.539,00	93,06
	40	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	70.200.000,00	65.330.539,00	93,06
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		2.549.543.300,00	1.858.180.986,00	72,88
	i	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.549.543.300,00	1.858.180.986,00	72,88
	41	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	648.624.000,00	291.903.784,00	**45,00**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5
	42	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.431.000.000,00	1.170.308.768,00	81,78
	43	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	469.919.300,00	395.968.434,00	84,26
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		27.322.600,00	26.993.887,00	98,80
	i	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.322.600,00	26.993.887,00	98,80
	44	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	27.322.600,00	26.993.887,00	98,80
		Jumlah : 5 Program, 18 Kegiatan, 44 Sub Kegiatan	**72.218.050.306,00**	**66.518.299.973,00**	**92,11**

Beberapa capaian realisasi keuangan sub kegiatan yang menunjang program cukup rendah disebabkan adanya kendala teknis atau pun tata waktu. Sub kegiatan yang capaian keuangannya cukup rendah dimaksud yaitu :

Tabel 3.14 Kendala Kegiatan Tahun 2025

No.	Program	Sub Kegiatan	Kendala
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daearah Provinsi	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	a. Kegiatan Pengamanan BMD tahun 2025 difokuskan pada penertiban dan pengajuan penerbitan sertipikat tanah, b. Alokasi peserta Diklat Kepemimpinan dari LAN -RI dan BP2SDM belum ada c. Keterbatasan ketersediaan bahan bacaan penyuluh dan terkendala dalam proses tata waktu pengadaan

2	Pengelolaan Hutan	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan b. Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan c. Pembangunan Sumur Resapan d. Pembangunan Gully Plug e. Pembangunan Dam	a. Dokumen RPHJP telah selesai, namun terdapat 2 KPH dari 4 KPH target yang belum menyelesaikan ekspos di Kemenhut sebagai tahapan proses penetapan RPHJP. b. Keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga yang terlaksana hanya penanaman mangrove sedangkan pemeliharaan tidak terlaksana. c. Pembangunan sumur resapan, gully plug dan Dam penahan ditunda pembangunannya dikarenakan RKP DBH Sawit Perubahan Tahun 2025 belum dibahas oleh Kemenkeu
3.	Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terdapat kegiatan pembangunan unit percontohan penyuluh kehutanan yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan tata waktu.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran telah digunakan secara proporsional dan terarah untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja. Tingkat penyerapan yang tinggi mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas belanja agar semakin berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan sektor kehutanan di tahun berikutnya.

C. Data Dukung Pencapaian Kinerja

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis yang ditetapkan dalan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya produktivitas kawasan hutan dapat dicapai dengan jumlah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai kewajibannya dapat dicapai dengan didukung oleh program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025

dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2025 yaitu Program Pengelolaan Hutan, dengan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi

   1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan pagu sebesar Rp. 5.309.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,27% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

   2.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pagu sebesar Rp. 280.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 60,35% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

   3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi pagu sebesar Rp. 74.975.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,91% dan realisasi fisik sebesar 95%

   3.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi pagu sebesar Rp.78.795.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 93,86% dan realisasi fisik sebesar 100%.

4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m3/Tahun

   4.1 Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi pagu sebesar Rp. 153.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 96,48% dan realisasi fisik sebesar 98%

Total pagu untuk mendukung sasaran 1 sebesar Rp. 5.897.020.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.735.995.610,- atau 89,77%. Adapun capaian kinerja indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)	77.484.874.860	109.981.335.177	141,94

Sumber Data : Pencapaian Kinerja Dishut Tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya produktivitas kawasan hutan dengan indikator jumlah pembayaran PNBP sesuai kewajibannya telah melebihi target indikator tahun 2025.

IKU 1.1. Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)

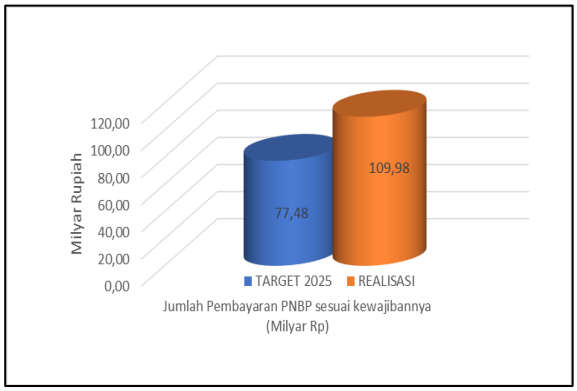

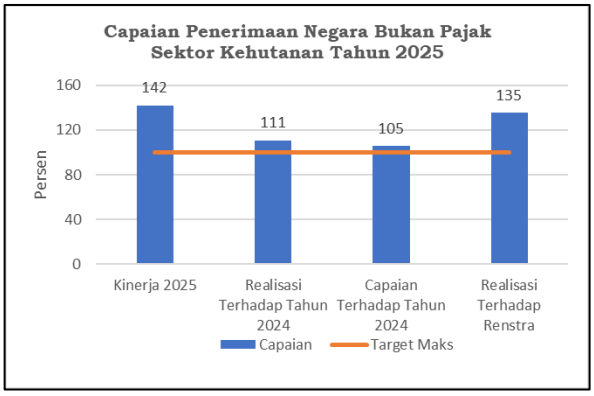

Gambar 3.8 Capaian PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2025

Berdasarkan diagram capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan tahun 2025, kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang ditetapkan. Secara persentase, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 142%, meningkat dibanding realisasi terhadap tahun 2024 sebesar 111% serta capaian terhadap tahun 2024 sebesar 105%, dan juga melampaui target Renstra dengan realisasi sebesar 135%. Sejalan dengan hal tersebut, dari sisi nominal penerimaan, target PNBP tahun 2025 sebesar Rp77,48 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp109,98 miliar, atau jauh di atas target yang ditetapkan.

Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban PNBP, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara di sektor kehutanan.

Data Dukung Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)

Tabel 3.16 Realisasi pembayaran PNBP Tahun 2025

NO	NO KODE	KABUPATEN /KOTA	REALISASI PNBP JANUARI-NOVEMBER TAHUN 2025				TOTAL PNBP TH. 2025 (JANUARI-NOVEMBER)	KETERANGAN
			PSDH	DR		IIUPH		
			(Rp)	(USD)	(RP)	(RP)	(RP)	
1	05.01	MUSI BANYUASIN	23.153.036.229,00	-	1.249.570.115,00	-	24.402.606.344,00	
2	05.02	OGAN KOMERING ULU	476.614.464,00	-	99.340.800,00	-	575.955.264,00	
3	05.03	MUARA ENIM	5.151.073.535,00	936,20	141.598.912,10	-	5.292.672.447,10	
4	05.04	LAHAT	2.435.405.196,00	-	-	-	2.435.405.196,00	
5	05.05	MUSI RAWAS	5.397.783.212,00	-	270.948.616,00	-	5.668.731.828,00	
6	05.06	OGAN KOMERING ILIR	47.805.384.386,00	-	-	-	47.805.384.386,00	
7	05.07	KOTA PALEMBANG	-	-	-	-	-	
8	05.08	KOTA PRABUMULIH	-	-	-	-	-	
9	05.09	KOTA LUBUK LINGGAU	-	-	-	-	-	
10	05.10	KOTA PAGAR ALAM	12.410.043,00	-	-	-	12.410.043,00	
11	05.11	BANYUASIN	4.056.097.752,00	-	-	-	4.056.097.752,00	
12	05.12	OGAN KOMERING ULU TIMUR	-	-	-	-	-	
13	05.13	OGAN KOMERING ULU SELATAN	941.300.226,00	-	4.374.376.198,00	-	5.315.676.424,00	
14	05.14	OGAN ILIR	-	-	-	-	-	
15	05.15	EMPAT LAWANG	-	-	-	-	-	
16	05.16	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	90.613.488,00	-	-	-	90.613.488,00	
17	05.17	MUSI RAWAS UTARA	26.956.040,00	-	69.436.416,00	-	96.392.456,00	
J U M L A H			**89.546.674.571,00**	**936,20**	**6.205.271.057,10**	**0,00**	**95.751.945.628,10**	

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data PNBP yang disajikan merupakan akumulasi realisasi penerimaan selama periode Januari sampai dengan November 2025, yang bersumber dari Register Biro Keuangan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, total realisasi PNBP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan November 2025 mencapai Rp95.751.945.628,10, yang terdiri dari:

1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp89.546.674.571,00 serta USD 936,20;
2. Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp6.205.271.057,10;
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) sebesar Rp0,00.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PNBP masih didominasi oleh komponen PSDH, yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kontribusi PNBP tidak berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar antara lain: Kabupaten Musi Banyuasin;Kabupaten Ogan Komering Ilir;Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu,

kabupaten/kota lainnya belum mencatatkan realisasi PNBP pada periode pelaporan, yang disebabkan oleh tidak adanya aktivitas pemanfaatan hutan atau kegiatan perizinan yang belum memasuki tahap kewajiban pembayaran.

Tabel 3.17 Realisasi pembayaran PNBP Perhutanan Sosial Tahun 2025

NO	UPTD KPH	REALISASI PNBP JANUARI-NOVEMBER TAHUN 2025			TOTAL PNBP TH. 2025 (JANUARI-NOVEMBER)	KETERANGAN
		PSDH	DR	IIUPH		
		(Rp)	(RP)	(RP)	(RP)	
1	UPTD KPH WILAYAH I MERANTI	-	-	-	-	-
2	UPTD KPH WILAYAH II LALAN MENDIS	-	-	-	-	-
3	UPTD KPH WILAYAH III PALEMBANG-BANYUASIN	-	-	-	-	-
4	UPTD KPH WILAYAH IV SUNGAI LUMPUR-RIDING	-	-	-	-	-
5	UPTD KPH WILAYAH V LEMPUING-MESUJI	70.312.250,00	-	-	70.312.250,00	-
6	UPTD KPH WILAYAH VI BUKIT NANTI - MARTAPURA	-	-	-	-	-
7	UPTD KPH WILAYAH VII MEKAKAU SAKA	16.949.940,00	-	-	16.949.940,00	-
8	UPTD KPH WILAYAH VIII SEMENDO	-	-	-	-	-
9	UPTD KPH WILAYAH IX SUBAN JERIJI	-	-	-	-	-
10	UPTD KPH WILAYAH X DEMPO	18.910.188,00	-	-	18.910.188,00	-
11	UPTD KPH WILAYAH XI KIKIM PASEMAH	3.604.755,00	-	-	3.604.755,00	-
12	UPTD KPH WILAYAH XII BENAKAT	-	-	-	-	-
13	UPTD KPH WILAYAH XIII LAKITAN-BUKIT COGONG	-	-	-	-	-
14	UPTD KPH WILAYAH XIV RAWAS	-	-	-	-	-
J U M L A H		**109.777.133,00**	**0,00**	**0,00**	**109.777.133,00**	

Realisasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perhutanan Sosial merupakan penerimaan negara yang bersumber dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh kelompok Perhutanan Sosial dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Data yang disajikan merupakan realisasi pembayaran PNBP Perhutanan Sosial Tahun 2025 berdasarkan KPH di Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam tabel data dukung.

Gambar 3.9 Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan pada PBPH

Sasaran 2. Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya

Tolak ukur capaian sasaran mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya diselesaikan sebagai berikut :

1. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)
2. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

Tabel 3.18 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	1.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)	61	261	427,87
		2.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	12,19	28,84	236,61

Sasaran Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya dapat diselesaikan telah mencapai target indikator tahun 2025. Target Rasio Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi), Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%) serta, Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi) telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Hutan

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
   1.1 Sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan pagu sebesar Rp. 350.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,13% dan realisasi fisik sebesar 100%
   1.2 Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pagu sebesar Rp. 1.681.196.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,86% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
   2.1 Sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi pagu sebesar Rp 70.200.000,- dengan realiasasi keuangan sebesar 93,06% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Total pagu untuk mendukung sasaran 2 sebesar Rp. 2.101.396.000,- dengan realisasi keuangan Rp.2.056.865.108,- atau 95,35% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

IKU 2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)

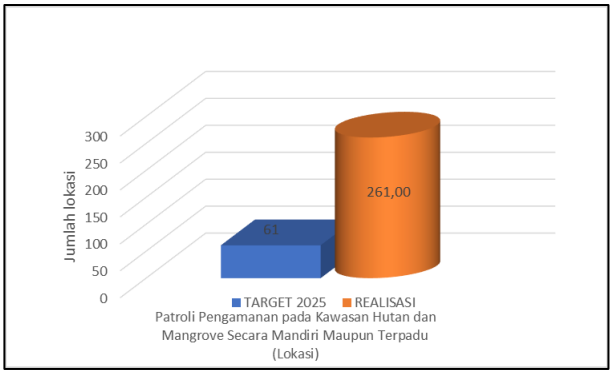

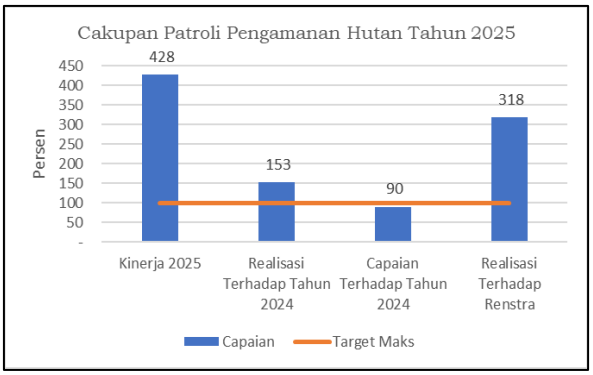

Gambar 3.10 Capaian Patroli Pengamanan Hutan dan Mangrove Tahun 2025

Data Dukung Capaian Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)

Aksi yang dilakukan untuk mencapai sasaran 2 Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya yaitu dengan Melakukan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan, diantaranya dilakukan oleh personil Polisi Hutan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan personil di 14 KPH di Sumatera Selatan.

Upaya mendukung IKU Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi) antara lain :

1. Adanya Pegawai yang bertugas melakukan patroli dan sosialisasi di wilayah UPTD KPH wilayah I – XIV sangat berperan dalam upaya melakukan patroli pada kawasan hutan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan.
2. Adanya pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan yang bertugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan melalui kegiatan Pre Emtif, Preventif, Represif dan Yustisif.

Tabel 3.19 Pelaksanaan patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan

No.	Nama KPH		Jumlah Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan		Lokasi Patroli Kawasan Hutan
1	2		3		4
1	UPTD KPH Wilayah I	Meranti	20	Lokasi	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Musi Rawas Utara
2	UPTD KPH Wilayah II	Lalan Mendis	19	Lokasi	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin
3	UPTD KPH Wilayah III	Palembang-Banyuasin	12	Lokasi	Kab. Banyuasin, Kab. Dan Musi Banyuasin,
4	UPTD KPH Wilayah IV	Sungai Lumpur	8	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ilir
5	UPTD KPH Wilayah V	Lempuing-Mesuji	7	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ilir
6	UPTD KPH Wilayah VI	Bukit Nanti Martapura	27	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ulu
7	UPTD KPH Wilayah VII	Mekakau Saka	25	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
8	UPTD KPH Wilayah VIII	Semendo	16	Lokasi	Kab. Muara Enim dan Kab. Lahat

No.	Nama KPH		Jumlah Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan		Lokasi Patroli Kawasan Hutan
1	2		3		4
9	UPTD KPH Wilayah IX	Suban Jeriji	28	Lokasi	Kab. Muara Enim dan Prabumulih
10	UPTD KPH Wilayah X	Dempo	18	Lokasi	Kab. Pagaralam
11	UPTD KPH Wilayah XI	Kikim Pasemah	16	Lokasi	Kab. Lahat
12	UPTD KPH Wilayah XII	Benakat	10	Lokasi	Kab. Muara Enim
13	UPTD KPH Wilayah XIII	Lakitan Bukit Cogong	46	Lokasi	Kota Lubuk Linggau
14	UPTD KPH Wilayah XIV	Rawas	6	Lokasi	Kab. Musi Rawas Utara

3. Selain patroli (preventif), Dinas Kehutanan melaksanakan kegiatan pembatasan kerusakan Kawasan hutan melalui penindakan dan atau penanganan konfilik kepentingan serta tindak pelanggaran terhadap kawasan hutan atas laporan dari masyarakat. Kegiatan penindakan bertujuan agar menimbulkan efek jera masyarakat. Kegiatan ini diantaranya :

   a) Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai konflik pelanggaran batas Kawasan hutan di Hutan Produksi (HP) Terusan Sialang UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji.

   b) Menindaklanjuti laporan terkait Pengamanan Hutan dan Lahan serta Pengumpulan Data dan Informasi terkait Aktivitas Ilegal Masyarakat dalam Areal Izin PBPH PT. Restorasi Hutan Sumatera di Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Gambar 3.11 Pengamanan Hutan dan Lahan

4. Kegiatan Sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Dusun 9 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis dan Desa Tanjung Agung Kec. Semendo Darat Ulu Kab.Muara Enim wilayah UPTD Wilayah VIII Semendo dengan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, BKSDA Sumsel dan KPH setempat. Mitigasi ini meminimalkan

korban akibat serangan satwa liar yang ada di wilayah ini seperti buaya senyulong dan harimau.

5. Kegiatan koordinasi mitigasi konflik gajah di wilayah kerja UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding di Kayu Agung. Memonitor aksi mitigasi konflik gajah bersama Pemeintah Kabupaten, dan BKSDA Sumsel seperti : pembangunan posko oleh BKSDA dan PT. Sinar Mas di Desa Banyu Biru Kecamatan Air Sugihan Kab. OKI, mendatangkan 2 gajah jinak untuk membantu menjinakkan gajah liar, dan Pembangunan Barier fisik maupun vegetasi.

Gambar 3.12 Koordinasi dan Sosialisasi mitigasi konflik manusia dan satwa liar dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA Sumsel dan PBPH

6. Koordinasi dalam rangka menyusun rencana mitigasi interaksi negatif manusia dan gajah di Desa SP V Tri Anggunjaya SP 5 HTI Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, UPTD KPH Wilayah XII Benakat. Mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kantong satwa liar agar melibatkan para pihak yang beraktifitas (PPKH, PBPH, Perkebunan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat). Mendesak para pihak untuk memfasilitasi pembentukan masyarakat desa mandiri pada desa-desa yang berada di dalam/sekitar home range gajah.

IKU 3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

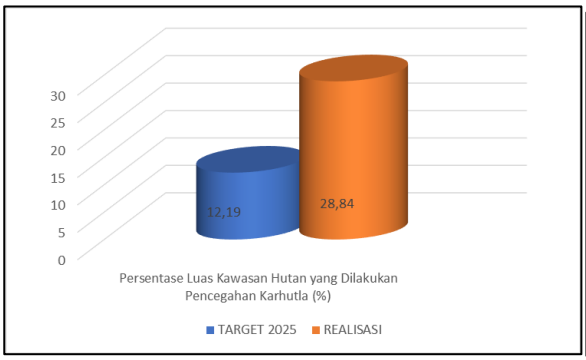

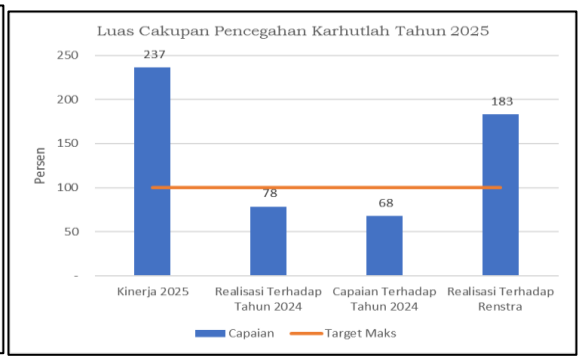

Gambar 3.13 Luas Cakupan Pencegahan Karhutlah Tahun 2025

Data Dukung Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

Tabel 3.20 Realisasi kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengamanan hutan (Untuk pengisian Aplikasi Aksi pembangunan Rendah karbon Bapennas)

Nama Kegiatan	Tanggal	Luas (Ha)	Lokasi Kegiatan			Koordinat		Fungsi Kawasan (APL, HL, HP, dsb)	Tutupan Lahan	Jenis Tanah (Mineral/ Gambut)
			Kabupaten	Kecamatan	Desa	LAT	LONG			
Patroli	10 s.d 12 Sept 2025	500	Ogan Komering Ilir	Pampangan	Jungkal	-3.219	105.0222	APL	Perkebunan	Gambut
Patroli	02 s.d 04 September 2025	500	Ogan Ilir	Indralaya Utara	Pulau Semambu	-3.168	104.6863	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	13 s.d 15 Agustus 2025	500	Banyuasin	Rambutan	Rambutan	-3.125	104.9107	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	08 s.d 10 Oktober 2025	500	Banyuasin	Rambutan	Sungai Pinang	-3.219	105.0222	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	24 s.d 26 November 2025	500	Ogan Ilir	Indralaya Utara	Sungai Rambutan	-3.121	104.6645	APL	Perkebunan Pertanaian	Mineral
Patroli	08 s.d 10 Oktober 2025	500	Ogan Komering Ilir	Sirah Pulau Padang	Sirah Pulau Padang	48645	9638438	APL	Perkebunan Pertanaian	Gambut
Patroli	01 s.d 03 Oktober 2025	500	Banyuasin	Tanjung Lago	Tanjung Lago	-2.730	104.70816	APL	Perkebunan Pertanaian	Gambut
Patroli	29 s.d 31 Oktober 2025	500	Muara Enim	Rambang Niru	Suban Jeriji	-3.564	103.2464	APL	Perkebunan	Mineral

Nama Kegiatan	Tanggal	Luas (Ha)	Lokasi Kegiatan			Koordinat		Fungsi Kawasan (APL, HL, HP, dsb)	Tutupan Lahan	Jenis Tanah (Mineral/ Gambut)
			Kabupaten	Kecamatan	Desa	LAT	LONG			
Patroli	01 s.d 03 Oktober 2025	500	Ogan Ilir	Pemulutan Barat	Arisan Jaya	-3.168	104.6863	APL	Perkebunan Pertanian	Mineral
Patroli	17 s.d 19 September 2025	500	Banyuasin	Muara Padang	Karang Anyar	-2.700	105.0683	APL	Perkebunan Pertanian	Mineral

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Upaya mendukung IKU Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla antara lain :

1) Personil Pegawai KPH bertugas diantaranya melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan di wilayah UPTD KPH wilayah I – XIV melalui ground check hotspot, sekaligus sosialisasi kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.
2) Pemantauan hotspot melalui Sistem Informasi Songket, penyebaran informasi melalui media sosial (WA dan Email)

Gambar 3.14 Patroli Kebakaran dan Pengamanan Hutan

3) Pembinaan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan pengendalian Karhutla dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 11 Perusahaan PBPH/HTI sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang diperoleh mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka Pengendalian Karhutla, oganisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla.
4) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 13 lokasi

Perusahaan PPKH Migas, Minerba dan Non tambang lainnya sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang diperoleh Mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka Pengendalian Karhutla, oganisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla.

Gambar 3.15 Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada PBPH dan PPKH

5) Kegiatan dalam rangka pengukuran areal bekas terbakar kebakaran hutan dan lahan di 1 lokasi terindikasi bekas terbakar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Lokasi: PBPH PT. Tripupa Jaya
6) Penyusunan Buku Statistik Hotspot Tahun 2025, sehingga diperolehnya informasi dan data sebaran jumlah hotspot tiap kabupaten, jenis kawasan, jenis tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan hutan.
7) Koordinasi dan konsultasi ke KLHK, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkait sinkronisasi data aplikasi SONGKET SUMSEL dengan data SIPONGI, dan wali data lainnya.

Sasaran 3. Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan

Tolak ukur capaian sasaran Mengurangi luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, diselesaikan sebagai berikut :

1. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha).

2. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%).

Tabel 3.21 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
III	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	1.	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	512,44	5.124,40
		2.	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,17	121,43

Tabel 3.22 Anggaran Bidang PDAS-RHL Tahun 2025 (APBD Perubahan)

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu (Rp)
1	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	26	1.005.722.500
2	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	150	900.000.000
3	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	7	200.000.000
4	Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang Terbangun	5	37.268.000
5	Pembangunan Gully Plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	6	66.404.800

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Pagu (Rp)
6	Pembangunan Dam	Jumlah Dam Penahan yang Terbangun	6	387.220.700
7	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	1	200.000.000
8	Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih atau BIbit yang beredar	2	50.000.000
9	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1	27.322.600

Berdasarkan Tabel di atas total pagu untuk mendukung sasaran 3 sebesar Rp. Rp. 2.873.938.600,- terbagi menjadi 2 sumber pendanaan yaitu Dana Bagi Hasil Sawit dan APBD. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah :

Program Pengelolaan Hutan

1. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perbenihan Tanaman Hutan, terdiri dari 8 Sub Kegiatan, yaitu:
   1.1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL pagu Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan 92,49% dan realisasi fisik 100%.
   1.2 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara pagu Rp. Rp1.005.722.500,- dengan realiasasi keuangan 91,84% dan realisasi fisik 100%.
   1.3 Pembangunan Sumur Resapan pagu Rp. 37.268.000,- dengan realisasi keuangan 0% dan realisasi fisik 0% tidak terlaksananya Sub Kegiatan ini dikarenakan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 didalam SIPD Sub Kegiatan ini di non aktifkan.
   1.4 Pembangunan Gully Plug pagu Rp. 66.404.800,- dengan realisasi keuangan 0% dan realisasi fisik 0% tidak terlaksananya Sub Kegiatan ini dikarenakan

pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 didalam SIPD Sub Kegiatan ini di non aktifkan.

1.5 Pembangunan Dam pagu Rp. 387.220.700,- dengan realisasi keuangan 0% dan realisasi fisik 0% tidak terlaksananya Sub Kegiatan ini dikarenakan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 didalam SIPD Sub Kegiatan ini di non aktifkan.

1.6 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan pagu Rp. 900.000.000,- dengan realisasi keuangan 97,64% dan realisasi fisik 100%.

1.7 Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan pagu Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan 45,05% dan realisasi fisik 100%.

1.8 Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit pagu Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan 80,77% dan realisasi fisik 100%

Program Pengelolaan Daerah Aliran Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan.

1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS pagu Rp. 27.322.600,- dengan realisasi keuangan 98,80% dan realisasi fisik 100%

Berdasarkan penjelasan di atas ada 3 Sub Kegiatan dari sasaran ini yang tidak tercapai nya realisasi pada Tahun 2025 yaitu Pembangunan Sumur Resapan, Pembangunan Gully Plug dan Pembangunan Dam.

IKU 4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)

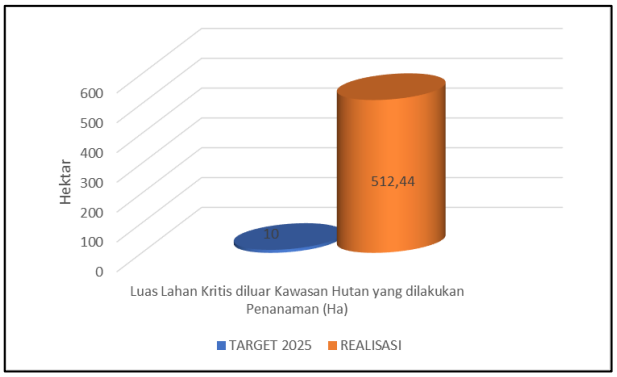

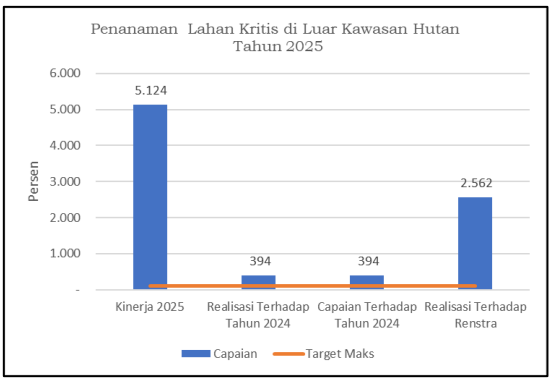

Gambar 3.16 Penanaman Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Tahun 2025

Luas lahan kritis yang dilakukan penanaman pada tahun 2025 sebesar 512,44 Ha, 51 kali lipat dari target. Terhadap capaian tahun lalu, meningkat 382%. Hal ini dikarenakan kegiatan penanaman menjadi fokus APBD Sumberdana DBH Sawit.

Data Dukung Capaian Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)

Sejalan dengan perkembangan waktu tekanan terhadap kawasan hutan semakin tinggi yang antara lain disebabkan oleh gangguan penebangan liar (Illegal Logging), perambahan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan. Selain itu dampak dari pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan teknik konservasi tanah dan air yang baik menyebabkan masih banyaknya lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan atas dasar Keputusan Dirjen PDASRH No: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, bahwa lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 seluas 707.169 Ha. Menurut pembagian kewenangan, rehabilitasi hutan seluas 472.519 Ha adalah kewenangan Pusat dan rehabilitasi lahan seluas 234.650 Ha kewenangan Daerah.

Tabel 3.23 Lahan Kritis dan Sangat Kritis Wilayah Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kekritisan Lahan						Jumlah Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Ha)
		Dalam Kawasan Hutan (ha)			Luar Kawasan Hutan (ha)			
		Kritis	Sangat Kritis	Total	Kritis	Sangat Kritis	Total	
1	Banyuasin	9.967,04		9.967,04	22,15		22,15	9.989,19
2	Empat Lawang	11.907,93	37.405,88	49.313,81	17.847,73	19.078,37	36.926,11	86.239,92
3	Kota Lubuk Linggau	5.025,08	847,08	5.872,16	1.939,05	76,43	2.015,48	7.887,64
4	Kota Pagar Alam	1.357,98	5.591,01	6.948,99	1.342,25	7.487,75	8.830,00	15.778,98
5	Kota Palembang			-			-	-
6	Kota Prabumulih			-			-	-
7	Lahat	31.879,94	20.928,33	52.808,27	16.760,78	17.793,47	34.554,25	87.362,51
8	Muara Enim	16.852,78	19.986,74	36.839,52	21.452,98	9.476,24	30.929,22	67.768,74
9	Musi Banyuasin	100.749,40		100.749,40	3.930,13		3.930,13	104.679,53
10	Musi Rawas	32.738,60	4.048,49	36.787,09	5.403,61	460,12	5.863,73	42.650,82
11	Musi Rawas Utara	18.782,64	1.646,70	20.429,35	6.075,43	251,80	6.327,23	26.756,58
12	Ogan Ilir			-			-	-
13	Ogan Komering Ilir	8.897,80		8.897,80	832,82		832,82	9.730,61
14	Ogan Komering Ulu	31.052,58	7.325,59	38.378,18	16.923,15	339,61	17.262,76	55.640,94
15	Ogan Komering Ulu Selatan	66.097,60	31.289,66	97.387,26	71.905,97	13.449,16	85.355,13	182.742,39
16	Ogan Komering Ulu Timur	2.507,84	612,41	3.120,25	1.801,00	0,00	1.801,00	4.921,25
17	Penukal Abab Lematang Ilir	5.019,67		5.019,67			-	5.019,67
J u m l a h		**342.837**	**129.682**	**472.519**	**166.237**	**68.413**	**234.650**	**707.168,78**

Sumberdata :

1. Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 skala 1:50.000

Peran penting Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan rehabilitasi lahan yang berkelanjutan di daerah, terutama di wilayah kerja dan wilayah kelola UPTD yang wilayahnya tersebar secara administratif di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan melalui program penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air (KTA) dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung DAS yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL).

Dalam rangka pemulihan lahan kritis di luar Kawasan hutan, pada tahun 2025 Dinas Kehutanan menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2025. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) adalah rencana yang disusun untuk melakukan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan. Rencana ini disusun pada tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelum kegiatan (T-1). Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) merupakan dokumen rencana rehabilitasi lahan yang akan dilaksanakan di luar Kawasan Hutan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) yang bersifat operasional. RTnRL Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS) Tahun 2022– 2032. Dokumen ini merupakan pedoman atau acuan dalam menentukan kegiatan Rehabilitasi Lahan Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai sumber pendanaan antara lain APBD Sumsel, APBN, Sektor Usaha serta penentuan lokasi yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) tahun 2025 adalah agar pelaksanaan rehabilitasi lahan dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan yang telah ditetapkan dalam RURHL-DAS dalam rangka pemulihan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi dan/atau pengembangan sumberdaya air.

Rehabilitasi Lahan Tahun 2025 wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan diluar kawasan hutan / Areal Penggunaan Lain (APL) pada ekosistem daratan, ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Kegiatan rehabilitasi lahan dapat berupa penerapan vegetatif maupun penerapan sipil teknis. Sasaran kegiatan rehabilitasi lahan melalui penerapan vegetatif di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berupa Kebun Bibit Rakyat, Penghijauan Lingkungan, Agroforestry, Rehabilitasi Lahan Mangrove, Rehabilitasi Lahan Gambut, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH di Luar Kawasan Hutan. Kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 melalui penerapan sipil teknis adalah teknik konservasi tanah dan air yang dilaksanakan dalam bentuk

pembuatan bangunan berupa Dam Penahan (DPn), Gully Plug (GP) dan Sumur Resapan Air (SRA).

Gambar 3.17 Dokumen RTnRL dan Penyusunan Dokumen RTnRL Tahun 2025

Dinas Kehutanan telah melaksanakan penanaman jenis-jenis Multipurpose Tree Species (MPTS) dan tanaman kayu-kayuan endemik Sumatera Selatan di luar Kawasan hutan seluas 512,44 ha diantaranya melalui : (1) Pembagian bibit kepada masyarakat yang dilaksanakan di 14 UPTD (2) Pembagian bibit kepada masyarakat/kelompok masyarakat. (3) Penanaman dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia HMPI. MPTS adalah tanaman yang memiliki banyak fungsi, seperti menghasilkan buah, kayu, daun, bunga, dan biji. Tanaman MPTS dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan makanan, pakan ternak, dan kayu bakar sehingga bermanfaat secara ekologi, ekonomi dan produksi bagi masyarakat.

Jumlah bibit yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 204.976 batang dengan luas konversi 400 batang/Ha berupa Tanaman Kehutanan, MPTS, dan Tanaman Buah. Sedangkan rincian lokasi penanaman sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24 Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Yang Direhabilitasi Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	UPTD KPH
1.	Palembang	Jakabaring	Jakabaring	0,33	UPTD KPH Wil. III Palembang - Banyuasin
		Seberang Ulu I	Kantor Kejati SumSel	0,51	
		Sako	Sukamaju		
		Alang-Alang Lebar	Talang Kelapo		
		Alang-Alang Lebar	Srijaya		
		Seberang Ulu I	Kantor Kejati SumSel	0,085	
		Ilir Barat	Lorok Pakjo		
		Jakabaring	Danau OPI	1,28	
		Ilir Barat I	Tanjung Barangan		
		Sukarame	Talang Kedondong	0,13	
		Seberang Ulu II	16 Ulu	1,25	
		Gandus	Buper Gandus (HMPI)	1	
Total				***4,59***	
2.	OKI	Tulung Selapan	SP. Tiga Sakti	0,21	UPTD KPH Wil. IV Sungai Lumpur - Riding
		Bumi Harjo Makmur	Lempuing	1	UPTD KPH Wil. V Lempuing - Mesuji
Total				***1,21***	
3.	OKU Timur	Martapura	Sungai Tuha	0,15	UPTD KPH Wil. VI Bukit Nanti - Martapura
		Martapura	Sungai Tuha	0,5	
		Madang Suku II	Margotani	0,23	
Total				***0,88***	
4.	OKU	Ulu Ogan		1,65	UPTD KPH Wil. VI Bukit Nanti - Martapura
		Sosoh Buay Rayap	Penyandingan	0,16	
		Lubuk Batang	Belatung	0,83	
		Ulu Ogan	Ulak Lebar	0,17	
Total				***2,81***	
5.	OKU Selatan	Muaradua	Kisau	25	UPTD KPH Wil. VII Bukit Mekakau - Saka
		Muaradua	Kisau	25	
		Buay Rawan	Bumi Jaya	300	
		Kisam Tinggi	Pulau Panggung		
		Muaradua Kisam	Ulak Agung Ulu		
		Muaradua	Pelangki		

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	UPTD KPH
		Buay Rawan	Bendi	11	
Total				***361***	
6.	Muara Enim	Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	2,5	UPTD KPH Wil. VIII Semendo
		Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	1,25	
		Semende Darat Ulu	Penyandingan	15	
		Semende Darat Laut	Penyandingan	49	
		Tanjung Agung	Pagar Dewa		
		Semende Darat Ulu	Cahaya Alam		
		Semende Darat Laut	Pulau Panggung	26,16	
		Ujan Mas	Ujan Mas Baru		
		Muara Enim	Muara Enim		
		Panang Enim	Lubuk Nipis		
		Gelumbang		0,24	UPTD KPH Wil. XII Benakat
Total				***94,15***	
7.	Prabumulih	Cambai	Pangkul	0,79	UPTD KPH Wil. IX Suban Jeriji
		Cambai	Pangkul	2,03	
		Cambai	Sindur		
Total				***2,82***	
8.	Lahat	Gumay Ulu	Sumber Karya	0,25	UPTD KPH Wil. XI Kikim - Pasemah
		Kikim Timur	Datar Serdang	0,18	
		Kikim Timur	Pantikal Lama		
		Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	0,38	
		Gumay Talang	Tanjung Beringin	0,25	
		Lahat	Bandar Jaya	0,25	
		Lahat Selatan	Tanjung Payang	0,2	
		Lahat	Bandar Jaya		
		Lahat	Pagar Agung	0,1	
		Tanjung Tebat	Air Dingin Lama	1,15	
		Mulak Ulu	Lesung Batu		
		Tebing Tinggi	Rantau Tenang	2,1	
		Jarai	Pelajaran	2,1	
		Merapi Barat	Ulak Pandan	2,1	
		Mulak Ulu	Lesung Batu	0,15	
Total				***9,21***	

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	UPTD KPH
9.	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Utara I	Tanjung Raya	0,55	UPTD KPH Wil. XIII Lakitan - Bukit Cogong
		Lubuk Linggau Utara I	Tanjung Raya	0,5	
		Lubuk Linggau Utara I	Belalau I	1	
Total				***2,05***	
10.	Musi Rawas Utara	Karang Jaya	Lubuk Kumbang	20,00	UPTD KPH Wil. XIV Rawas
		Karang Jaya	Batang empedu		
		Karang Jaya	Sukaraja		
		Karang Jaya	Sukaraja	4	
		Karang Jaya	Sukaraja	0,63	
Total				***24,63***	
11.	PALI	Penukal Utara	Tempirai	0,1	UPTD KPH Wil. XII Benakat
Total				***0,1***	
12.	Pagar Alam	Dempo Selatan	Lubuk Buntak	1	UPTD KPH Wil. X Dempo
Total				***1***	
13.	Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Mendis Jaya	1	UPTD KPH Wil. II Lalan-Mendis
Total				***1***	
14.	Banyuasin	Banyuasin II	Sungsang IV	7	UPTD KPH Wil. III Palembang - Banyuasin
Total				***7***	
Grand Total				***512,44***	

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Bidang RHL Tahun 2025

Gambar 3.18 Kegiatan Penyediaan Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah di UPTD KPH

Gambar 3.19 Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan

IKU 5. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)

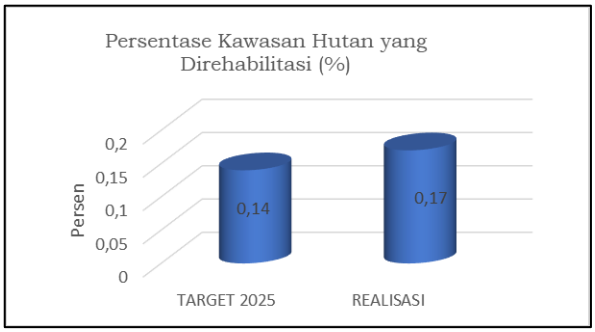

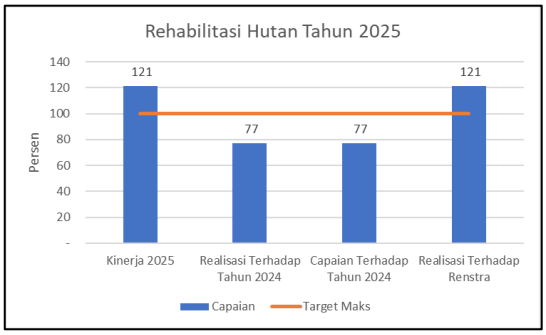

Gambar 3.20 Rehabilitasi Hutan Tahun 2025

Luas lahan kritis yang direhabilitasi Tahun 2025 indikator ini terealisasi sebesar 0,17%, yang diperoleh dari luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan yang direhabilitasi seluas 2.676 Ha dibagi dengan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan seluas 707.169 Ha, melebihi target yang ditetapkan sebesar

0,14% sehingga capaiannya sebesar 121%. Realisasi terhadap tahun lalu mencapai 77,27 % dengan Tingkat capaian sebesai 77,27% tergolong dalam kriteria tinggi.

Data Dukung Capaian Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi

Untuk mengatasi masalah lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan rehabilitasi baik di kawasan hutan dan maupun lahan di luar kawasan hutan seluas 707.169 Ha. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi, reklamasi dan penghijauan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan yaitu mencegah timbulnya pencemaran.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Percepatan pelaksanaan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 260/KPTS/DIHUT/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pananaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini mendorong kemajuan rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang terus meningkat. Progres rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2018 – 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi												Ket.
				Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des	
a.	Mengurangi Luas Lahan Kritis di dalam dan di Luar Kawasan Hutan (PK Jan - Sept)	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman	10 ha	28,08 ha	30,45 ha	300,26 ha	0,38 ha	1,44 ha	1,19 ha	1,67 ha	0,25 ha	15,70 ha	69,60 ha	47,34 ha	16,08 ha	Penanaman di luar kawasan hutan
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0,14 %	0,0005 %	0,0077 %	0,0129 %	0,0016 %	0 %	0,0002 %	0,0003 %	0,0007 %	0,0288 %	0,0148 %	0,0231 %	0,0800 %	- Penanaman di dalam kawasan hutan - Luas kawasan hutan Prov Sumsel diluar Kawasan Konservasi : 2.616.844,09 ha
b.	Meningkatnya Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sungai sebagai Ekosistem Penyangga	Persentase Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	0,13 %										0,07 %	0,09 %	0,30 %	- Penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan - Total Luas Lahan Kritis Prov Sumsel 707.168 ha (SK Dirjen PDASRH Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022)
		Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	1,68 %										0,31 %	0,37 %	1,88 %	Luas sempadan sungai yg masuk dalam RURL (804,16 ha)

Tabel 3.26 Penanaman Didalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Ekosistem	UPTD KPH	Keterangan
1.	Banyuasin	Banyuasin	Kayuara Kuning	1	Daratan	UPTD KPH Wil. III Palembang - Banyuasin	KHDTK Kemampo (BPDAS MUSI)
		Banyuasin II	Rimau Sungsang	0,5	Mangrove		HL Pulau Rimau (CSR PT. Bukit Asam)
		Tungkal Ilir	Bentayan	9	Daratan		Revegetasi Reklamasi (PT. Trimata Benua)
		Banyuasin II	Sungsang 4	1,5	Mangrove		HL Air Telang (PT. Medco E&P Indonesia)
		Banyuasin II	Sungsang 4	2,5	Mangrove		HL Air Telang (PT. Pusri)
		Banyuasin II	Sungsang 4	0,05	Mangrove		HL Air Telang (PT. PLN)
		Total		***14,55***			
2.	OKI	Tulung Selapan	Simpang Tiga Abadi	1	Daratan	UPTD KPH Wil. IV Sungai Lumpur - Riding	HL Sungai Lumpur (PT. Odura Energy)
		Tulung Selapan	Simpang Tiga Jaya	10	Mangrove		HL. Sungai Lumpur Mesuji (Rehab DAS PT. Odira Energy Karang Agung)
		Cengal	Kuala Sungai Pasir	38	Daratan	UPTD KPH Wil. V Lempuing - Mesuji	HL Pantai Timur
		Cengal	Kuala Sungai Pasir	40	Daratan		HL Pantai Timur
		Pedamaran	Cita Jaya	243,49	Gambut		HPT Pedamaran (Rehap DAS PT. Trimata Benua)
		Pedamaran	Cita Jaya	410	Gambut		HPT Pedamaran (Rehap DAS PT. Trans Power Indonesia)
		Tulung Selapan	Simpang Tiga Jaya	3	Mangrove	UPTD KPH Wil. IV Sungai Lumpur - Riding	HL. Sungai Lumpur Mesuji (Rehab DAS PT. Odira Energy Karang Agung)
		Total		***745,49***			
3.	OKU Timur	Buay Pemuka Peliung	Banuayu	1,75	Daratan	UPTD Wil. VI Bukit Nanti - Martapura	HP Martapura(Swadaya KTH)
		Buay Pemuka Bangsa Raja	Muncak Kabau	2,3	Daratan		HP Martapura(Swadaya KTH)
		Buay Pemuka Peliung	Banuayu	10	Daratan		HP Martapura (Folu Net SinK)
		Total		***14,05***			
4.	OKU Selatan	Banding Agung	Tanjung Agung	400	Daratan	UPTD KPH Wil. VII Bukit	HL Mekakau (BPDAS MUSI)
		Banding Agung	Telanai	100	Daratan		HL Mekakau (BPDAS MUSI)

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Ekosistem	UPTD KPH	Keterangan
		Buana Pemaca	Gemiung	130	Daratan	Mekakau - Saka	HL. Saka (Rehab DAS PT. Sumsel Energy Pewali)
Total				***630***			
5.	Muara Enim	Lawang Kidul	Tegal Rejo	12	Daratan	UPTD KPH Wil. VIII Semendo	HP Bukit Asam (Revegetasi PT. Bara Anugerah Sejahtera)
		Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	20	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Semende Darat Ulu	Tanjung Agung	100	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Lawang Kidul	Keban Agung	440,29	Daratan	UPTD KPH Wil. IX Suban Jeriji	HP Air Laya (Revegetasi PT. BA)
			Tanjung Enim				
		Merapi Selatan	Geramat	201	Daratan		HL Isau-Isau (Rehab DAS PT. BA)
		Tanjung Agung	Tanjung Lalang				
		Tanjung Agung	Tanjung Karangan	435	Daratan		HL Isau-Isau (Rehab DAS PT. Batubara Bukit Kendi)
Total				***1208,29***			
6.	Pagar Alam	Dempo Tengah	Jokoh	100	Daratan	UPTD KPH Wil. X Dempo	HL Bukit Jambul Gunung Patah (CSR PT. Galtam)
		Dempo Tengah	Jokoh	353	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (Rehab DAS PT. Galtam)
		Dempo Tengah	Candi Jaya	10	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Dempo Utara	Agung Lawangan	10	Daratan		
		Dempo Selatan	Kance Diwe	75	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
				390,2	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (Rehab DAS PT. Triaryani)
		Dempo Utara	Agung Lawangan	100	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
		Dempo Tengah	Candi Jaya	90	Daratan		HL Bukit Jambul Gunung Patah (BPDAS Musi)
Total				***1128,2***			
7.	Lahat	Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	10	Daratan	UPTD KPH Wil. XI Kikim - Pasemah	HL Bukit Dingin (PT. Pusri di Areal HKM Ayek Baku)
		Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	3	Daratan		HL Bukit Dingin (BPTH)
		Tanjung Sakti Pumi	Pulau Panas	0,2	Daratan		HL Bukit Dingin (Swakelola KTH)
		Gumay Ulu	Sinjar Bulan	10	Daratan		HPT Gumay Tebing Tinggi (BPDAS Musi)
		Merapi Selatan	Tanjung Beringin	1	Daratan		HL Isau-Isau

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Ekosistem	UPTD KPH	Keterangan
		Tanjung Sakti	Pulau Panas	1	Daratan		HL Bukit Dingin (BPTH)
Total				***25,2***			
8.	Musi Rawas	Megang Sakti	Mekar Sari	410	Daratan	UPTD KPH Wil. XIII Lakitan - Bukit Cogong	Hp Lakitan Utara I (PT. PML)
		Selangit	Taba Tengah	134,6	Daratan		HPT Hulu Tumpah (BPDAS Musi)
Total				***544,6***			
9.	Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Sungai Baung	3,00	Daratan	UPTD KPH Wil. XIV Rawas	HP Rawas Utara II (CSR PT. Esa Yasa Dinamika)
		Rawas Ulu	Sungai Baung	8,68	Daratan		HP Meranti Hulu Sungai Kapas (PT. Esa Yasa Dinamika)
		Rawas Ulu	Sungai Baung	108,06	Daratan		HP Rawas (PT. Esa Yasa Dinamika)
Total				***119,74***			
10.	Musi Banyuasin	Bayung Lencir	Muara Medak	1	Daratan	UPTD KPH Wil. II Lalan - Mendis	Hutan Produksi (KTH Karya Liberika)
		Sanga Desa	Keban	10	Daratan	UPTD KPH Wil. I Meranti	HP Meranti Sungai Merah
		Batang Hari Leko	Pangkalan Bulian	10	Daratan		
		Batang Hari Leko	Pangkalan Bulian	12	Daratan		
Total				***33,00***			
Grand Total				***4.463, 12***			

Sumberdata : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2025.

Sasaran 4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial

Kinerja pada sasaran 4 dicapai melalui indikator kinerja Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%).

Tabel 3.27 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
IV	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	140	352	251,4

Total pagu untuk mendukung sasaran 4 sebesar Rp. 436.681.400,- dengan realisasi keuangan 95,90% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

IKU 6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)

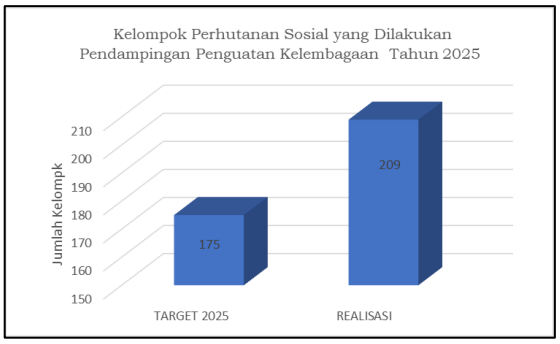

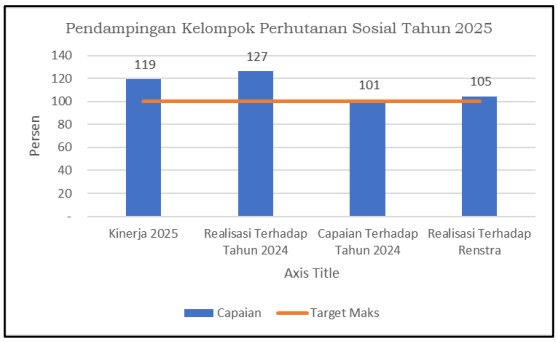

Gambar 3.21 Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial Tahun 2025

Dukungan program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 sebagai berikut :

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

   1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

   Indikator kinerja (output) yaitu Jumlah Penyuluhan Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas sebesar Rp. 648.624.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 332.563.010,- atau 51,27 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan diantaranya:

   a) Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi

   Kegiatan penyuluhan kehutanan merupakan suatu upaya investasi dalam bentuk pendidikan/pelatihan/sosialisasi/penelitian guna

peningkatan produktivitas pelaku utama dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan/hutan.

Gambar 3.22 Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

b) Pelatihan ArcGis bagi Penyuluh Kehutanan

Pendidikan penyuluhan merupakan program edukasi mandiri untuk para petani yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian baik secara fisik, biologi dan sosial yang dikemas dalam bentuk konsep, prinsip-prinsip dan prosedur.Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu sebanyak 33 orang sesuai dengan surat panggilan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 500.4.2.5/4560/Dishut-V/2025 tanggal 17 September 2025 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Arc GIS dengan unsur:

a) Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 19 orang
b) Penyuluh Kehutanan P3K sebanyak 8 orang
c)Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sebanyak 2 orang
d) Staf Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 4 orang

Gambar 3.23 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan dalam Pelatihan Arc GIS Tahun Anggaran 2025

c) Workshop kegiatan penyuluhan kehutanan dalam bentuk Pameran Hasil Hutan Anggaran tahun 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang

Penyuluhan dan Pemberdayaan telah mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam bentuk pameran/workshop. Pameran adalah kegiatan untuk mempertunjukkan secara sistematis tentang model, benda contoh, spesimen, barang asli, peta, grafik, gambar atau foto di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu.

Gambar 3.24 Pameran Sriwijaya Expo Tahun 2025 dan Pameran Festival Rempah Tahun Anggaran 2025

1.2 Sub KegiatanPenguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Indikator kinerja (output) yaitu kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan sebesar Rp. 1.431.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.169.760.117,- atau 81,74% dan realisasi fisik sebesar 100 %. Pembagaian dari jumlah anggaran tersebut yaitu untuk seksi penyuluhan sebesar Rp. 1.263.000.000,- dan sisanya terbagai untuk seluruh 14 UPTD KPH (Rp. 168.000.000,-) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan sebagai akomodasi personil tingkat KPH dalam pelaksanaan penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan. Kegiatan dalam rangka penguatan dan pendampingan juga diiringi dengan penyediaan Alat Ekonomi Produktif yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bagi kelompok tani hutan yang menyasar 9 KTH. Dana DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pada tahun 2025 ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mendapatkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.28 Alokasi Pemberian Alat Ekonomi Produktif Tahun Anggaran 2025

No	UPTD KPH	Nama Kelompok	Produk	Harga (Rp)	Unit
1	UPTD Wil. II Lalan Mendis	Kopi Liberika	Mesin pengupas kulit buat kopi basah (pulper)	34.000.500	1
			Mesin bubuk kopi	30.500.500	1
2	UPTD Wil. VII Mekakau Saka	KTH Semitik Jaya	Mesin bubuk kopi	30.500.500	1
		KTH Cahaya Makmur	Mesin pengupas kulit buat kopi basah (pulper)	34.000.500	1
3	UPTD Wil. VII Mekakau Saka	KT Makmur Jaya	Mesin penggiling kopi	30.199.500	1
		KTH Bunga Jaya	Alat pencacah pakan ternak	30.429.500	1
4	UPTD Wil. VIII Semendo	KUPS Genting Pelubang	Mesin pengupas kulit buat kopi basah (pulper)	34.000.500	1
5	UPTD Wil. VII Semendo	KTH Karya Mandiri	Mesin pengupas kulit buat kopi basah (pulper)	34.000.501	1
			Mesin segel plastik	18.050.000	1
			Mesin pengupas (kulit tanduk) kopi kering	42.300.500	1
		KUPS Genting Pelubang	Mesin pengupas (kulit tanduk) kopi kering	42.300.500	1
6	UPTD Wil. XI Kikim Pasemah	KTH Rimbe Kawe	Mesin roasting	64.001.000	1
			Mesin pengupas kulit buat kopi basah (pulper)	33.834.000	1
			Mesin bubuk kopi	30.001.001	1
			Mesin pengupas (kulit tanduk) kopi kering	42.023.000	1
7	UPTD Wil X Dempo	KUPS Kopi Lestari	Mesin pengupas (kulit tanduk) kopi kering	42.300.500	1
			Mesin bubuk kopi	30.500.500	1
			Mesin segel plastik	18.050.451	1
		KT Bumi Nendagung Permai	Mesin pengupas kulit buat kopi basah (pulper)	34.000.500	1
8	UPTD Wil X Dempo	KUPS Kopi Lestari	Mesin pengupas kulit buat kopi basah (pulper)	34.000.500	1
9	UPTD Wil VI Bukit Nanti	KTH Lekis Rejo	Dehumidifier	28.550.000	1
			Honey Refractometer	19.550.001	1
10	UPTD Wil IX Suban Jeriji	KTH Sari Puspa	Dehumidifier	28.550.000	2
			Ekstraktor Madu	30.527.450	1

Gambar 3.25 Penyerahan Alat Ekonomi produktif

1.3 Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan

Indikator kinerja (output) yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Perhutanan Sosial dan Seksi Pengembangan Hutan Hak dengan Pagu Rp469.919.300,00 dengan realisasi keuangan Rp395.968.434,00 atau 84,26% dan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial meliputi 2 agenda kegiatan yaitu Perhutanan Sosial dan Pengembangan Hutan Hak/Rakyat. Agenda Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 terdata sebanyak 48 usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan luas ±4.706 Ha. Adapun Kelompok Perhutanan Sosial yang mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Tahun 2025 sebanyak 3 unit dan ketiga unit tersebut merupakan persetujuan perhutanan sosial melalui skema Kemitraan Konsesi.Penerima manfaat tersebut diantaranya:

a) KTH Jaya Makmur melalui skema kemitraan konsesi dengan PT Musi Hutan Persada, penerima manfaat sebanyak 85 KK dengan luas 216,44 Hektar di wilayah kelola UPTD KPH Wilayah IX Subanjeriji;
b) KTH Tunas Harapan melalui skema kemitraan konsesi dengan PT Musi Hutan Persada, penerima manfaat sebanyak 51 KK dengan luasan 196,39 hektar yang berada di wilayah kelola UPTD KPH Wilayah XII Benakat; dan
c) KTH Rawas Ulu melalui skema kemitraan konsesi dengan PT Esa Yasa, penerima manfaat sebanyak 51 KK dengan luasan mencapai 176 hektar dan berada di wilayah kelola UPTD KPH Wilayah XIV Rawas.

Tabel 3.29 Persetujuan Perhutanan Sosial terbit Tahun 2025

No.	UPTD KPH	Tahun						Jumlah KPS
		2010 - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Wilayah I Meranti	10	-	3	-	-	-	**13**
2	Wilayah II Lalan Mendis	8	-	3	1	4	-	**16**
3	Wilayah III Palembang-Banyuasin	16	4	7	1	3	-	**31**
4	Wilayah IV Sungai Lumpur-Riding	2	-	2	-	-	-	**4**

5	Wilayah V Lempuing-Mesuji	28	-	-	-	-	-	**28**
6	Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura	36	-	-	-	-	-	**36**
7	Wilayah VII Mekakau Saka	31	-	4	-	-	-	**35**
8	Wilayah VIII Semendo	23	-	-	-	1	-	**24**
9	Wilayah IX Suban Jeriji	2	1	3	-	-	1	**7**
10	Wilayah X Dempo	10	-	-	-	-	-	**10**
11	Wilayah XI Kikim Pasemah	4	-	1	1	-	-	**6**
12	Wilayah XII Benakat	1	-	4	-	-	1	**6**
13	Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong	7	1	-	-	-	-	**8**
14	Wilayah XIV Rawas	-	-	-	1	1	1	**3**
	Jumlah	**178**	**6**	**27**	**4**	**9**	**3**	**227**

Jumlah usulan perhutanan sosial yang ditindaklajuti dengan verifikasi teknis sebanyak 17 usulan dengan hasil sebanyak 10 usulan dapat dipertimbangkan untuk proses lebih lanjut dan 7 usulan tidak dapat diproses lebih lanjut. Usulan yang tidak dapat diproses, disebabkan karena kondisi objek atau areal yang diusulkan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya terdapat tanaman sawit, kondisi lahannya masih berupa hutan primer, gambut dalam fungsi lindung dan belum ada kepastian batas administrasi desa. Permasalahan juga merujuk pada subjek penerima dikarenakan belum mendapatkan persetujuan di beberapa lokasi oleh Kepala Desa setempat dalam hal penandatanganan pernyataan terkait lahan garapan para anggota Kelompok Tani Hutan.

Kegiatan Dinas Kehutanan yang bekerja sama dengan mitra/NGO untuk pencapaian target pendampingan kepada Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.30 Kegiatan pendampingan Masyarakat bekerjasama dengan Mitra/NGO

No.	Mitra/NGO	Kegiatan	Lokasi dan Waktu	Ket.
1.	Hutan Kita Institute (HaKI)	Menjadi Narasumber pada *Focus Group Discussion* (FGD) untuk Fasilitasi Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) di HKm Tanjung Lestari, HKm Bunga Tanjung, HKm Nahara Indah, dan HKm Cahaya Makmur	Desa Tanjung Agung dan Desa Sumber Makmur, Kec. Banding Agung, Kab. OKU Selatan, 18 – 20 Januari 2025	
2.	International Centre for Research in Agroforestry	Pelatihan Pengelola Sistem Informasi Akses Percepatan Perhutanan Sosial (SiAlam) Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, 10 – 11 Desember 2025	

	(ICRAF) Indonesia			

Sumberdata: Bidang PPM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Data Dukung Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)

Pengelolaan hutan yang lestari disertai dengan peningkatan fungsinya dapat terwujud, apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya. Peran serta aktif masyarakat dapat terealisasi apabila mereka mengetahui dan sadar serta peduli terhadap eksistensi hutan bagi mereka.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan upaya Gerakan memasyarakatkan hutan dan peduli lingkungan serta seksistensinya melalui kegiatan penyuluhan kehutanan yang didukung oleh perencanaan penyuluhan yang mantab dan berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi penyuluhan kehutanan tersebut, berbagai upaya telah dan akan dilakukan antara lain penetapan berbagai ketetapan atau pronsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para penyuluhan kehutanan.

Gambar 3.26 Bimbingan Teknis Kelompok Tani Hutan

Gambar 3.27 Pendampingan Kelompok Tani Hutan

Tabel 3.31 Rekapitulasi Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 2025

UPTD KPH	Kab	HD			HKm			HTR			Kemitraan			Hutan Adat			Total		
		Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK
WIL. I MERANTI	Muba	0	0,00	0	6	3214,29	856	4	6.821,00	283	3	960,00	285	0	0	0	13	10.995,29	1.424
WIL. II LALAN-MENDIS	Muba, Banyuasin	2	12.185,00	1.294	9	6945,00	929	2	4.080,00	484	3	17.373,14	3.032	0	0	0	16	40.583,14	5.739
WIL. III PALEMBANG-BANYUASIN	Banyuasin	1	553,00	19	27	6245,50	1745	0	0,00	0	3	1.548,00	882	0	0	0	31	8.346,50	2.646
WIL. IV SUNGAI LUMPUR-RIDING	OKI	1	505,00	26	2	2139,00	160	0	0,00	0	1	10.000,00	1.700	0	0	0	4	12.644,00	1.886
WIL. V LEMPUING - MESUJI	OKI	0	0,00	0	0	0,00	0	28	7.150,34	2.654	0	0,00	0	0	0	0	28	7.150,34	2.654
WIL. VI BUKIT NANTI-MARTAPURA	OKU, OKU Timur	0	0,00	0	4	1030,00	508	32	1.915,73	269	0	0,00	0	0	0	0	36	2.945,73	777
WIL. VII MEKAKAU-SAKA	OKU Selatan	0	0,00	0	32	16289,64	3824	3	2.217,00	337	0	0,00	0	0	0	0	35	18.506,64	4.161
WIL. VIII SEMENDO	Muara Enim, Lahat	14	17.878,00	3.872	9	3058,00	950	0	0,00	0	0	0,00	0	1	44	344	24	20.979,70	5.166
WIL. IX SUBANJERIJI	Muara Enim, Prabumulih	1	175,00	791	5	499,70	218	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	6	674,70	1.009
WIL. X DEMPO	Pagar Alam	0	0,00	0	9	2923,00	1116	0	0,00	0	0	0,00	0	1	336	234	10	3.259,00	1.350

UPTD KPH	Kab	HD			HKm			HTR			Kemitraan			Hutan Adat			Total		
		Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK
WIL. XI KIKIM PASEMAH	Lahat, Empat Lawang	1	313,00	260	5	2238,40	660	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	6	2.551,40	920
WIL. XII BENAKAT	Muara Enim, Pali, Muba, Mura, Lahat	0	0,00	0	1	5800,00	541	0	0,00	0	4	274,79	100	0	0	0	5	6.074,79	641
WIL. XIII LAKITAN-BUKIT COGONG	Mura	7	2.897,00	4.504	1	290,00	90	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	8	3.187,00	4.594
WIL. XIV RAWAS	Muratara	1	1.104,00	67				0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	1	1.104,00	67
JUMLAH		28	35.610,00	10.833	110	50.672,53	11.597	69	22.184,07	4.027	14	30.155,93	5.999	2	380	578	223	139.002,23	33.034

Penyuluh kehutanan merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Penyuluh kehutanan pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lainnya, yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumber daya hutan sebagai asset negara, dan upaya mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan penyuluh kehutanan dalam menunjang pembangunan kehutanan, diperlukan tidak hanya di tengah masyarakat dalam atau sekitar Kawasan hutan yang rusak maupun yang masih baik, pada lahan-lahan masyarakat dan hutan-hutan rakyat, dan bahkan juga di daerah perkotaan. Kehadiran penyuluh kehutanan yang melaksanakan tugas dan perannya dengan baik di suatu wilayah diharapkan akan dapat membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan pembangunan kehutanan di wilayah tersebut, serta membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan dan kehutanan.

Salah satu kriteria untuk mengukur kemajuan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui penilaian kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu kelas pemula, madya, dan utama. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha Berdasarkan penilaian terhadap KTH yang mengelola Kawasan hutan kelas Madya baru 25,57% sedangkan untuk KTH yang membudidayakan tanaman kehutanan (di luar Kawasan hutan) hanya 16,67%. Hal ini tantangan bagi Dinas Kehutanan untuk dapat meningkatkan kelas KTH bagi 223 Kelompok Perhutanan Sosial dan 30 KTH.

Tabel 3.32 Hasil Penilaian Kelas Kelompok Perhutanan Sosial

No	UPTD KPH	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial		Kelas KTH		
			Blm Dinilai	Pemula	Madya	Utama
1.	Meranti	13	12	1	0	0
2.	Lalan Mendis	12	5	5	2	0
3.	Palembang Banyuasin	28	23	4	1	0
4.	Sungai Lumpur Riding	4	4	0	0	0
5.	Lempuing Mesuji	28	10	5	13	0
6.	Bukit Nanti Martapura	9	0	6	3	0
7.	Mekakau Saka	35	19	6	10	0
8.	Semendo	23	3	0	20	0
9.	Suban Jeriji	6	4	2	0	0
10.	Dempo	10	3	0	7	0
11.	Kikim Pesemah	5	4	0	1	0

12.	Benakat	5	4	1	0	0
13.	Lakitan Bukit Cogong	8	1	7	0	0
14.	Rawas	1	1	0	0	0
JUMLAH		**187**	**93**	**37**	**57**	**0**

Tabel 3.33 Kelas Kelompok Tani Hutan (Di Luar Kawasan Hutan)

No	UPTD KPH	Jumlah KTH	Kelas KTH		
			Pemula	Madya	Utama
1.	Meranti	-	-	-	-
2.	Lalan Mendis	-	-	-	-
3.	Palembang Banyuasin	-	-	-	-
4.	Sungai Lumpur Riding	-	-	-	-
5.	Lempuing Mesuji	-	-	-	-
6.	Bukit Nanti Martapura	2	2	-	-
7.	Mekakau Saka	1	-	1	-
8.	Semendo	8	6	2	-
9.	Suban Jeriji	22	20	2	-
10.	Dempo	-	-	-	-
11.	Kikim Pesemah	2	1	1	-
12.	Benakat	-	-	-	-
13.	Lakitan Bukit Cogong	1	1	-	-
14.	Rawas	-	-	-	-
JUMLAH		**36**	**30**	**6**	**0**

Dinas Kehutanan telah melaksanakan upaya pendampingan KTH, namun hasil yang diharapkan belum optimal. Jumlah SDM (penyuluh kehutanan) dan sebarannya tidak merata dan belum bisa mengakomodir kegiatan penyuluhan/pendampingan pada KTH. PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) juga belum dapat diakomodir dalam kegiatan pendampingan karena keterbatasan pendanaan, padahal PKSM merupakan potensi yang dapat membantu pemerintah untuk melakukan pendampingan karena biasanya PKSM berdomisili di sekitar Kawasan hutan. Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat.

Tabel 3.34 Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat

No	UPTD KPH	Lokasi Penempatan	PK ASN Dalam Jabatan					Jumlah KPS/KTH		
			PNS	P3K	Non ASN (PPTPK)	PKSM	PKSM	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
1.	Dinas Kehutanan	Palembang	3	8	-	-	**11**	-	-	-
2.	Wil. I Meranti	Sekayu	1	1	-	-	**2**	13	-	13
3.	Wil. II Lalan Mendis	Bayung Lencir	3	1	-	2	**6**	16	-	16

No	UPTD KPH	Lokasi Penempatan	PK ASN Dalam Jabatan					Jumlah KPS/KTH		
			PNS	P3K	Non ASN (PPTPK)	PKSM	PKSM	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
4.	Wil. III Palembang-Banyuasin	Palembang	4	1	1	-	**6**	31	-	31
5.	Wil. IV Sungai Lumpur-Ridding	OKI	1	1	1	4	**7**	4	-	4
6.	Wil. V Lempuing Mesuji	OKI	3	1	1	4	**G**	28	-	28
7.	Wil. VI Bukit Nanti-Martapura	Baturaja	6	3	2	5	**16**	36	2	38
8.	Wil. VII Mekakau Saka	Muara Dua	2	2	1	13	**18**	35	1	36
9.	Wil. VIII Semendo	Muara Enim	1	2	2	23	**28**	24	8	32
10.	Wil. IX Suban Jeriji	Prabumulih	4	1	-	27	**32**	6	22	28
11.	Wil. X Dempo	Pagar Alam	1	1	-	2	**4**	10	-	10
12.	Wil. XI Kikim Pesemah	Lahat	4	1	1	3	**G**	6	2	8
13.	Wil. XII Benakat	PALI	1	1	-	1	**3**	5	-	5
14.	Wil. XIII Lakitan Bukit Cogong	Lubuk Linggau	5	1	1	10	**17**	8	1	9
15.	Wil. XIV Rawas	Musi Rawas	0	-	1	-	**1**	2	-	2
JUMLAH			**36**	**25**	**11**	**64**	**166**	**224**	**36**	**260**

Dampak dari pendampingan terhadap KTH yang mengelola usaha kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan, di antaranya: Peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan penyerapan tenaga kerja, Peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM), dan Peningkatan tutupan lahan. Salah satu parameter kinerja penyuluh kehutanan dalam mendampingi KTH adalah nilai transaksi ekonomi (NTE). NTE KTH dihitung dan direkam pada aplikasi SIMLUH. Pengukuran NTE KTH merupakan kewajiban penyuluh kehutanan pendamping KTH binaannya. NTE perhutanan sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai Rp 41,7 milyar, sedangkan NTE KTH mencapai Rp 2,3 milyar. Sementara itu, potensi NTE baik KTH maupun perhutanan sosial bisa mencapai lebih dari nilai tersebut, apabila seluruh KTH memperoleh pendampingan penyuluh.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai IKU 6 berupa kualitas dari pendampingan kelompok tani itu sendiri dan hasil yang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a) Jumlah, sebaran dan kompetensi SDM penyuluh kehutanan yang belum memadai
b) Penyuluhan memerlukan alokasi dana yang tinggi, mengingat keberadaan KTH tersebar dan akses menuju lokasi sulit terutama untuk wilayah perairan.
c) Belum adanya kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Perhutanan Sosial. Pemerintah daerah masih berpendapat bahwa kehutanan adalah wewenangnya Pemerintah Provinsi.
d) Pemberdayaan PKSM

e) Pemegang persetujuan perhutanan sosial (KTH) yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f) Masih terjadinya konflik tenurial dalam areal kawasan hutan maupun dalam lokasi persetujuan perhutanan sosial
g) Potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang ada belum bisa dikembangkan secara optimal dikarenakan keterbatasan modal serta sarana dan prasarana pendukung
h) Optimalisasi manajemen kelembagaan tani yang masih kurang
i) Kelompok tani hutan di luar kawasan hutan yang belum terdata dengan baik
j) Pelibatan KTH di luar kawasan hutan dalam kegiatan pembangunan kehutanan yang belum memadai, karena masih terfokus kegiatan pembangunan kehutanan di dalam kawasan hutan.
k) Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum berjalan secara optimal.
l) Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber yang masih rendah, seperti akses permodalan, pemasaran dan diversifikasi produk serta jalinan kemitraan yang masih belum terfasilitasi dengan baik.

Sasaran 5. 'Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar 100%, yang diperoleh dari jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran pada tahun 2024. Kinerja pada sasaran 5 dicapai melalui indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%).

Tabel 3.35 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	7.	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100	95,46	95,46

Total pagu untuk mendukung sasaran 5 sebesar Rp. 52.326.864.564,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.910.332.068 atau 95,38 % dan realisasi fisik 99,87%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

IKU 7. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)

Berdasarkan diagram pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah tahun 2025, terlihat bahwa realisasi kinerja mencapai 93,07% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar layanan kinerja telah terpenuhi dengan baik meskipun masih terdapat selisih kecil terhadap target maksimal. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif perbandingan kinerja, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan nilai kinerja mencapai 119%, meningkat signifikan dibandingkan realisasi terhadap tahun 2024 yang mencapai 127%, serta capaian terhadap tahun 2024 sebesar 101%. Selain itu, realisasi kinerja terhadap target Renstra juga tercapai sebesar 105%, yang menandakan bahwa kinerja perangkat daerah tidak hanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga telah melampaui sasaran strategis jangka menengah. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan, efektivitas pelaksanaan program, serta konsistensi perangkat daerah dalam mencapai dan melampaui target kinerja yang telah direncanakan.

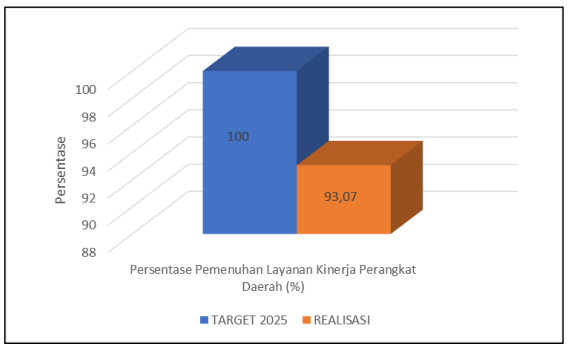

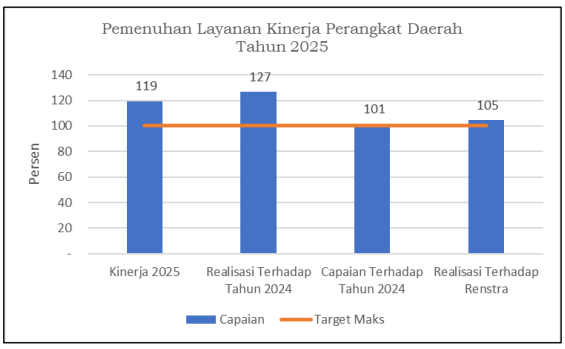

Gambar 3.28 Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Data Dukung Capaian Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.100.000.000 terrealisasi sebesar Rp.99.852.706 atau 99,85

%. Output dari kegiatan ini berupa dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU serta pengumpulan data dokumen perencanaan. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 % target terpenuhi. Realisasi sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Perjalanan dinas biasa dilakukan untuk kordinasi ke UPTD KPH Wilayah I-XIV dan KLHK.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 126.000.000,- terrealisasi sebesar Rp 125.774.402,00 atau 99,88 %. Koordinasi ini dilakukan ke UPTD KPH, KLHK, Menpan RB dan Mendagri. Output dari kegiatan ini berupa laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Target output sebanyak 11 laporan, terealisasi sebanyak 11 laporan atau sebesar 100 %.

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 45.638.736.364,- terrealisasi sebesar Rp. 43.454.974.404. atau 95,22 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Target output sebanyak 399 orang, terealisasi dengan baik atau sebesar 95,22 %.Sub kegiatan ini berupa Belanja Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga PNS, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional PNS, Tunjangan Fungsional Umum PNS, Tunjangan Beras PNS, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Pembulatan Gaji PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS. Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah terdapat pegawai ASN yang pensiun dan pindah tugas ke OPD yang lain

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   Anggaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 223.280.000,- terrealisasi sebesar Rp. 223.280.000 atau 100 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN. Realiasi sub kegiatan ini berupa belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan belanja honorarium pengadaan barang/jasa. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

   Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp. 69.545.200,- terrealisasi sebesar Rp 68.689.323 atau 98,77 %. Sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Koordinasi dilakukan ke UPTD KPH Wilayah I-XIV, Bidang pada Lingkup Dinas Kehutanan, Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah dan Bank Sumsel Babel. Output dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

   Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp. 42.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 41.910.700 atau 99,79 %. Sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Target output sebanyak 1 (satu) dokumen, terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100 %. Perjalanan dinas dilakukan ke Kab. Musi Banyuasin, Kab OKU, Kota Batam, Kab.OKI, Kab. Banyuasin dan Kab.Lahat

7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

   Anggaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebesar Rp. 32.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 31.793.700 atau 99,36 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Target output sebanyak 1

dokumen, Kegiatan ini berjalan dengan baik,Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan Kab. Musi Banyuasin, Kab. OKI, Kab. OKUS.

8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 12000000,- terrealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %. Evaluasi dari kegiatan ini adalah Tidak ada pemanggilan calon peserta diklat dari Dinas Kehutanan oleh lembaga pelaksana Diklat

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 39.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 38,762.339,- atau 99,39 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau 100 persen target output dapat terlaksana.

   Kegiatan ini berjalan dengan baik, Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah perlunya perombakan total terhadap komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan. Instalasi yang ada merupakan instalasi yang sudah tua sehingga perlu perbaikan tergadap komponen listraik yang sudah tua.

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

    Anggaran Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 50.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 49.800.837,- atau 99,60 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik.

11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

    Anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 140.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 139.585.287,- atau 98,69 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Bahan yang dibelikan adalah alat tulis kantor. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 99,70 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik.

12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Anggaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 52.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 45.461.307,- atau 87,43 %. Realisasi dari

subkegiatan ini adalah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

    Anggaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 12.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 5.940.000 ,- atau 99,00 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

14. Fasilitasi Kunjungan Tamu

    Anggaran Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. 85.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 81.830.000,- atau 99,57 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 96,27 %. Realisasi sub Kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (12 Laporan). Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Serapan anggaran dan target output dapat terrealisasi dengan baik.

15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

    Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 940.000.000terrealisasi sebesar Rp. 939.370.239,- atau 99,71 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (250 laporan), terealisasi sebanyak 250 laporan atau sebesar 98,67 %. Sub kegiatan ini terdiri atas belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas dilakukan ke Kab. Musi Banyuasin, Kab.PALI, Kab. OKI, Jakarta, Bandung dan Kab.OKU.

    Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Serapan anggaran dan target output dapat terrealisasi. Terdapat evaluasi untuk perjalanan dinas luar provinsi didapatkan bahwa pagu anggaran tiket pesawat pada permendagri untuk beberapa kota lebih rendah dibandingkan dengan biaya riilnya.

16. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 25.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 2.5000.000,- atau 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan. Kegiatan ini berupa sewa gedung untuk UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti. Target output sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran mencapai 100 %

17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 15.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 11.642.900,- atau 77,62 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos dan belanja paket/pengiriman. Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %.

Evaluasi terhadap serapan anggaran sebesar 77,62 % dikarenakan saat ini banyak surat menyurat yang sudah menggunakan online, sehingga serapan anggaran menjadi kecil. Tetapi target output dapat dipenuhi 100 %.

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 645.732.000,- . realisasi sebesar Rp. 509.934.486,- atau 78,97 %.Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Realisasi sub kegiatan ini berupa Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.Evaluasi terhadap serapan yang sebesar 78,97 %. Dikarenakan sebagian kantor KPH menggunakan token listrik. Penghitungan token listrik dari KPH terlalu tinggi sehingga menyebabkan over estimate anggaran. Kedepannya penghitungan kantor KPH yang menggunakan token listrik akan dihitung lebih akurat.

19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 3.419.300.000,- terrealisasi sebesar Rp. 3.419.300.000,- atau 100 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, serapan anggran mencapai 100 %.

20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

    Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 567.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 514.184.438,- atau 90,69 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Realisasi dari sub kegiatan ini adalah belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan, belanja asuransi barang milik daerah, belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua. target output sebanyak 25 unit, terealisasi sebanyak 25 unit atau sebesar 100 %.

    Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah pada penghitungan pajak. Penghitungan perkiraan pajak kendaraan terlalu besar sehingga anggaran tidak terserap 100%. Untuk tahun 2025 akan dilakukan perkiraan penghitungan pembayaran pajak yang lebih akurat.

21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

    Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 93.271.000,- terrealisasi sebesar Rp. 83.245.000,- atau 89,25 %. Realisasi dari sub kegiatan ini adalah belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target output sebanyak 50 unit, terealisasi sebanyak 50 unit atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, serapan anggran tidak mencapai 100 % dikarenakan dilakukan efisiensi.

22. Pemeliharan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp. 0 ter realiasi sebesar Rp.0 tidak adanya realiasi di sub kegiatan ini dikarenakan Anggaran di *refocusing*.

Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan”

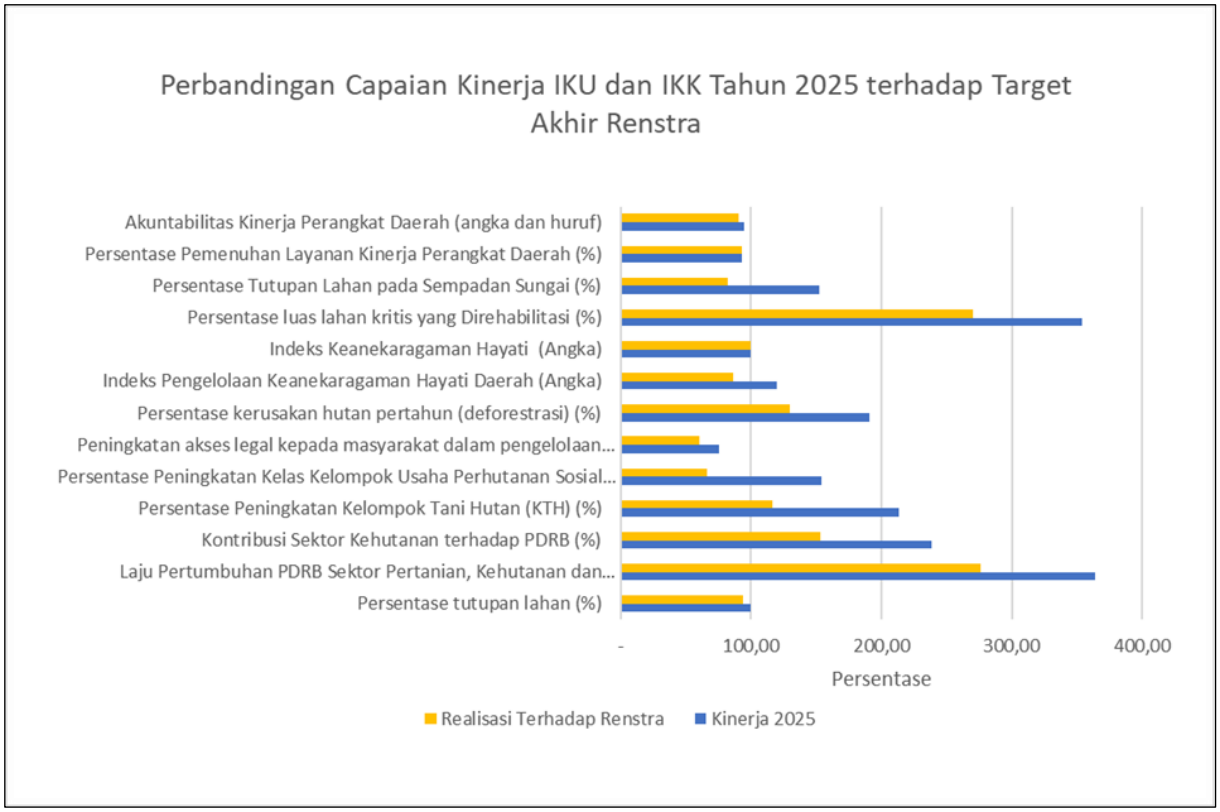

Gambar 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tersaji pada tabel, dapat disimpulkan bahwa tujuan “Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan” secara umum telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target Renstra. Pada aspek kondisi biofisik hutan, persentase tutupan lahan sebagai IKU utama mencapai 100%, dengan realisasi terhadap Renstra sebesar 94%, yang mengindikasikan stabilitas tutupan hutan tetap terjaga meskipun masih memerlukan penguatan perlindungan kawasan. Dari sisi kontribusi ekonomi, sasaran meningkatnya peran sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan capaian sangat tinggi, ditandai oleh laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 364% serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 238,65%, yang masing-masing jauh melampaui target Renstra. Hal ini mencerminkan meningkatnya nilai tambah sektor kehutanan terhadap ekonomi regional.

Selanjutnya, pada sasaran penguatan kelembagaan dan usaha perhutanan sosial, indikator peningkatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dan peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menunjukkan kinerja yang relatif tinggi, dengan capaian kinerja tahun 2025 masing-masing 213,67% dan 154,33%, meskipun realisasi terhadap Renstra pada indikator KUPS masih tergolong moderat. Sementara itu, indikator peningkatan akses legal masyarakat melalui Perhutanan Sosial telah mencapai 75,09%, namun masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya dan target Renstra, sehingga memerlukan percepatan penetapan izin dan pendampingan masyarakat. Pada sasaran pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, indikator pengendalian deforestasi menunjukkan capaian kinerja yang tinggi, disertai peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Indeks Keanekaragaman Hayati yang telah mencapai atau mendekati target Renstra, menandakan pengelolaan ekosistem hutan yang semakin berkelanjutan.

Pada sasaran perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai, capaian indikator rehabilitasi lahan kritis dan tutupan lahan sempadan sungai menunjukkan hasil sangat signifikan, bahkan jauh melampaui target Renstra, yang mengindikasikan keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai penyangga ekosistem. Adapun pada sasaran peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah, indikator pemenuhan layanan kinerja dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah mencapai di atas 90% serta relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dan perbaikan tata kelola organisasi. Secara keseluruhan, capaian IKU dan IKK menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan telah dicapai secara efektif, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek akses perhutanan sosial dan peningkatan kualitas layanan kinerja agar keberlanjutan kinerja dapat terus terjaga.

1. Inovasi

Inovasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pembinaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan bersama lembaga penelitian ICRAF di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis

   Pembelajaran-pembelajaran berbasis masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui praktik pertanian cerdas iklim

- Manfaat/dampak Inovasi :

Menambah ilmu dan wawasan masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi melalui pemanfaatan kebun dapur disekitar tempat tinggal

2. Pemanfaatan buah nipah sebagai bahan baku tepung free gluten di UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding

Pemanfaatan HHBK Tanaman Nipah berupa pembuatan tepung free gluten untuk bahan baku kukis dan aneka olahan berbahan dasar tepung.

- Manfaat/dampak Inovasi:

Peningkatan nilai ekonomi buah nipah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Program Pohon Asuh di Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa UPTD KPH Wilayah X Dempo

Program pohon asuh di latar belakangi programpenyelamatan hutan yang dikembangkan untuk menyaring pendanaan dari banyak pihak sebagai motor pembiayaan operasionalperlindungan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang sudah menjaga hutan.Program Pohon Asuh di Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa di prakarsai oleh Masyarakat Hutan Adat

- Manfaat/dampak Inovasi:

Terasuhnya 23 batang pohon yang tumbuh dalam wilayah Hutan Adat.

4. Ekowisata Enau Anggun Lestari di UPTD KPH Wilayah XII Benakat

Ekowisata yang memadukan 3 pengelolaan yaitu Jasa Lingkungan, Agro Silvopustura dan Persemaian. Pembangunan Ekowisata Enau Anggun Lestari di Latarbelakangi dengan adanya areal belum berijin seluas 398 Ha yang berada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Kepala UPTD KPH Wilayah XII Benakat bersama Kelopok Tani Hutan Enau Anggun Makmur berkolaborasi membangun Ekowisata tersebut yang saat ini masih dalam proses pembangunan

- Manfaat/dampak Inovasi:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelompok tani hutan, menjadi salahsatu pilihan wisata baru di Kabupaten Musi Rawas, Mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru.

5. Sistem Pembinaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (SIPEGAS-KEHATI)

   Sistem digital yang digunakan untuk memantau, membina, dan mengawasi kegiatan konservasi keanekaragaman hayati secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Diperlukan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efisien untuk memastikan pelaksanaan kegiatan konservasi berjalan sesuai target dan standar, serta mencegah penyimpangan dalam penggunaan sumber daya.

   - Manfaat/dampak Inovasi:

     Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan konservasi, mempercepat pelaporan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

6. Sistem Informasi Akses Lahan untuk Masyarakat (SI ALAM)

   Sistem Informasi yang dikembangkan untuk melakukan persiapan terhadap Calon Kelompok Perhutanan Sosial guna penyediaan data terhadap skema perhutanan sosial yang akan dipilih. Sistem ini dikembangkan dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada tingkat tapak, untuk melihat potensi lahan yang akan diajukan menjadi perhutanan sosial, memberikan interaksi dua arah kepada masyarakat dalam rangka kelengkapan berkas yang diperlukan guna mengajukan permohonan perhutanan sosial dan menyediakan data dan informasi jumlah Kelompok Tani Hutan yang mengajukan permohonan perhutanan sosial di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

   - Manfaat/dampak Inovasi:

     Memonitoring perkembangan calon penerima manfaat kelompok perhutanan sosial dan para pendamping.

2. Penghargaan

1. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan dalam hal Dinas Kehutanan sebagai Perangkat Daerah yang Responsif Gender dalam acara Hari Ibu ke 97 Tahun 2025 dan Penghargaan atas Focal Point Teraktif

Gambar 3.30 Sertifikat Penghargaan dan Pemberian Penghargaa dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

2. Penghargaan Dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam Surat Keputusan Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Penetapan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Efektif Dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera Dan Hutan Lestari Tahun 2025 (Penetapan KPH efektif) kepada UPTD KPH Wilayah I Meranti.

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Nomor : 68 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YANG EFEKTIF DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEJAHTERA DAN HUTAN LESTARI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, telah diatur tugas dan fungsi Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam rangka pengelolaan hutan di tingkat tapak menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, KPH Efektif menjadi salah satu Prioritas Nasional dalam Mendukung Penguatan Kapasitas Pengelola Kawasan Hutan di Tingkat Tapak (KPH, KUPS dan PBPH);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tentang Penetapan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan yang efektif dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

/2. Undang-undang ...

Dokumen ini telah ditandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Nomor : 68 TAHUN 2025
Tanggal : 27 Desember 2025

PENETAPAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEJAHTERA DAN HUTAN LESTARI TAHUN 2025

No.	Provinsi	Organisasi KPH	Unit KPH	Nilai
1.	Sumatera Utara	UPTD KPH Wilayah XII	KPH Unit XXIV KPHL Tapanuli Utara	84,18
2.	Sumatera Utara	UPTD KPH Wilayah VI	KPH Unit XXVI KPHL Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara	84,63
3.	Sumatera Utara	UPTD KPH Wilayah VII	KPH Unit XXXI KPHP Padang Lawas dan Padang Lawas Utara	75,70
4.	Jambi	UPTD KPHP Batanghari	KPHP Unit XI Batanghari	73,38
5.	Sumatera Barat	UPTD KPHL Sijunjung	KPHL Unit VI	85,00
6.	Sumatera Barat	UPTD KPHL Lima Puluh Kota	KPHL Unit III	81,40
7.	Sumatera Selatan	UPTD KPH Wilayah I Meranti	KPHP Unit I	85,15
8.	Lampung	UPTD KPH Gedong Wani	KPHP Unit XVI Gedong Wani	91,45
9.	Nusa Tenggara Barat	BKPH Pelangan Tastura	KPHP Unit II Pelangan	73,53
10.	Kalimantan Tengah	UPT KPHP Barito Tengah	KPHP Unit VIII	84,03
11.	Kalimantan Tengah	UPT KPHP Sukamara-Lamandau	KPHP Unit XXIV	75,70
12.	Kalimantan Tengah	UPT KPHP Kapuas Hulu	KPHP Unit XII	83,73
13.	Kalimantan Barat	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	KPHP Unit XI Sanggau Timur	73,38
14.	Kalimantan Timur	UPTD KPHP Kelinjau	KPHP Unit XI Kelinjau	79,68
15.	Kalimantan Timur	UPTD KPHP Bengalon	KPHP Unit IX Bengalon	82,75
16.	Kalimantan Timur	UPTD KPHP Manubar	KPHP Unit X Manubar	80,43
17.	Sulawesi Tengah	UPT KPH Balantak	KPHP Unit XX Balantak	82,15
18.	Sulawesi Utara	UPTD KPH Unit III Sangihe, Talaud dan Sitaro	KPHL Unit III	78,78
19.	Sulawesi Selatan	UPT KPH Selayar	KPHL Unit XXIV Selayar	86,50
20.	Sulawesi Selatan	UPT KPH Bialo	KPHL Unit XXII	88,97

Dokumen ini telah ditandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 3.31 SK Penetapan KPH Efektif Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat implementasi pengelolaan hutan secara lestari serta mendorong kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara nyata mendukung terwujudnya Visi "Sumsel Maju Terus untuk Semua", dan misi khususnya melalui pengelolaan hutan untuk mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan. Kinerja Dinas Kehutanan menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan mayoritas indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tujuan Pengelolaan Hutan Secara Lestari, capaian kinerja menunjukkan peningkatan signifikan. Produktivitas kawasan hutan tercermin dari realisasi Pembayaran PNBP sebesar Rp109,98 miliar atau 141,94% dari target, yang didorong oleh peningkatan aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan kepatuhan pelaku usaha kehutanan.
2. Upaya pengendalian kerusakan hutan juga berjalan sangat efektif, ditunjukkan oleh capaian patroli pengamanan kawasan hutan dan mangrove sebesar 427,87%, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mencapai 236,61% dari target.
3. Rehabilitasi, kegiatan penanaman pada lahan kritis di luar kawasan hutan mencapai 5.124,40%, menunjukkan percepatan pemulihan lingkungan yang sangat signifikan.
4. Penguatan usaha ekonomi perhutanan sosial juga menunjukkan kinerja positif melalui pendampingan kelembagaan kelompok perhutanan sosial yang mencapai 119,43%. Sementara itu, tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sektor kehutanan tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah sebesar 93,07%, yang dikategorikan sangat tinggi.
5. Pada tujuan Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan, indikatorstrategis seperti persentase tutupan lahan berhasil dipertahankan sesuai target, yaitu 18,8%.
6. Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah menunjukkan tren sangat positif, ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan sebesar 0,91% (364% dari target) serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 3,89% atau 238,65% dari target.

7. Dari aspek pemberdayaan masyarakat, kapasitas dan kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 213,67% dan 154,33% dari target. Namun demikian, indikator peningkatan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial masih berada pada kategori sedang dengan capaian 75,09%, yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
8. Pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, Dinas Kehutanan berhasil menekan deforestasi hingga 0,214%, jauh lebih baik dari target, serta meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Indeks Keanekaragaman Hayati, yang seluruhnya berada pada kategori sangat tinggi.
9. Upaya rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan, dengan capaian rehabilitasi lahan kritis sebesar 353,85% dan peningkatan tutupan lahan sempadan sungai sebesar 152,38%.
10. Dari sisi tata kelola organisasi, kinerja perangkat daerah tetap terjaga dengan tingkat pemenuhan layanan kinerja sebesar 93,07% serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) yang mencapai 94,96%, mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Langkah Strategis

Langkah Strategis yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Dinas Kehutanan yang ditunjukan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan sangat tinggi. Hal ini didukung oleh 5 (lima) program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Nilai efisiensi kegiatan APBD Dinas kehutanan secara keseluruhan 69,73 termasuk kategori efisien (70%-60%).
2. Kegiatan yang tidak menunjang keberhasilan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan (3) Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

3. Upaya percepatan perlu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar kendala-kendala dan persyaratan usulan perhutanan sosial dapat diketahui dan segera dipenuhi untuk mempercepat proses penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan. Capaian Tahun 2025 tetap tinggi, menunjukkan penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024, seperti pada kegiatan patroli pengamanan kawasan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4. Beberapa indikator masih memerlukan penguatan dan percepatan untuk mencapai target jangka menengah dan jangka panjang, khususnya pada indikator peningkatan kelas KUPS, perluasan akses legal perhutanan sosial, tutupan lahan pada sempadan sungai, serta pemenuhan layanan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.
5. Integrasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) sudah dilakukan terutama pada kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dengan rata-rata keterlibatan perempuan/rentan di atas 30%.
6. Dukungan dokumen perencanaan, seperti RTnRL, menjadi pedoman penting dalam penentuan lokasi prioritas penanaman, sehingga pelaksanaan rehabilitasi lebih terarah dan efektif. Selain itu, kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH dan penguatan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan dan KPH turut mempercepat pencapaian target rehabilitasi.
7. Praktik baik (inovasi) dan penghargaan dalam mendukung peningkatan capaian indikator kinerja juga dapat memotivasi kerja pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.
8. Penguatan tata kelola, pemutakhiran data berbasis spasial, dan pengembangan kegiatan baru yang berbasis sains menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja tersebut.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN
Alamat : Kol H. Burlian Punti Kayu Km 6.5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 411476 Fax (0711) 411479. Kode Pos 30125
E-Mail : dishutprovsumsel@yahoo.co.id Website: www.dishutsumsel.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 31 - Januari - 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,
ELEN SETIADI, S.H.,M.S.E.	Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19691208 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya	Rp. 77.484.874.860
2.	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu	61 Lokasi
		Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	12,19%
3.	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman	10 Hektar
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0,14%
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	175 Kelompok
5.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	55.069.890.978	APBD
2.	Pengelolaan Hutan	Rp.	8.260.000.000	APBD
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp.	100.000.000	APBD
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp.	821.000.400	APBD
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp.	50.000.000	APBD

Palembang, 31 Januari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691208 199603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN
Alamat : Kol H. Burlian Punti Kayu Km 6.5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 411476 Fax (0711) 411479. Kode Pos 30125
E-Mail : dishutprovsumsel@yahoo.co.id Website: www.dishutsumsel.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Koimudin, S.H.,M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru.
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua, Gubernur Sumatera Selatan,	Pihak Pertama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan,
H. Herman Deru	Drs. H. Koimudin, S.H.,M.M. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19691208 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	Persentase tutupan lahan	Persentase	18,8

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 58.796.152.406,-	APBD
2.	Pengelolaan Hutan	Rp. 10.774.832.000,-	APBD/DBH-DR/DBH-Sawit
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp. 70.200.000,-	APBD
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	RP. 2.549.543.300,-	APBD/DBH-DR
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 27.322.600,-	APBD

Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan

H. Herman Deru

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. H. Koimudin, S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691208 199603 1 001

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	DATA DUKUNG	WAKTU				OUTPUT/HASIL	KETERANGAN (DIISI OLEH APIP)			UNIT PENANGGUNG JAWAB/KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV		BELUM	DALAM PROSES	SELESAI	
1	Hasil pengukuran kinerja digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kinerja	Mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya ke dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berjalan	1) Menginventarisasi hasil pengukuran kinerja (IKU dan IKK) tahun sebelumnya.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun sebelumnya	X				- Dokumen perencanaan kinerja tersusun berbasis hasil pengukuran kinerja				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Subbag PEP
			2) Menganalisis capaian kinerja, permasalahan, dan faktor pendukung/penghambat.	- Hasil evaluasi SAKIP	X				- Target dan indikator kinerja lebih realistis dan terukur				
			3) Menggunakan hasil analisis sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja.	- Dokumen pengukuran IKU dan IKK	X				- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja				
			4) Menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan hasil evaluasi kinerja.	- Notulen rapat evaluasi kinerja	X								
			5) Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja (Renstra/Renja/Perjanjian Kinerja).		X								
2	Melakukan Reviu internal atas laporan Kinerja yang telah disusun.	Melaksanakan reviu internal secara sistematis terhadap laporan kinerja sebelum ditetapkan dan disampaikan	1) Membentuk tim reviu internal laporan kinerja.	- Draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	X				- Laporan kinerja telah direviu secara internal				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Subbag PEP
			2) Menyusun jadwal dan pedoman reviu laporan kinerja.	- Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, PK)	X				- Laporan kinerja lebih akurat, konsisten, dan sesuai pedoman SAKIP				
			3) Melakukan reviu kesesuaian antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.	- Pedoman SAKIP	X				- Tersedianya dokumen hasil reviu internal				
			4) Mengidentifikasi ketidaksesuaian data, indikator, dan narasi kinerja.	- Berita Acara/Rekap hasil reviu internal	X								
			5) Menyampaikan hasil reviu dan rekomendasi perbaikan kepada unit penyusun.		X								
			6) Melakukan perbaikan dan finalisasi laporan kinerja.		X								
3	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi keberhasilan /kegagalan Indicator kinerja dan efisiensi atas pengunaan sumber daya serta menginfokan upayaPeyempurnaan	1. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang komprehensif, analitis, dan berorientasi perbaikan berkelanjutan 2. Menyusun laporan kinerja mempedomani	1. Mengumpulkan data realisasi kinerja dan anggaran dari seluruh bidang/unit kerja	1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	X				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang memuat analisis capaian kinerja, efisiensi sumber daya, serta rekomendasi perbaikan kinerja				Sekretariat Dinas Kehutanan (Subbagian PEP) bekerja sama dengan seluruh Bidang Teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	DATA DUKUNG	WAKTU				OUTPUT/HASIL	KETERANGAN (DIISI OLEH APIP)			UNIT PENANGGUNG JAWAB/KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV		BELUM	DALAM PROSES	SELESAI	
	kinerja ke depan pada masing-masing indicator kinerja	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2. Membandingkan target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK)	2. Dokumen Renstra dan Renja Dinas Kehutanan	X								
			3. Menganalisis tingkat capaian, keberhasilan/kegagalan, serta efisiensi penggunaan sumber daya	3. Data realisasi indikator kinerja dan anggaran Tahun 2025	X								
			4. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja	4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja	X								
			5. Merumuskan upaya penyempurnaan dan rencana tindak lanjut pada masing-masing indikator kinerja	5. Data pendukung kegiatan/sub kegiatan dari bidang teknis	X								
			6. Menyusun dan memfinalisasi dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025		X								
4	Laporan kinerja agar menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP	Mengintegrasikan seluruh hasil tindak lanjut rekomendasi APIP ke dalam Laporan Kinerja Tahun 2025	1. Menginventarisasi seluruh rekomendasi APIP	Laporan hasil pemeriksaan APIP, matriks tindak lanjut, bukti dukung penyelesaian rekomendasi		X			LKjIP Tahun 2025 yang memuat informasi lengkap tindak lanjut rekomendasi APIP				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Subbag PEP
			2. Mengumpulkan bukti tindak lanjut dari masing-masing unit kerja				X						
			3. Memetakan status tindak lanjut (selesai/proses/belum)				X						
			4. Menyajikan hasil tindak lanjut dalam bab evaluasi LKjIP				X						
5	Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri atas Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (AKIP)	Penerapan mekanisme reviu dan validasi berjenjang atas penilaian mandiri AKIP	1. Melaksanakan penilaian mandiri AKIP oleh perangkat daerah	Dokumen penilaian mandiri AKIP, berita acara reviu, notulen validasi			X		Hasil penilaian mandiri AKIP yang lebih objektif dan akuntabel				Sekretariat Dinas dan Tim SAKIP Dinas Kehutanan
			2. Melakukan reviu internal oleh atasan langsung/tim SAKIP				X						
			3. Melakukan validasi akhir oleh pimpinan perangkat daerah				X						
6	Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.	Penggunaan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan kinerja dan pengelolaan sumber daya	1. Mengkaji hasil evaluasi SAKIP internal dan eksternal	Laporan evaluasi SAKIP, rekomendasi APIP				X	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan				Sekretariat Dinas dan seluruh Bidang Teknis
			2. Mengidentifikasi area perbaikan kinerja dan efisiensi					X					
			3. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan					X					
7	Memanfaatkan informasi dokumen laporan kinerja dalam evaluasi	Integrasi hasil LKjIP dalam proses evaluasi dan perencanaan kinerja	1. Menganalisis capaian kinerja dalam LKjIP	LKjIP Tahun sebelumnya, Renja, hasil evaluasi kinerja				X	Dokumen perencanaan kinerja yang lebih tepat sasaran				Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	LANGKAH KERJA	DATA DUKUNG	WAKTU				OUTPUT/HASIL	KETERANGAN (DIISI OLEH APIP)			UNIT PENANGGUNG JAWAB/KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV		BELUM	DALAM PROSES	SELESAI	
	pencapaian keberhasilan Kinerja dan penyusunan perencanaan kinerja		2. Mengidentifikasi indikator yang belum optimal					X					
			3. Menjadikan hasil analisis sebagai dasar penyusunan Renja					X					
8	Menyelaraskan antara Target yang ditetapkan di dokumen Renstra 2025-2029 dengan target yang ditetapkan di dalam dokumen IKU 2025	Penyelarasan dan harmonisasi indikator dan target kinerja	1. Mereviu target Renstra dan IKU	Dokumen Renstra 2025–2029, dokumen IKU 2025		X			Keselarasan target strategis dan operasional				Sekretariat Dinas dan Bidang Teknis
			2. Menyesuaikan target IKU agar selaras dengan Renstra			X							
			3. Menetapkan IKU hasil penyelarasan			X							
9	Mengoptimalkan Capaian Realisasi yang ada di Dinas kehutanan	Optimalisasi pemanfaatan capaian kinerja sebagai praktik baik	1. Mengidentifikasi capaian kinerja yang optimal	Data realisasi kinerja, laporan kegiatan		X			Peningkatan capaian indikator kinerja				Seluruh Bidang Teknis
			2. Mendokumentasikan praktik baik (best practice)			X							
			3. Mereplikasi pada unit/kegiatan lain			X							
10	Memberikan pelatihan kepada SDM yang ada untuk mengikuti Pelatihan peyusunan SAKIP	Peningkatan kapasitas SDM di bidang SAKIP	1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan	Sertifikat pelatihan, modul SAKIP		X			SDM yang kompeten dalam penyusunan dan evaluasi SAKIP				Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Perencanaan
			2. Mengikutsertakan SDM pada pelatihan/bimtek SAKIP			X							
			3. Menerapkan hasil pelatihan					X					
11	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil evaluasi internal	1. Menyusun rencana aksi tindak lanjut	Laporan evaluasi internal, matriks RTL				X	Penyelesaian rekomendasi evaluasi internal				Sekretariat Dinas dan Bidang Terkait
			2. Melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi					X					
			3. Melaporkan hasil tindak lanjut					X					
12	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan	1. Mengkaji hasil evaluasi internal	Laporan evaluasi internal AKIP				X	Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja				Sekretariat Dinas dan Pimpinan Perangkat Daerah
			2. Mengintegrasikan ke perencanaan dan pelaksanaan kinerja					X					
			3. Monitoring perbaikan kinerja					X					

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEHUTANAN							**57.700.890.978,00**	**64.300.891.378,00**	**63.205.511.013,00**	**5.504.620.035,00**							**65.534.455.033,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**57.700.890.978,00**	**64.300.891.378,00**	**63.205.511.013,00**	**5.504.620.035,00**							**65.534.455.033,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**57.700.890.978,00**	**64.300.891.378,00**	**63.205.511.013,00**	**5.504.620.035,00**							**65.534.455.033,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**-**	**100 %**	**54.909.890.978,00**	**55.069.890.978,00**	**57.764.506.513,00**	**4.820.564.055,00**							**59.730.455.033,00**	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	275.000.000,00	275.000.000,00	165.000.000,00	-110.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemerintah Provinsi		460.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	8 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	105.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			210.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	47.603.336.700,00	47.603.336.700,00	52.231.112.335,00	4.627.775.635,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemerintah Provinsi		49.593.172.055,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				339 Orang/ Bulan	497 Orang/ Bulan	47.163.336.700,00	47.163.336.700,00	51.826.752.335,00	4.663.415.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			49.053.172.055,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	2 Dokumen	340.000.000,00	340.000.000,00	324.360.000,00	-15.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			340.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemerintah Provinsi		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			105.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			70.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	95.000.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemerintah Provinsi		489.362.978,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			351.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			63.362.978,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.407.000.000,00	1.567.000.000,00	1.202.500.000,00	-204.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemerintah Provinsi		2.279.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			120.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	85.500.000,00	35.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			170.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			190.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			133.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			12.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	100 Laporan	900.000.000,00	900.000.000,00	500.000.000,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			1.200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			94.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemerintah Provinsi		630.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	- -			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			80.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.439.554.278,00	4.439.554.278,00	3.180.894.278,00	-1.258.660.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum	Pemerintah Provinsi		4.653.920.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	584.634.278,00	584.634.278,00	584.634.278,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			189.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.834.920.000,00	3.834.920.000,00	2.576.260.000,00	-1.258.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			3.834.920.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	980.000.000,00	980.000.000,00	830.000.000,00	-150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum	Pemerintah Provinsi		1.375.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	680.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			730.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum			195.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan**				**77.484.874. 860 Rupiah**	**77.484.874. 860 Rupiah**	**1.920.000.000,00**	**8.260.000.000,00**	**4.513.938.500,00**	**1.929.000.000,00**							**3.849.000.000,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya*				77.484.874. 860 Rupiah	77.484.874. 860 Rupiah	75.000.000,00	6.075.000.000,00	41.750.000,00	-33.250.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		276.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	6.075.000.000,00	41.750.000,00	-33.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			126.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya*				77.484.874. 860 Rupiah	77.484.874. 860 Rupiah	0,00	0,00	268.000.000,00	268.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Provinsi		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				0 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	268.000.000,00	268.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya*				77.484.874. 860 Rupiah	77.484.874. 860 Rupiah	280.000.000,00	280.000.000,00	153.770.000,00	-126.230.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	74.975.000,00	-55.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	78.795.000,00	-71.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*				0,14 %	0,14 %	235.000.000,00	575.000.000,00	2.105.722.500,00	1.870.722.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pemerintah Provinsi		948.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				-	1 0	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	26 Ha	160.000.000,00	500.000.000,00	1.005.722.500,00	845.722.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DBH SAWIT	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			240.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan																		
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			208.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				8 Laporan	150 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	900.000.000,00	825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan																		
			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla*				12,19 % 61 Lokasi	12,19 % 61 Lokasi	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	1.741.196.000,00	411.196.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemerintah Provinsi		1.775.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				15 Laporan	15 Laporan	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	1.681.196.000,00	551.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			1.375.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				200 Ha	200 Ha	200.000.000,00	200.000.000,00	60.000.000,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya*				-	77.484.874.860 Rupiah	0,00	0,00	153.500.000,00	153.500.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				-	15 Laporan	0,00	0,00	153.500.000,00	153.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*				-	0,14 %	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pemerintah Provinsi		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																		
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				0 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.**				**-**	**2 Lokasi**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**70.200.000,00**	**150.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	*Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.*				-	2 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	70.200.000,00	-29.800.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Masyarakat sekitar kawasan hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				80 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	70.200.000,00	-29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial**				**175 Kelompok**	**175 Kelompok**	**721.000.000,00**	**821.000.400,00**	**829.543.300,00**	**639.000.000,00**							**1.360.000.000,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan*				175 Kelompok	175 Kelompok	721.000.000,00	821.000.400,00	829.543.300,00	108.543.300,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat sekitar kawasan hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial		1.360.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				70 Kelompok	28 Kelompok	471.000.000,00	571.000.400,00	211.000.000,00	-260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			800.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				20 Orang	30 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	348.624.000,00	278.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	5000 Hektar	180.000.000,00	180.000.000,00	269.919.300,00	89.919.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan**				**0,14 %**	**0,14 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**27.322.600,00**	**295.000.000,00**							**345.000.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi*				0,14 %	0,14 %	50.000.000,00	50.000.000,00	27.322.600,00	-22.677.400,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Masyarakat		345.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	27.322.600,00	-22.677.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			120.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	J U M L A H								**57.700.890.978,00**	**64.300.891.378,00**	**63.205.511.013,00**	**2.951.753.598.448,00**							**65.534.455.033,00**	